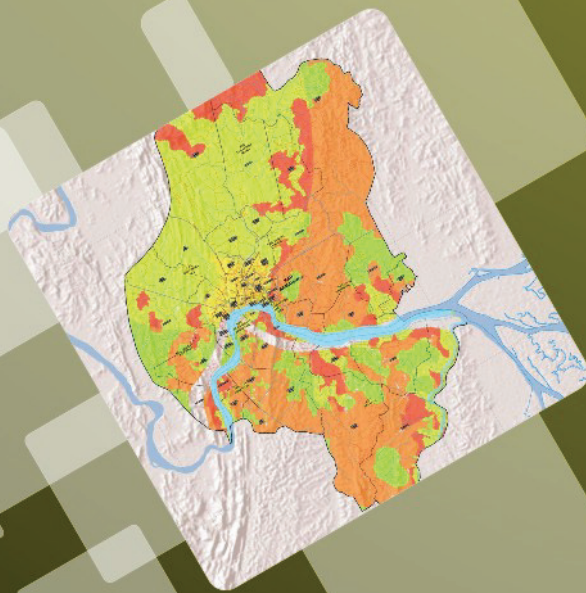


DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Pemerintah
Kota Samarinda

TAHUN ANGGARAN 2012

Difasilitasi Oleh:



PT. CATURBINA GUNA PERSADA



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

**KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR LAMPIRAN	IX
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN.....	2
1.3 SASARAN.....	2
1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN	2
1.5 LANDASAN HUKUM	2
1.6 RUANG LINGKUP	5
1.7 PENGERTIAN	5
BAB 2. GAMBARAN UMUM BENCANA	11
2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH	11
2.2 SEJARAH KEJADIAN BENCANA	13
2.2.1 Sejarah Bencana Indonesia	13
2.2.2 Sejarah Bencana Provinsi Kalimantan Timur	15
2.2.3 Sejarah Bencana Kota Samarinda	17
2.3 ANALISA KECENDERUNGAN.....	17
BAB 3. KAJIAN RISIKO BENCANA	21
3.1 METODOLOGI	22
3.1.1 Prasyarat Umum.....	22
3.1.2 Metode Umum	23
3.1.3 Korelasi Penyusunan Peta dan Dokumen Kajian.....	25
3.2 TINGKAT ANCAMAN BENCANA.....	26
3.2.1 Banjir	28
3.2.2 Kebakaran Hutan dan Lahan.....	28
3.2.3 Kekeringan	29
3.2.4 Konflik Sosial	29
3.2.5 Cuaca Ekstrim	29

3.2.6 Tanah Longsor	30
3.2.7 Epidemi dan Wabah Penyakit.....	30
3.3 TINGKAT KERUGIAN	31
3.3.1 Banjir	32
3.3.2 Kebakaran Hutan dan Lahan.....	32
3.3.3 Kekeringan	32
3.3.4 Konflik Sosial	32
3.3.5 Cuaca Ekstrim	32
3.3.6 Tanah Longsor	33
3.3.7 Epidemi dan Wabah Penyakit	33
3.4 TINGKAT KAPASITAS	33
3.4.1 Prioritas dan Indikator Penghitungan Indeks Kapasitas Daerah	34
3.4.2 Hasil Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah	38
3.4.3 Analisa Indeks Kapasitas Kota Samarinda.....	40
3.4.3 Kebijakan Prioritas Penanggulangan Bencana	45
3.5 TINGKAT RISIKO BENCANA.....	46
3.5.1 Peta Risiko Bencana	47
3.5.2 Peta Risiko Multi Bahaya.....	47
3.5 BENCANA PRIORITAS	56
BAB 4. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	57
4.1 VISI DAN MISI	58
4.2 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA	58
4.2.1 Regulasi.....	58
4.2.2 Kelembagaan	59
4.3 STRATEGI DAN SASARAN	60
4.3.1 Penguatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan.....	61
4.3.2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu	62
4.3.3 Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan	63
4.3.4 Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.....	63
4.3.5 Perlindungan Masyarakat dari Bencana.....	64
4.3.6 Penanganan Bencana	65
4.4 KAIDAH PELAKSANAAN	65
4.4.1 Keterlibatan	65
4.4.2 Advokasi	67

BAB 5. KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN FOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA.....	69
5.1 KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN FOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA	70
5.1.1 Penguatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan.....	70
5.1.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu	70
5.1.3 Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan	71
5.1.4 Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.....	71
5.1.5 Perlindungan Masyarakat dari Bencana dan Penanganan Bencana	72
5.2 PAGU INDIKATIF FOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA.....	78
5.3 ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	78
BAB 6. PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI	81
6.1 PELAPORAN	81
6.2 MONITORING DAN EVALUASI	81
BAB 7. PENUTUP.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Samarinda	11
Gambar 2. Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia	15
Gambar 3. Persentase Jumlah Kejadian Bencana Provinsi Kalimantan Timur	16
Gambar 4. Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Samarinda	18
Gambar 5. Persentase Kejadian Bencana di Kota Samarinda Tahun 2009-2011	18
Gambar 6. Metode Pengkajian Risiko Bencana	23
Gambar 7. Pemetaan Risiko Bencana	24
Gambar 8. Metode Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	25
Gambar 9. Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana	26
Gambar 10. Matriks Penentuan Tingkat Ancaman Bencana di Kota Samarinda.....	27
Gambar 11. Matriks Penentuan Tingkat Kerugian Bencana di Kota Samarinda	31
Gambar 12. Matriks Penentuan Tingkat Kapasitas Daerah di Kota Samarinda	34
Gambar 13. Matriks Penentuan Indeks Kapasitas Daerah di Kota Samarinda.....	40
Gambar 14. Matriks Penentuan Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda	46
Gambar 15. Peta Risiko Banjir Kota Samarinda	48
Gambar 16. Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Samarinda	49
Gambar 17. Peta Risiko Kekeringan Kota Samarinda	50
Gambar 18. Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kota Samarinda	51
Gambar 19. Peta Risiko Konflik Sosial Kota Samarinda.....	52
Gambar 20. Peta Risiko Tanah Longsor Kota Samarinda	53
Gambar 21. Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit Kota Samarinda	54
Gambar 22. Peta Risiko Multi Bahaya Kota Samarinda	55
Gambar 23. Matriks Penentuan Bencana Prioritas di Kota Samarinda	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Samarinda Tahun 2011	13
Tabel 2. Sejarah Kejadian Bencana di Indonesia Tahun 1815–2011	14
Tabel 3. Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Timur 1815-2011	15
Tabel 4. Sejarah Kejadian Bencana di Kota Samarinda	17
Tabel 5. Hasil Kajian Komponen Ketahanan Daerah Kota Samarinda Berdasarkan HFA	39
Tabel 6. Hasil Kajian Kesiapsiagaan Kota Samarinda	39
Tabel 7. Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda	46
Tabel 8. Peran Instansi Pemerintah dan Lembaga Daerah Kota Samarinda	65
Tabel 9. Kebijakan, Program, dan Fokus Prioritas Penguatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan	70
Tabel 10. Kebijakan, Program, dan Fokus Prioritas Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu	70
Tabel 11. Kebijakan, Program, dan Fokus Prioritas Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan	71
Tabel 12. Kebijakan, Program, dan Fokus Prioritas Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	71
Tabel 13. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Banjir	72
Tabel 14. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	73
Tabel 15. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Kekeringan	74
Tabel 16. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Cuaca Ekstrem	75
Tabel 17. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Tanah Longsor	76
Tabel 18. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Konflik Sosial	77
Tabel 19. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit	77
Tabel 20. Rekapitulasi Anggaran Penanggulangan Bencana Tahun 2013 - 2017	79
Tabel 21. Format Monitoring dan Evaluasi	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Album Peta Risiko Bencana
- Lampiran 2. Matrik Sandingan Fokus Prioritas, Sasaran, Keterlibatan Instansi dan Pagu Indikatif

Bab

1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kejadian bencana di Kota Samarinda hampir terjadi setiap tahun, bencana yang sering terjadi adalah bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Kejadian tersebut menimbulkan kerugian korban jiwa dan kerugian material seperti rusaknya pemukiman dan fasilitas umum, serta kerugian lingkungan. Selain itu, bencana kebakaran hutan dan lahan juga sering terjadi meskipun tidak banyak memberikan dampak yang signifikan bagi korban jiwa dan kerugian harta.

Pemerintah Kota Samarinda menyadari bahwa dibutuhkan upaya terencana, terukur, terstruktur dan terpadu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditujukan untuk menghadapi kemungkinan kejadian bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Terlihat pada pemerintah daerah membentuk BPBD tingkat kabupaten sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini untuk mempermudah koordinasi penanggulangan bencana antar instansi di Kota Samarinda.

Untuk mempertajam upaya-upaya penanggulangan bencana di Kota Samarinda, dibutuhkan perencanaan terpadu yang terukur, terstruktur dan terarah yang melibatkan seluruh institusi terlibat dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, Pemerintah Kota Samarinda perlu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda tahun 2013-2017. Dokumen ini digunakan sebagai panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Samarinda dan pedoman bagi instansi pemerintah lainnya, sekaligus merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah,

yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program penanggulangan bencana berdasarkan kondisi dan risiko bencana di Kota Samarinda.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan RPB melibatkan peran aktif dari unsur SKPD, kecamatan, instansi vertikal pemerintah dan kelompok masyarakat di Kota Samarinda. Masing-masing unsur memberikan masukan dan kajian melalui diskusi terarah (*focus group discusion*). Dengan demikian diharapkan program-program dalam RPB ini dapat segera diintegrasikan dan sesuai dengan peran masing-masing SKPD dan unsur lembaga lainnya di Kota Samarinda.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan RPB Kota Samarinda Tahun 2013-2017 adalah:

1. Sebagai panduan daerah dalam penanggulangan bencana.
2. Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Kota Samarinda.
3. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kota Samarinda menuju profesionalisme bencana.
4. Melindungi masyarakat di wilayah Kota Samarinda dari ancaman bencana.

1.3 SASARAN

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda ini mempunyai sasaran sebagai pedoman bagi pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda.

1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda tahun 2013-2017 diharapkan menjadi bagian yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda. Terutama menjadi bagian pada prioritas pembangunan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Samarinda.

1.5 LANDASAN HUKUM

RPB Kota Samarinda ini dibuat berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan Kota Samarinda. Landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda;
27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.

1.6 RUANG LINGKUP

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Panduan dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan, program dan berbagai fokus kegiatan. Fokus kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa sebelum, saat dan setelah terjadi bencana diterjemahkan menjadi berbagai sasaran, institusi penanggung jawab serta alokasi anggaran. Perencanaan ini menjadi mandat Pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Selain itu, dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan yang telah disusun.

Seluruh metodologi penyusunan Dokumen RPB Kota Samarinda menggunakan metodologi yang disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam proses penyusunannya, pendekatan ilmiah yang diterapkan disandingkan dengan pendapat dan opini para pelaku dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1.7 PENGERTIAN

Untuk memahami RPB Kota Samarinda ini, maka disajikan pengertian-pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat **BPBD** adalah satuan kerja perangkat daerah di pemerintahan daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. **Bahaya (*Hazard*)** adalah situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** selanjutnya disebut **DIBI** adalah sebuah aplikasi analisa tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
5. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
6. **Fokus Prioritas** adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam menanggulangi suatu bencana atau multi bencana.
7. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
8. **Kapasitas (*Capacity*)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
9. **Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Frameworks for Actions*)**, untuk selanjutnya disebut **HFA** adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan

detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.

10. **Kerentanan (*Vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
11. **Kesiapsiagaan (*Preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. **Mitigasi (*Mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. **Mitigasi Fisik (*Structure Mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
15. **Mitigasi Non-Fisik (*Non-Structure Mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan Menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
16. **Non-Proletisi** adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
17. **Pemulihan (*Recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
18. **Penanggulangan Bencana (*Disaster Management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
19. **Pencegahan (*Prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.

- 20. Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- 21. Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster Risk Reduction*)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
- 22. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- 23. Peringatan Dini (*Early Warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 24. Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
- 25. Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah unsur pelaksana operasional pada pemerintah pusat dan daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
- 26. Rehabilitasi (*Rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- 27. Rekonstruksi (*Reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
- 28. Rencana Penanggulangan Bencana** tahun 2013-2017 yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

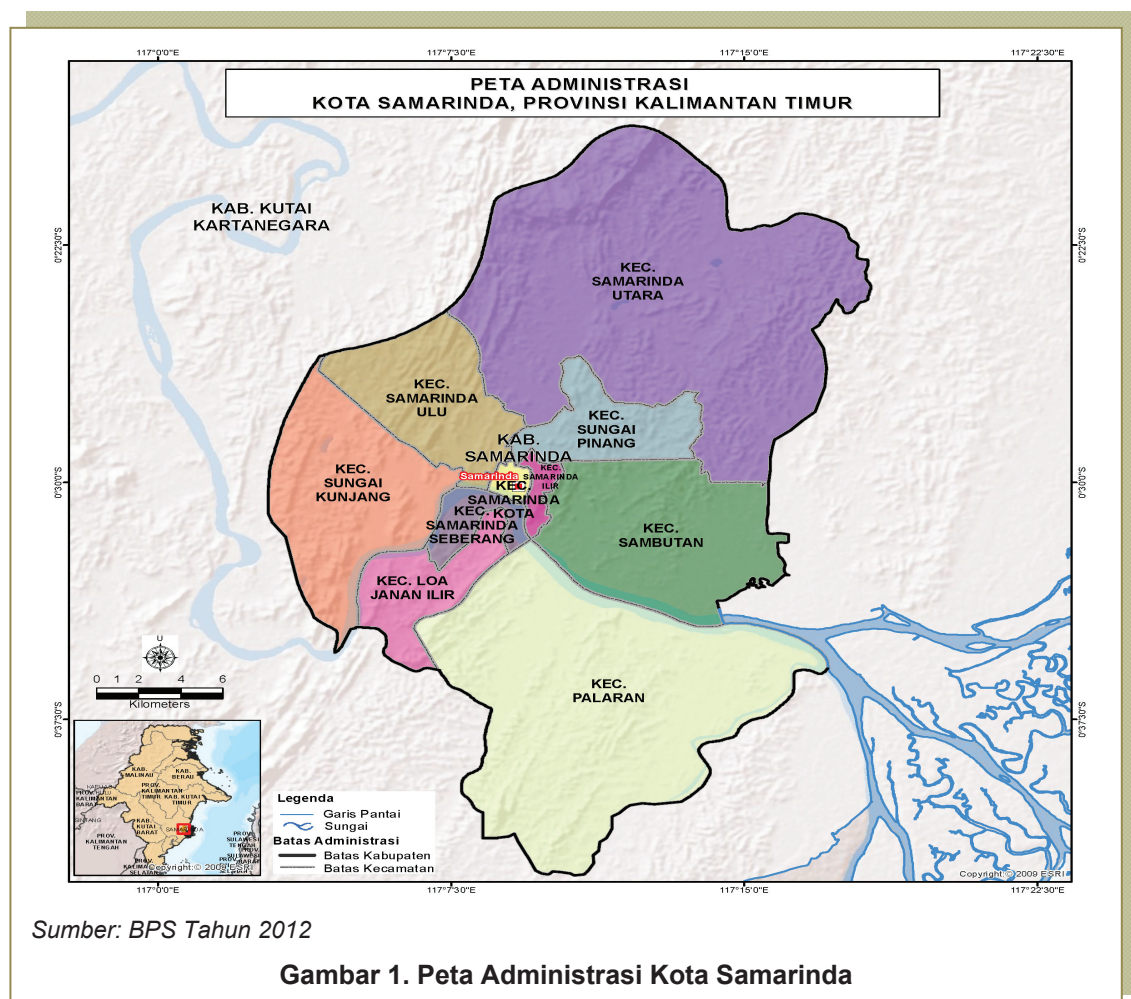
- 29. Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
- 30. Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 31. Setiap Orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 32. Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 33. Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- 34. Tanggap Darurat (*Emergency Response*) bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Upaya ini meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Bab 2

GAMBARAN UMUM BENCANA

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kota Samarinda memiliki wilayah dengan luas 71.800 Ha dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Muara Badak dan Tenggarong, sebelah timur Kecamatan Anggana, sebelah selatan Kecamatan Sanga-Sanga dan Loa Janan, sebelah barat Kecamatan Loa Kulu dan Tenggarong.



Secara geografis, Kota Samarinda terletak di daerah khatulistiwa pada posisi antara 0°21'18" – 10°9'16" Lintang Selatan dan 116°15'16" – 117°24'16" Bujur Timur. Kondisi topografi Kota Samarinda datar dan berbukit dengan ketinggian sekitar 10 – 200 meter di atas permukaan laut, terbelah oleh Sungai Mahakam. Kota Samarinda dengan daratan seluas 42,77% terletak pada ketinggian 7– 25 meter dari permukaan laut. Iklimnya tropis basah atau bisa dikatakan hujan sepanjang tahun, dengan temperatur udara antara 20⁰ – 34⁰C, curah hujan rata-rata pertahun 1.980 mm dan kelembaban udara rata-rata 85%.

Wilayah administrasi Kota Samarinda telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pisang dan Kecamatan Loa Janan Ilir, maka wilayah Kota Samarinda terbagi dalam 10 kecamatan dan 53 kelurahan. Sedangkan luas wilayah Kota Samarinda lebih kurang 718 kilometer².

Pola penggunaan lahan di Kota Samarinda berkembang mengikuti pola sebaran penduduk perkotaan. Akumulasi penduduk sebagian besar terdapat di lokasi-lokasi kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah kota dan didukung dengan prasarana dan sarana transportasi yang memadai, seperti pusat perdagangan, pusat industri, dan lokasi transmigrasi.

Penduduk Kota Samarinda memiliki kemajemukan atau plural, baik dilihat dari pengelompokan agama, maupun adat istiadat, seni budaya dan suku. Selain itu, di Kota Samarinda terjadi proses pergeseran suatu keadaan dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju ke tingkat yang lebih rendah. Penurunan ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola fikir masyarakat akibat pendidikan dan aspek sosial ekonomi.

Tingkat kepadatan penduduk di Kota Samarinda pada tahun 2011 adalah 1.052 jiwa/km². Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk pada keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, persebaran penduduk terlihat belum merata. Hal ini terlihat dengan adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan. Pola sebaran penduduk serta kepadatan penduduk Kota Samarinda dapat dilihat pada **Tabel 1.**

Tabel 1. Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Samarinda Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Palaran	50.633	221,29	229
2	Samarinda Ilir	66.798	17,18	3.888
3	Samarinda Seberang	59.956	12,49	4.800
4	Sungai Kunjang	118.702	43,04	2.758
5	Samarinda Ulu	124.609	22,12	5,633
6	Samarinda Utara	97.126	229,52	423
7	Samarinda Kota	33.165	11,12	2.982
8	Sambutan	47.101	100,95	467
9	Loa Janan Ilir	58.780	26,13	2.250
10	Sungai pinang	98.760	34,16	2.891
Total Jumlah		755.630	718,00	1.052

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2012

Dari semua kecamatan yang ada, terlihat bahwa Kecamatan Samarinda Ulu memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.633 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Samarinda Seberang dengan kepadatan 4.800 jiwa/km². Sedangkan untuk Kecamatan Samarinda Utara dan Palaran yang mempunyai wilayah lebih luas, kepadatan penduduk hanya 423 jiwa/km² dan 229 jiwa/km². Sedangkan dari rekap data Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2011 berdasarkan data badan pusat statistik Kota Samarinda adalah 392.464 jiwa penduduk laki laki dan 363.166 jiwa penduduk perempuan.

2.2 SEJARAH KEJADIAN BENCANA

2.2.1 Sejarah Bencana Indonesia

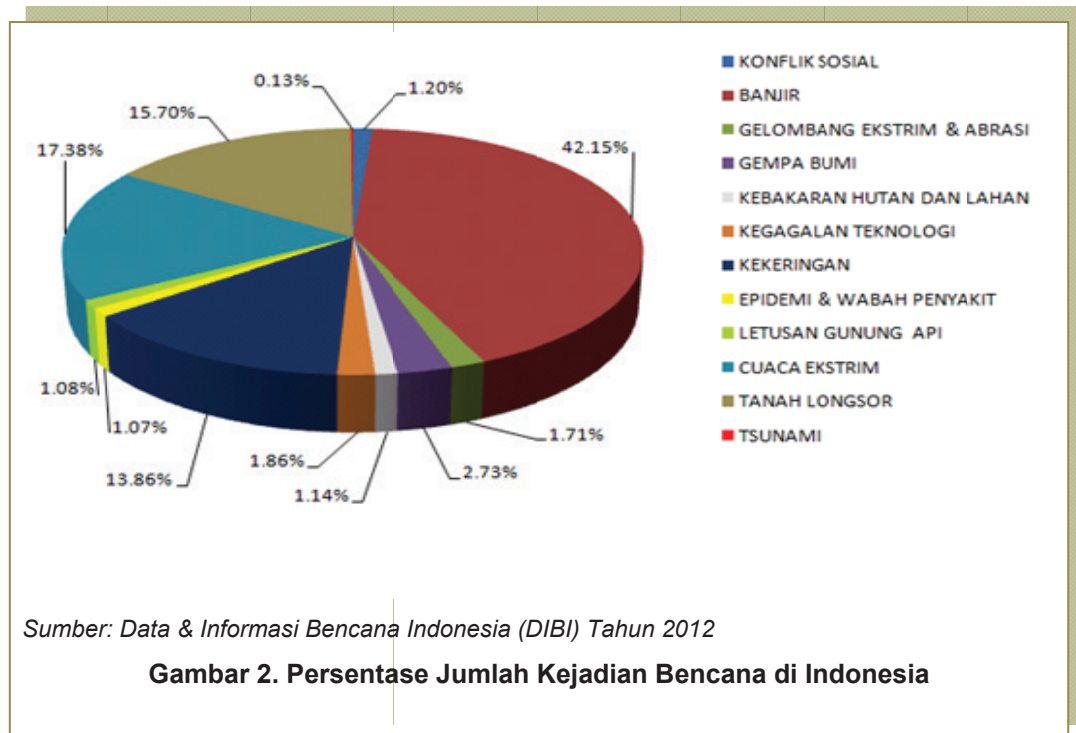
Berdasarkan catatan sejarah dari Tahun 1815-2011 pada Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI), jumlah kejadian bencana yang terjadi di Indonesia terlihat pada **Tabel 2**. Total seluruh kejadian bencana adalah 10.192 kejadian. Kejadian bencana tersebut melingkupi 12 bencana yang ditetapkan oleh BNPB. Jika dilihat dari lokasi kejadian, sebagian besar bencana terjadi di Jawa Tengah 2.163 kejadian, Jawa Barat 1.529 kejadian, dan Jawa Timur 1.203 kejadian.

Prosentase jumlah kejadian bencana di Indonesia dari tahun 1815–2011 dari data DIBI dapat dilihat pada **Gambar 2**.

Tabel 2. Sejarah Kejadian Bencana di Indonesia Tahun 1815–2011

PROVINSI	Tsunami	Tanah Longsor	Cuaca Ekstrem	Letusan Gunung Api	Epidemi & Wabah Penyakit	Kekeringan	Kegagalan Teknologi	Kebakaran Hutan & Lahan	Gempabumi	Gelombang Ekstrem & Abrasi	Banjir	Konflik Sosial	TOTAL
Aceh	1	31	53	1	4	50		8	24	25	179	7	383
Sumatera Utara	1	20	40	3	3	20	8	2	18	3	226		344
Sumatera Barat		56	22	2		17	5	7	19	10	151	2	291
Riau		1	22		2	16	2	11	0		75	2	131
Kepulauan Riau			3				2	1	0		4	1	11
Jambi		4	16			31	0	14	2		112		179
Sumatera Selatan		11	44	4	2	18	6	2	2		92	6	187
Bengkulu		3		3		9	0		13	1	26		55
Lampung		14	52	1	2	48	1	2	3	4	108	2	237
Bangka Belitung			9				1		0		6		16
Banten		13	33	1	7	53	3		3	2	93	2	210
DKI Jakarta		1	5		10		3		1	8	83	9	120
Jawa Barat		428	216	7	20	306	9	3	23	6	506	5	1529
Jawa Tengah		628	486	10	15	311	16	4	7	9	674	3	2163
DI Yogyakarta		11	23	5	1	34	2		6	1	32		115
Jawa Timur	1	143	255	22	7	173	26	1	15	4	554	2	1203
Bali	2	23	30	6		15	4	1	5	7	40	3	136
Nusa Tenggara Barat	2	9	30	1	4	60	1		10	7	73	7	204
Nusa Tenggara Timur	5	51	112	7	14	18	31	1	11	30	149	9	438
Kalimantan Barat		2	18		1	11	1	13	0	1	87	1	135
Kalimantan Selatan		7	46		1	39	6	6	0	2	177		284
Kalimantan Tengah		2	1		3	7	2	10	0		71	2	98
Kalimantan Timur		11	18		1	11	6	28	3	3	114	3	198
Gorontalo		1	4			10	0		1	1	57		74
Sulawesi Barat		7	12		1	11	2	1	4	3	30	3	74
Sulawesi Selatan		30	96		4	126	10		2	3	227	5	503
Sulawesi Tengah		8	10	3	1	3	2		23	6	104	19	179
Sulawesi Tenggara		32	96			5	17		8	16	138	1	313
Sulawesi Utara		22	6	26		8	6		7	10	51		136
Maluku		13	4	2	3	3	11	1	22	6	19	17	101
Maluku Utara		5	6	6			1		18	1	16	2	55
Papua Barat		1					1		4	1	3		10
Papua Barat	1	12	3		3		5		24	4	19	9	80
TOTAL	45	4500	4774	440	400	4440	400	440	370	474	4500	450	44400

Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2012



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bencana terjadi di Indonesia dari tahun 1815–2011 adalah konflik sosial 122 kejadian (1,20%), banjir 4.296 kejadian (42,15%), gelombang ekstrem dan abrasi 174 kejadian (1,71%), gempabumi 278 kejadian (2,73%), kebakaran hutan dan lahan 116 kejadian (1,14%), kegagalan teknologi 190 kejadian (1,86%), kekeringan 1.413 kejadian (13,86%), epidemi dan wabah penyakit 109 kejadian (1,07%), letusan gunungapi 110 kejadian (1,08%), cuaca ekstrem 1.771 kejadian (17,38%), tanah longsor 1.600 kejadian (15,70%) dan tsunami 13 kejadian (0,13%).

2.2.2 Sejarah Bencana Provinsi Kalimantan Timur

Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh BNPB di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 10 jenis potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan hasil kajian peta risiko dan sejarah kejadiannya. Berikut adalah catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dalam rentang waktu data dari tahun 1815 – 2011.

Tabel 3. Sejarah Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Timur 1815-2011

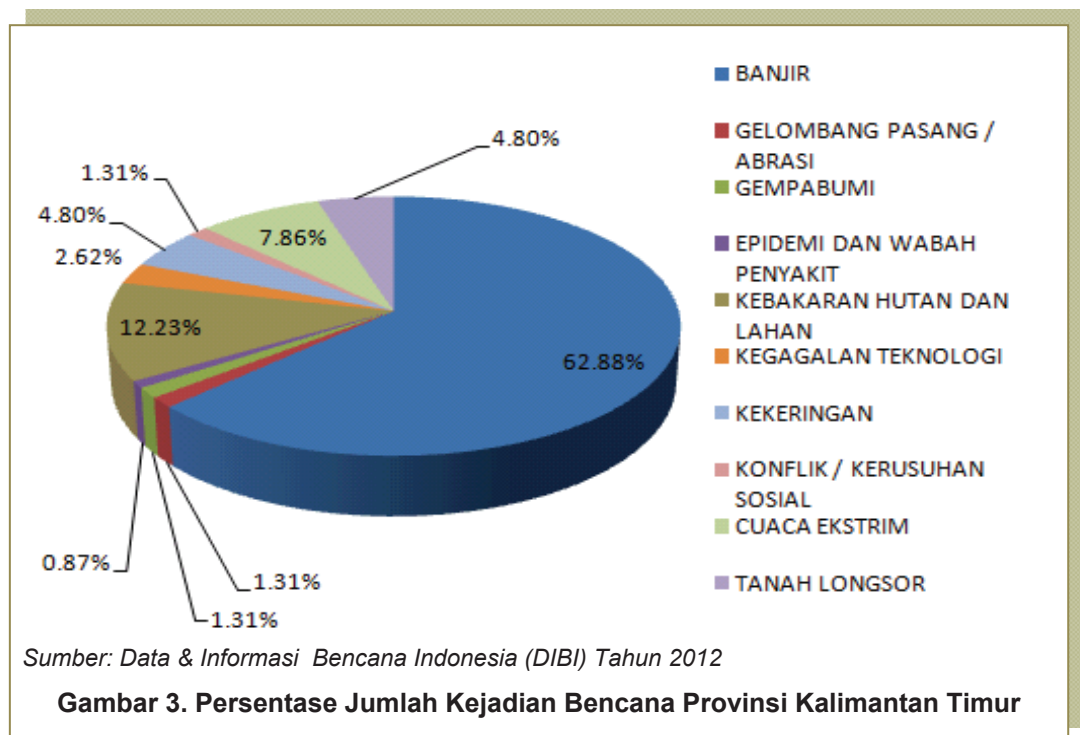
KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENDERITA	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
BANJIR	144	48	2.071	1	66.753	3.821	2.103	64
GELOMBANG PASANG / ABRASI	3	-	-	-	-	-	-	-
GEMPABUMI	3	24	40	15	-	-	-	-
EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	2	4	105	-	-	50	-	-
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	28	65	3.243	3	10.276	1.835	123	41

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENDERITA	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
KEGAGALAN TEKNOLOGI	6	4	238	-	3560	66.971	-	22
KEKERINGAN	11	2	2	-	30.764	1.100	33	-
KONFLIK / KERUSUHAN SOSIAL	3	-	-	-	525	-	29	-
CUACA EKSTREM	18	21	3	-	19.725	21.620	6.019	61
TANAH LONGSOR	11	6	416	-	79.046	11.100	1	157
JUMLAH	229	174	6.118	19	210.649	106.497	8.308	345

Sumber : Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2012

Berdasarkan **Tabel 3** di atas, jumlah bencana di Provinsi Kalimantan Timur terjadi sebanyak 229 kali kejadian, 174 orang meninggal, 6.118 luka-luka, 19 orang hilang, 8.308 rumah rusak berat, dan 345 rumah rusak ringan. Rata-rata dari keseluruhan kejadian bencana, baik bencana Banjir, Kebakaran hutan dan lahan, gempabumi, dan cuaca ekstrem merupakan bencana yang menimbulkan dampak sangat besar.

Prosentase jumlah kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 1815 – 2011 dari data DIBI dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bencana yang paling sering terjadi di Kalimantan Timur dari tahun 1815 – 2011 adalah banjir dengan 144 kejadian (63%), kebakaran hutan dan lahan 28 kejadian (12%), cuaca ekstrem 18 kejadian (8%), tanah longsor dan kekeringan 11 kejadian (5%), kegagalan teknologi 6 kejadian (3%), gelombang ekstrem, gempabumi, dan konflik sosial 3 kejadian (1%), dan epidemi dan wabah penyakit 2 kejadian (1%).

2.2.3 Sejarah Bencana Kota Samarinda

Kota Samarinda memiliki sejarah kebencanaan yang cukup kompleks. Tercatat sebanyak 6 jenis bencana pernah terjadi di Kota Samarinda dimana bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana dengan tingkat frekuensi kejadian paling tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Sejarah Kejadian Bencana di Kota Samarinda

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA LUKA	HILANG	MENDERITA	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
BANJIR	21	7	243	-	139.592	15.480	2.000	41
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	22	-	-	-	-	4	-	-
KEKERINGAN	2	-	-	-	-	-	-	-
KONFLIK SOSIAL	1	-	-	-	-	156	-	-
CUACA EKSTRIM	4	-	3	-	597	-	11	61
TANAH LONGSOR	3	-	-	-	122	-	23	7
JUMLAH	53	7	246	-	140.311	15.640	2.034	109

Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, total seluruh kejadian bencana yang tercatat di Kota Samarinda dari data DIBI adalah 53 kali kejadian, dengan korban meninggal 7 orang, luka-luka sebanyak 246 orang, dan mengungsi sebanyak 15.640. Kejadian tersebut juga mengakibatkan 2.034 rumah rusak berat dan 109 rumah rusak ringan.

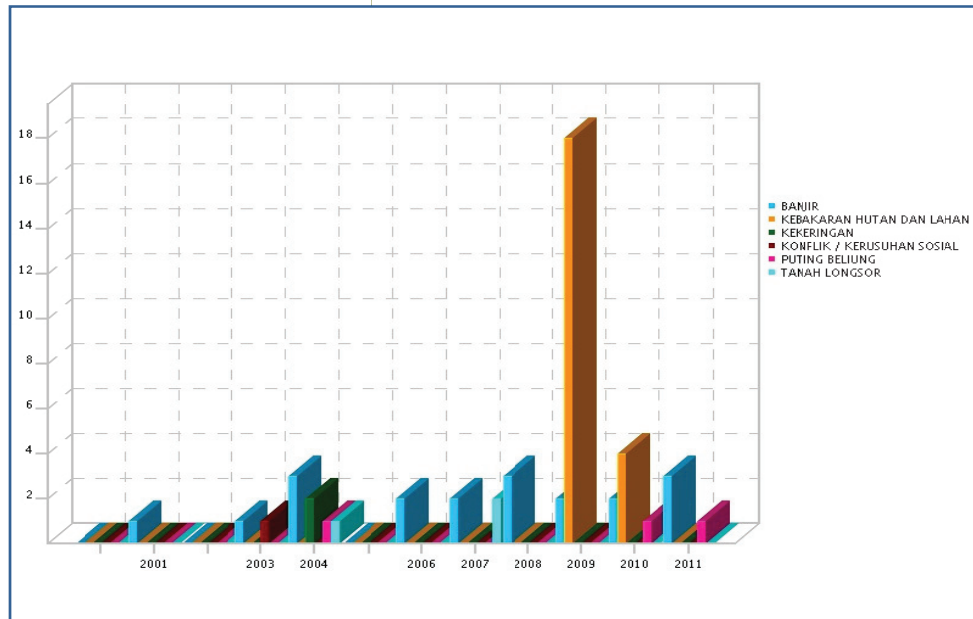
2.3 ANALISA KECENDERUNGAN

Data kejadian bencana di Kota Samarinda menunjukkan perubahan setiap tahunnya. kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian dari tahun 2000 sampai 2011 di Kota Samarinda dapat dilihat pada **Gambar 4**.

Dari **Gambar 4** dapat dilihat bahwa terdapat banyak kecenderungan kejadian bencana di Kota Samarinda dalam rentang waktu 2000 – 2011 yaitu:

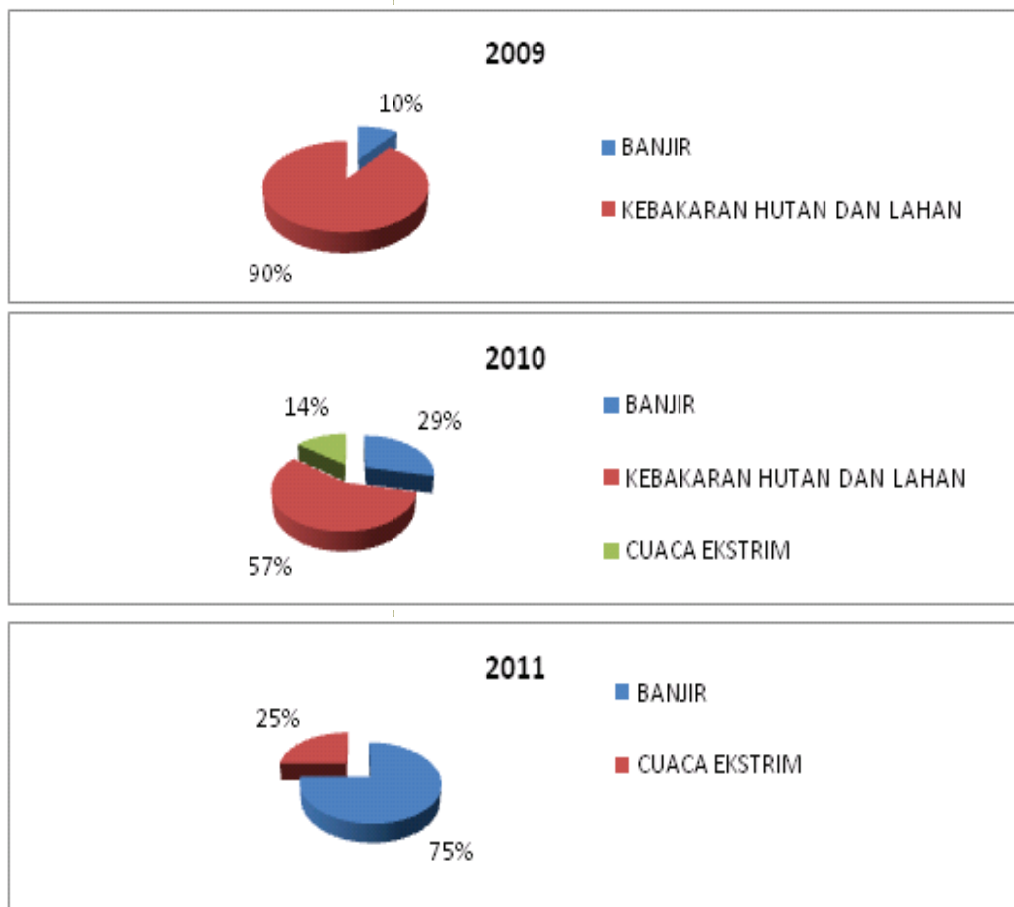
1. Bencana **banjir** terlihat cenderung meningkat.
2. Bencana **kebakaran hutan dan lahan** cenderung meningkat.
3. Bencana **cuaca ekstrim** (puting beliung) cenderung tetap.
4. Bencana **kekeringan** cenderung tetap.
5. Bencana **tanah longsor dan konflik sosial** cenderung tetap.

Secara keseluruhan kejadian bencana banjir merupakan bencana dengan frekuensi dan dampak tertinggi di Kota Samarinda dan cenderung untuk mengalami peningkatan hingga tahun 2011. Persentase kejadian bencana dalam 3 tahun terakhir di Kota Samarinda dapat dilihat dalam **Gambar 5**



Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2012

Gambar 4. Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Samarinda



Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2012

Gambar 5. Persentase Kejadian Bencana di Kota Samarinda Tahun 2009-2011

Gambar 5 merupakan persentase kejadian yang tercatat dalam data DIBI terjadi pada tahun 2009 sampai tahun 2011 di Kota Samarinda. Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir (tahun 2009-2011) bencana banjir selalu terjadi di Kota Samarinda. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi mendominasi kejadian bencana pada tahun tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2011, Kota Samarinda mengalami peningkatan jumlah kejadian bencana cuaca ekstrim.

Bab 3

KAJIAN RISIKO BENCANA

Kajian risiko bencana bertujuan untuk memperkirakan potensi kerugian, baik kerugian nyawa maupun harta benda akibat kejadian bencana. Kajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengidentifikasi tingkat ancaman, tingkat kerugian dan tingkat kapasitas daerah untuk menentukan tingkat risiko setiap jenis bencana di setiap kabupaten/kota berdasarkan kelas rendah, kelas sedang dan kelas tinggi. Sehingga hasil kajian risiko bencana dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan strategi-strategi maupun kebijakan-kebijakan prioritas daerah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana.

Tingkat risiko bencana diperoleh dari interaksi ancaman, kerentanan, serta kapasitas yang dimiliki dalam penanggulangan bencana. Interaksi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pengkajian risiko bencana terhadap suatu daerah. Untuk mendapatkan hasil tingkat ancaman, tingkat kerugian, serta tingkat kapasitas suatu daerah dalam pengkajian risiko diperoleh dengan melakukan proses identifikasi, klarifikasi dan evaluasi. Proses tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah berikut:

1. Pengkajian Ancaman

Pengkajian ancaman dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur ancaman yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter ancaman pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur berisiko oleh berbagai ancaman di lokasi tertentu.

2. Pengkajian Kerentanan

Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang

dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana.

3. Pengkajian Kapasitas

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau nonpemerintah dan faktor lain dalam menangani ancaman dengan sumberdaya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

4. Pengkajian dan Pemeringkatan Risiko

Pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana.

3.1 METODOLOGI

Komponen pengkajian risiko bencana terdiri dari ancaman, kerugian dan kapasitas. Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi bahaya, penduduk terpapar, kerugian ekonomi, kerugian fisik, kerusakan lingkungan, serta kapasitas daerah. Selain tingkat risiko, kajian diharapkan mampu menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

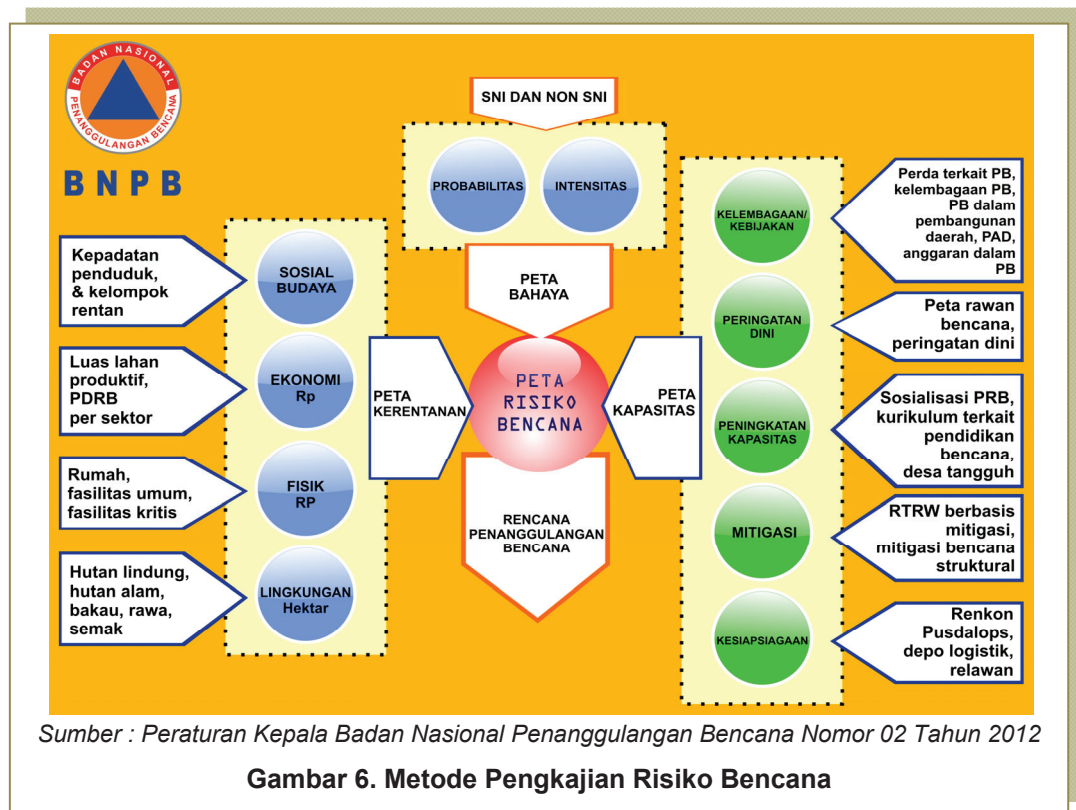
3.1.1 Prasyarat Umum

- Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisa (kedalaman analisa di tingkat nasional minimal hingga kabupaten/kota, kedalaman analisa di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan, kedalaman analisa di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat kelurahan/desa/kampung/nagari).
- Skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk provinsi; peta dengan skala 1:50.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta dengan skala 1:25.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
- Mampu menghitung jumlah penduduk terpapar bencana (dalam jiwa).

- d. Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah).
- e. Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.
- f. Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 Ha) dalam pemetaan risiko bencana.

3.1.2 Metode Umum

Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan menggunakan metode pada **Gambar 6** berikut:

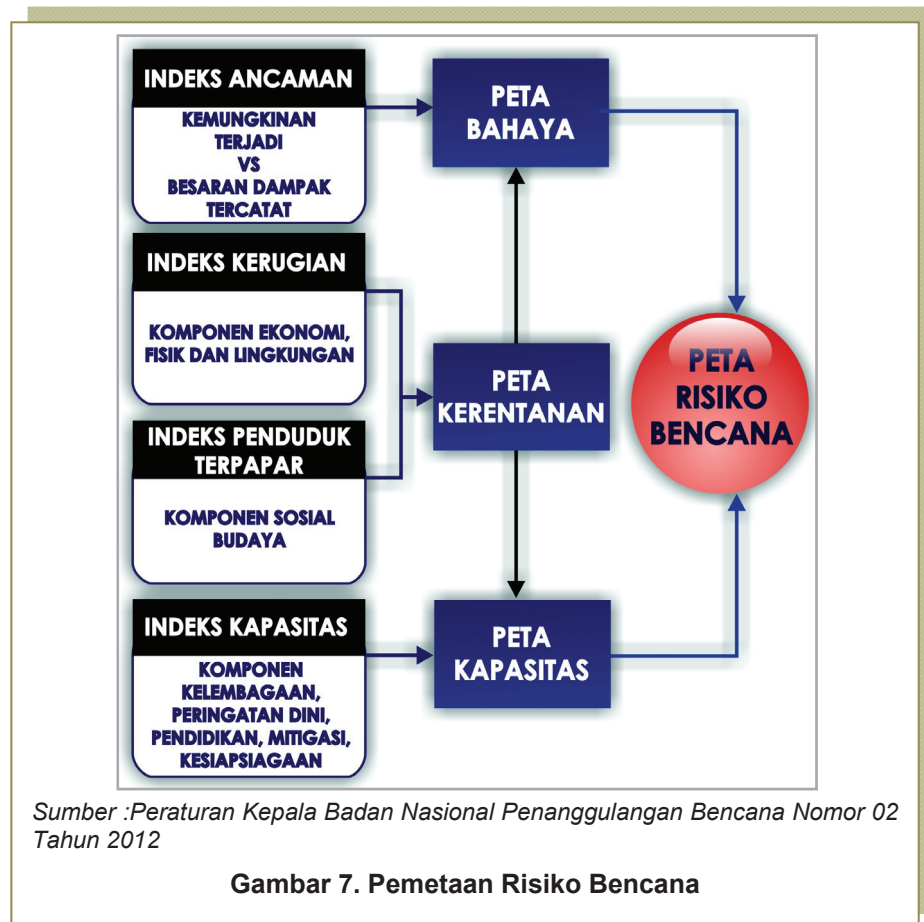


Pengkajian risiko bencana untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana disusun berdasarkan komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas. Komponen ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. Hasil dari pengkajian risiko bencana ini adalah peta risiko bencana dan dokumen kajian risiko bencana.

Mekanisme penyusunan peta risiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Peta risiko bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen

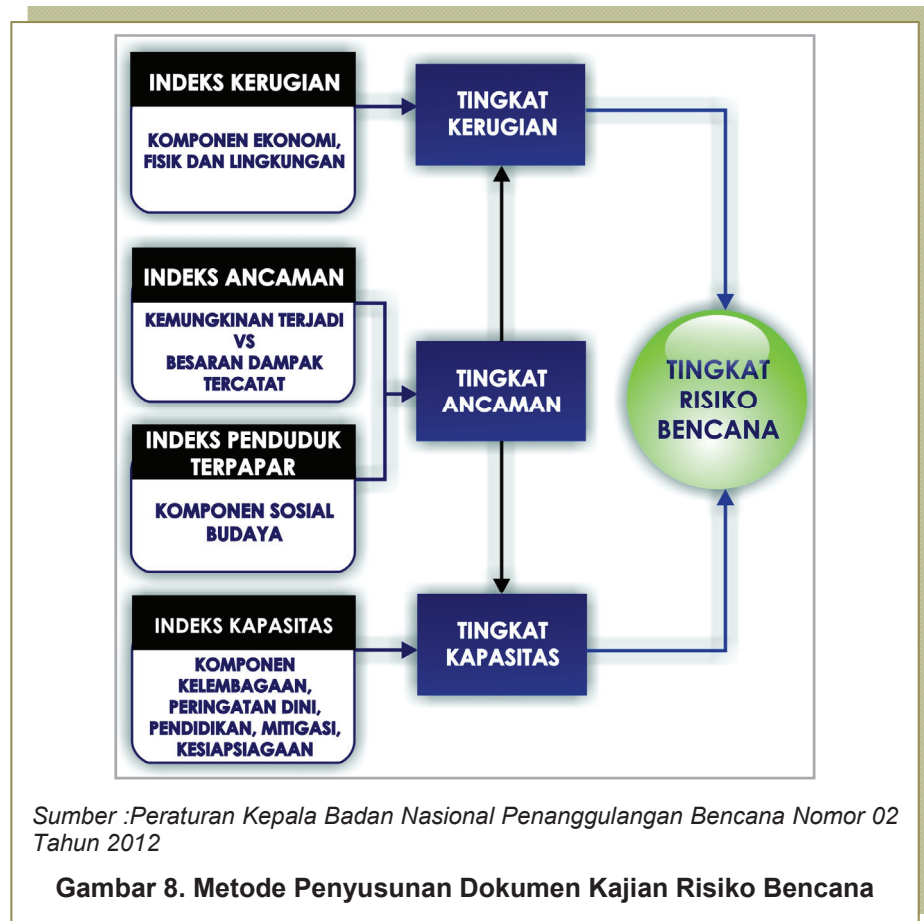
pencapaian dokumen kajian risiko bencana. Dokumen kajian bencana juga harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Pada **Gambar 7** terlihat bahwa peta risiko bencana merupakan *overlay* (penggabungan) dari peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Peta-peta tersebut diperoleh dari berbagai indeks yang dihitung dari data-data dan metode perhitungan tersendiri



Penting untuk dicatat bahwa peta risiko bencana dibuat untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada pada suatu kawasan. Metode perhitungan dan data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai indeks akan berbeda untuk setiap jenis ancaman.

Metode penyusunan dokumen kajian risiko bencana dapat dilihat pada **Gambar 8** yang memperlihatkan bahwa kajian risiko bencana diperoleh dari indeks dan data yang sama dengan penyusunan peta risiko bencana. Perbedaan yang terjadi hanya pada urutan penggunaan masing-masing indeks

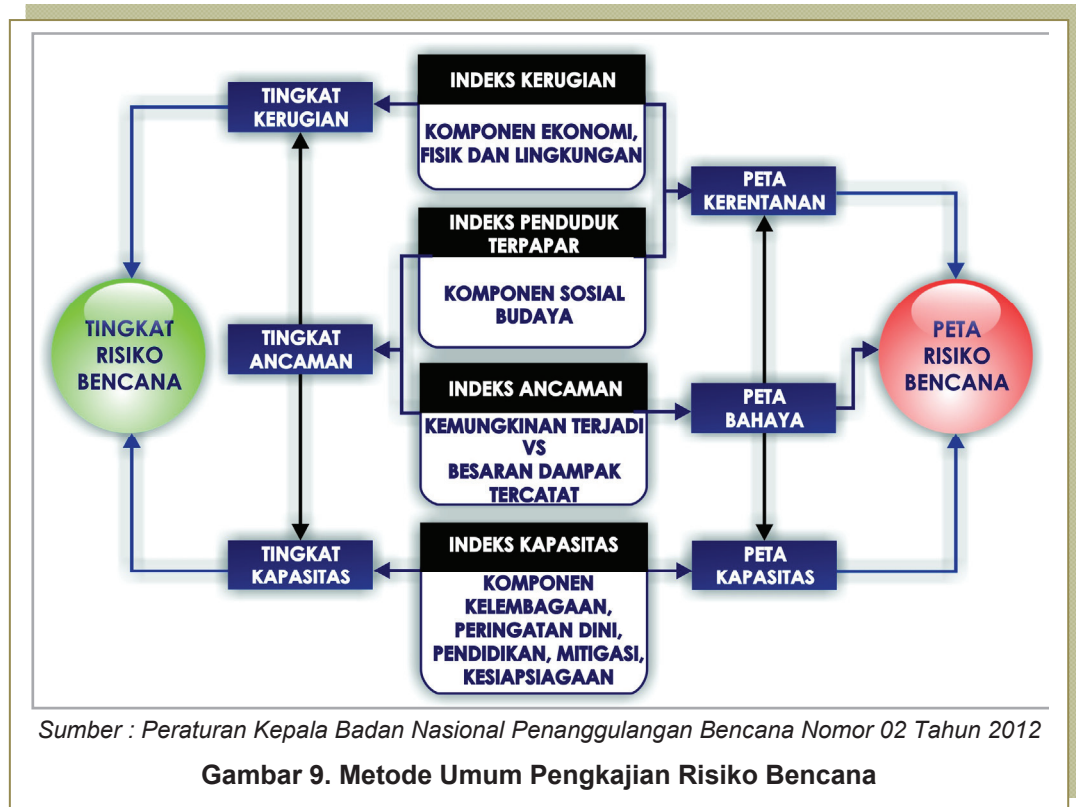


Urutan ini berubah disebabkan jiwa manusia tidak dapat dinilai dengan rupiah. Oleh karena itu, tingkat ancaman yang telah memperhitungkan indeks ancaman di dalamnya, menjadi dasar bagi perhitungan tingkat kerugian dan tingkat kapasitas. gabungan tingkat kerugian dan tingkat kapasitas merupakan tingkat risiko bencana.

3.1.3 Korelasi Penyusunan Peta dan Dokumen Kajian

Seperti yang terlihat pada **Gambar 7** dan **Gambar 8**, korelasi antara metode penyusunan Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana terletak pada seluruh indeks penyusunnya.

Indeks-indeks tersebut bila diperhatikan kembali disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah dipaparkan pada **Gambar 6**. Korelasi penyusunan peta dan dokumen kajian risiko bencana merupakan Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana Indonesia, dapat dilihat pada **Gambar 9**.



3.2 TINGKAT ANCAMAN BENCANA

Untuk penentuan tingkat ancaman bencana di Kota Samarinda maka digunakan matriks penentuan tingkat ancaman yang memadukan indeks ancaman pada lajur dengan indeks penduduk terpapar pada kolom. Titik pertemuan antara indeks ancaman dengan indeks penduduk terpapar adalah tingkat ancaman. Skala indeks ancaman dibagi dalam beberapa kategori yaitu : rendah (0,0 – 0,3), sedang (> 0,3 – 0,6), dan tinggi (> 0,6 – 1,0).

Sedangkan skala indeks penduduk terpapar dibagi dalam 3 kategori, yaitu: rendah, sedang dan tinggi, dengan masing-masing nilai indeks sebagai berikut:

1. Rendah : apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar kurang dari 500 jiwa/km², dan jumlah penduduk kelompok rentan kurang dari 20%.
2. Sedang : apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar 500–1000 jiwa/km², dan jumlah penduduk kelompok rentan 20% – 40%.
3. Tinggi : apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar lebih dari 1000 jiwa/km², dan jumlah penduduk kelompok rentan lebih dari 40%.

Jenis tingkat ancaman bencana di Kota Samarinda berdasarkan pada skala ancaman masing-masing jenis bencana dan skala penduduk terpapar di Kota Samarinda, dapat dilihat pada **Gambar 10** di bawah ini.

TINGKAT ANCAMAN		INDEKS PENDUDUK TERPAKAR		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS ANCAMAN	RENDAH	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT		KONFLIK SOSIAL
	SEDANG		CUACA EKSTRIM; KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; KEKERINGAN; TANAH LONGSOR	
	TINGGI	BANJIR		
		TINGKAT ANCAMAN BENCANA RENDAH		
		TINGKAT ANCAMAN BENCANA SEDANG		
		TINGKAT ANCAMAN BENCANA TINGGI		

Gambar 10. Matriks Penentuan Tingkat Ancaman Bencana di Kota Samarinda

Matriks di atas menggambarkan bahwa tingkat ancaman masing-masing jenis bencana di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- Bencana epidemi dan wabah penyakit, memiliki tingkat ancaman **RENDAH** di Kota Samarinda.
- Bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan konflik sosial memiliki tingkat ancaman **SEDANG** di Kota Samarinda.

Kesimpulan dari indeks ancaman bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut. Dapat dikatakan bahwa indeks ini disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi serta potensi ancaman yang ada pada suatu daerah.

Berikut beberapa jenis bahaya (peta bahaya) telah dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait, Jenis ancaman yang telah memiliki standar SNI tersebut meliputi:

1. Gempabumi (tim 9 revisi gempa)
2. Tanah Longsor (ESDM)
3. Letusan Gunungapi (PVMBG)
4. Banjir (PU dan BIG)
5. Kekeringan (BMKG)

Sedangkan ancaman non-SNI merupakan peta bahaya yang belum diperoleh dari Kementerian/Lembaga terkait. Zonasi ancaman ini harus ditentukan menggunakan metodologi yang telah ditentukan. Jenis ancaman non-SNI meliputi:

1. Tsunami
2. Konflik Sosial
3. Kegagalan Teknologi
4. Epidemi dan Wabah Penyakit
5. Kebakaran Gedung dan Permukiman
6. Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Cuaca Ekstrem
8. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Berikut dijelaskan tentang rata-rata indeks ancaman setiap bencana yang pernah terjadi dan berpotensi terjadi di Kota Samarinda. Indeks ancaman di Kota Samarinda disesuaikan dengan standar parameter yang ada pada pedoman umum pengkajian risiko bencana yang telah ditentukan oleh BNPB. Untuk lebih jelas tentang peta-peta bahaya untuk seluruh bencana ini dapat dilihat pada **Lampiran 1. Peta Risiko Bencana (halaman Peta Bahaya)**.

3.2.1 Banjir

Pengkajian indeks ancaman bencana banjir di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan beberapa parameter yang ditetapkan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana, yaitu geomorfologi, hidrologi wilayah (DAS), *landuse*, jenis tanah, dan intensitas curah hujan. Selain itu, untuk menghitung tingkat ancaman dilihat dari perpaduan antara indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar di kawasan terancam. Tingkat ancaman dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelas tingkat ancaman rendah, kelas tingkat ancaman sedang, dan kelas tingkat ancaman tinggi.

Berdasarkan hasil pengkajian pada dokumen kajian risiko bencana Kota Samarinda, tingkat ancaman bencana banjir adalah **SEDANG**. Hal ini disebabkan oleh indeks ancaman bencana banjir yang TINGGI dan indeks penduduk terpapar bencana banjir RENDAH, dengan jumlah penduduk terpapar sebanyak **27.062 jiwa**.

3.2.2 Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengkajian indeks ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan beberapa parameter yang ditetapkan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana, yaitu jenis hutan, curah hujan tahunan dan jenis tanah. Sementara itu, untuk menghitung tingkat ancaman dapat dilihat dari perpaduan antara indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar di kawasan terancam sehingga tingkat

ancaman dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelas tingkat ancaman rendah, kelas tingkat ancaman sedang, dan kelas tingkat ancaman tinggi.

Berdasarkan hasil pengkajian pada dokumen kajian risiko bencana Kota Samarinda, tingkat ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan adalah **SEDANG**. Hal ini disebabkan oleh indeks ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan yang SEDANG dan indeks penduduk terpapar SEDANG dengan jumlah penduduk terpapar sebanyak **669.748 jiwa**.

3.2.3 Kekeringan

Pengkajian indeks ancaman bencana kekeringan di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan beberapa parameter yang ditetapkan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana, yaitu peta SNI kekeringan, curah hujan tahunan dan tutupan vegetasi. Sementara itu, untuk menghitung tingkat ancaman dapat dilihat dari perpaduan antara indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar di kawasan terancam. Tingkat ancaman dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelas tingkat ancaman rendah, kelas tingkat ancaman sedang, dan kelas tingkat ancaman tinggi.

Berdasarkan hasil pengkajian pada dokumen kajian risiko bencana Kota Samarinda, tingkat ancaman bencana kekeringan adalah **SEDANG**. Hal ini disebabkan oleh indeks ancaman bencana kekeringan yang SEDANG dan indeks penduduk terpapar SEDANG, dengan jumlah penduduk terpapar sebanyak **672.562 jiwa**.

3.2.4 Konflik Sosial

Pengkajian indeks ancaman bencana konflik sosial di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan beberapa parameter yang ditetapkan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana, yaitu jumlah kejadian dan dampak kejadian. Sementara itu, untuk menghitung tingkat ancaman dilihat dari perpaduan antara indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar di kawasan terancam. Tingkat ancaman dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelas tingkat ancaman rendah, kelas tingkat ancaman sedang, dan kelas tingkat ancaman tinggi.

Berdasarkan hasil pengkajian pada dokumen kajian risiko bencana Kota Samarinda, tingkat ancaman bencana konflik sosial adalah **SEDANG**. Hal ini disebabkan oleh indeks ancaman bencana cuaca ekstrim yang RENDAH dan indeks penduduk terpapar TINGGI, dengan jumlah penduduk terpapar sebanyak **276.877 jiwa**.

3.2.5 Cuaca Ekstrim

Pengkajian indeks ancaman bencana cuaca ekstrim di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan beberapa parameter yang ditetapkan dalam pedoman umum pengkajian

risiko bencana, yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan. Sementara itu, untuk menghitung tingkat ancaman dilihat dari perpaduan antara indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar di kawasan terancam. Tingkat ancaman dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelas tingkat ancaman rendah, kelas tingkat ancaman sedang, dan kelas tingkat ancaman tinggi.

Berdasarkan hasil pengkajian pada dokumen kajian risiko Bencana Kota Samarinda, tingkat ancaman bencana cuaca ekstrim adalah **SEDANG**. Hal ini disebabkan oleh indeks ancaman bencana cuaca ekstrim yang SEDANG dan indeks penduduk terpapar SEDANG, dengan jumlah penduduk terpapar sebanyak **672.989 jiwa**.

3.2.6 Tanah Longsor

Pengkajian indeks ancaman bencana tanah longsor di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan beberapa parameter yang ditetapkan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana, yaitu kemiringan lereng (%), geomorfologi, tutupan vegetasi, dan jarak sesar/patahan. Sementara itu, untuk menghitung tingkat ancaman dapat dilihat dari perpaduan antara indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar di kawasan terancam sehingga tingkat ancaman dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelas tingkat ancaman rendah, kelas tingkat ancaman sedang, dan kelas tingkat ancaman tinggi.

Berdasarkan hasil pengkajian pada dokumen kajian risiko bencana Kota Samarinda, tingkat ancaman bencana tanah longsor adalah **SEDANG**. Hal ini disebabkan oleh indeks ancaman bencana tanah longsor yang SEDANG dan indeks penduduk terpapar SEDANG, dengan jumlah penduduk terpapar sebanyak **677.494 jiwa**.

3.2.7 Epidemi dan Wabah Penyakit

Pengkajian indeks ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan beberapa parameter yang ditetapkan pedoman umum pengkajian risiko bencana. Ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit meliputi 4 parameter, yaitu kepadatan penderita malaria, kepadatan penderita demam berdarah, kepadatan penderita HIV AIDS, dan kepadatan penduduk. Tingkat ancaman dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelas tingkat ancaman rendah, kelas tingkat ancaman sedang, dan kelas tingkat ancaman tinggi.

Berdasarkan hasil pengkajian pada dokumen kajian risiko bencana Kota Samarinda, tingkat ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit adalah **RENDAH**. Hal ini disebabkan oleh indeks ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit yang RENDAH dan indeks penduduk terpapar RENDAH, dengan jumlah penduduk terpapar **722.343 jiwa**.

3.3 TINGKAT KERUGIAN

Kerugian bencana ditinjau dari komponen fisik, ekonomi dan lingkungan. Dari pengkajian ketiga komponen tersebut, maka didapatkan indeks kerugian daerah terhadap suatu bencana. Sedangkan untuk pengkajian tingkat kerugian diperoleh dari penggabungan indeks kerugian dengan tingkat ancaman bencana yang berpotensi terjadi.

Hasil pengkajian tingkat kerugian Kota Samarinda untuk setiap jenis bencana dapat dilihat pada **Gambar 11**, sedangkan peta kerentanan dapat dilihat pada **Lampiran 1 Peta Risiko Bencana (halaman Peta Kerentanan)**.

TINGKAT KERUGIAN		INDEKS KERUGIAN		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT ANCAMAN	RENDAH		EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT;	
	SEDANG	KONFLIK SOSIAL;	CUACA EKSTRIM; BANJIR; KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; KEKERINGAN; TANAH LONGSOR;	
	TINGGI			

	TINGKAT KERUGIAN BENCANA RENDAH
	TINGKAT KERUGIAN BENCANA SEDANG
	TINGKAT KERUGIAN BENCANA TINGGI

Gambar 11. Matriks Penentuan Tingkat Kerugian Bencana di Kota Samarinda

Berdasarkan matriks penentuan tingkat kerugian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi tingkat kerugian akibat multi bencana di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- Tingkat kerugian bencana konflik sosial serta epidemi dan wabah penyakit adalah **RENDAH**. Untuk konflik sosial disebabkan indeks kerugian yang ditimbulkan dan tingkat ancaman bencananya adalah RENDAH. Sedangkan epidemi dan wabah penyakit indeks kerugian yang ditimbulkan SEDANG dan tingkat ancaman bencananya adalah RENDAH.
- Tingkat kerugian bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor adalah **SEDANG**. Hal ini disebabkan indeks kerugian yang ditimbulkan dan tingkat ancamannya adalah SEDANG.

3.3.1 Banjir

Hasil pengkajian risiko untuk bencana banjir di Kota Samarinda mengakibatkan total kerugian ekonomi dan fisik akibat bencana banjir sebesar **13,805** miliar rupiah. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari bencana banjir di Kota Samarinda seluas **3.182** Ha. Pengkajian tingkat kerugian bencana banjir di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana yang menghasilkan tingkat kerugian **TINGGI**. Hal ini disebabkan indeks kerugian SEDANG dan tingkat ancaman TINGGI.

3.3.2 Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil pengkajian untuk kerugian ekonomi akibat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda sebesar **128,09** miliar rupiah. Kerusakan lingkungan dari bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda seluas **32.186** Ha. Pengkajian tingkat kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana sehingga menghasilkan tingkat kerugian **SEDANG**. Hal ini disebabkan indeks kerugian SEDANG dan tingkat ancaman SEDANG.

3.3.3 Kekeringan

Berdasarkan hasil pengkajian untuk kerugian ekonomi akibat bencana kekeringan di Kota Samarinda sebesar **4,007** miliar rupiah. Kerusakan lingkungan dari bencana kekeringan di Kota Samarinda seluas **742** Ha. Pengkajian tingkat kerugian bencana kekeringan di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana sehingga menghasilkan tingkat kerugian **SEDANG**. Hal ini disebabkan indeks kerugian SEDANG dan tingkat ancaman SEDANG.

3.3.4 Konflik Sosial

Berdasarkan hasil pengkajian untuk kerugian ekonomi dan fisik akibat bencana konflik sosial di Kota Samarinda sebesar **46,54** miliar rupiah. Pengkajian tingkat kerugian bencana konflik sosial di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana sehingga menghasilkan tingkat kerugian **RENDAH**. Hal ini disebabkan indeks kerugian RENDAH dan tingkat ancaman SEDANG.

3.3.5 Cuaca Ekstrem

Berdasarkan hasil pengkajian untuk kerugian ekonomi dan fisik akibat bencana cuaca ekstrem di Kota Samarinda sebesar **534,41** juta rupiah. Pengkajian tingkat kerugian bencana cuaca ekstrem di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana sehingga menghasilkan tingkat kerugian **SEDANG**. Hal ini disebabkan indeks kerugian SEDANG dan tingkat ancaman SEDANG.

3.3.6 Tanah Longsor

Berdasarkan hasil pengkajian untuk kerugian ekonomi dan fisik akibat bencana tanah longsor di Kota Samarinda sebesar **141,74** miliar rupiah. Kerusakan lingkungan dari bencana tanah longsor di Kota Samarinda seluas **2.648** Ha. Pengkajian tingkat kerugian bencana tanah longsor di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana sehingga menghasilkan tingkat kerugian **SEDANG**. Hal ini disebabkan indeks kerugian SEDANG dan tingkat ancaman SEDANG.

3.3.7 Epidemi dan Wabah Penyakit

Berdasarkan hasil pengkajian untuk kerugian ekonomi dan fisik akibat bencana epidemi dan wabah penyakit di Kota Samarinda sebesar **1,07** miliar rupiah. Pengkajian tingkat kerugian bencana epidemi dan wabah penyakit di Kota Samarinda dilakukan berdasarkan dokumen kajian risiko bencana sehingga menghasilkan tingkat kerugian **RENDAH**. Hal ini disebabkan indeks kerugian SEDANG dan tingkat ancaman RENDAH.

3.4 TINGKAT KAPASITAS

Dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana tingkat kapasitas/kemampuan merupakan bagian terpenting yang harus ditingkatkan guna meminimalisir korban. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara penetapan kebijakan, peningkatan kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, dilakukan pengkajian dalam penilaian kemampuan yang dimiliki sumberdaya perorangan, rumah tangga, peran serta masyarakat dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari sebuah bahaya bencana dengan kajian tingkat kapasitas.

Kajian indeks kapasitas ini diukur pada berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan daerah. Untuk mengukur tingkat kapasitas daerah diperoleh berdasarkan penggabungan antara indeks kapasitas daerah dengan tingkat ancaman bencana yang berpotensi terjadi. Tingkat kapasitas Kota Samarinda dapat digambarkan pada Peta Kapasitas untuk setiap jenis bencana di Kota Samarinda.

Peta kapasitas daerah untuk setiap bencana di Kota Samarinda dapat dilihat pada **Lampiran 1 Peta Risiko Bencana (halaman Peta Kapasitas)**, sedangkan Tingkat kapasitas Kota Samarinda terhadap bencana dapat dilihat pada **Gambar 12**.

TINGKAT KAPASITAS		INDEKS KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT ANCAMAN	RENDAH			EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT;
	SEDANG			CUACA EKSTRIM; BANJIR; KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; KEKERINGAN; KONFLIK SOSIAL; TANAH LONGSOR;
	TINGGI			

	TINGKAT KAPASITAS BENCANA TINGGI
	TINGKAT KAPASITAS BENCANA SEDANG
	TINGKAT KAPASITAS BENCANA RENDAH

Gambar 12. Matriks Penentuan Tingkat Kapasitas Daerah di Kota Samarinda

Dari **Gambar 12** di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kapasitas Kota Samarinda terhadap bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, konflik sosial dan cuaca ekstrim adalah **RENDAH**. Sedangkan tingkat kapasitas Kota Samarinda dalam menghadapi bencana epidemi dan wabah penyakit adalah **SEDANG**.

3.4.1 Prioritas dan Indikator Penghitungan Indeks Kapasitas Daerah

Untuk penghitungan indeks kapasitas dilakukan dengan pengkajian terhadap komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan.

a. Komponen Ketahanan Daerah

Pengkajian komponen ketahanan daerah dilakukan dengan menggunakan HFA yang merupakan hasil kesepakatan yang disepakati oleh lebih dari 160 negara di dunia terdiri dari 5 prioritas program pengurangan risiko bencana. Pencapaian prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan 22 indikator pencapaian. Prioritas program pengurangan risiko bencana HFA dan indikator pencapaiannya adalah :

- 1) **Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya**, dengan indikator pencapaian:

- a) Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggung jawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan;
- b) Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan;
- c) Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumberdaya pada tingkat lokal;
- d) Berfungsinya forum/Jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana.

2) Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini, dengan indikator pencapaian:

- a) Tersedianya kajian risiko bencana daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah;
- b) Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama;
- c) Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat;
- d) Kajian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko.

3) Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat, dengan indikator pencapaian:

- a) Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dan seterusnya);
- b) Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan;
- c) Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisa manfaat-biaya (*cost benefit analysis*) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset;

- d) Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.

4) Mengurangi faktor-faktor risiko dasar, dengan indikator pencapaian:

- a) Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumberdaya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- b) Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya;
- c) Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi;
- d) Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (*enforcement of building codes*);
- e) Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana;
- f) Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.

5) Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat, dengan indikator pencapaian:

- a) Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya;
- b) Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana;
- c) Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pascabencana;

- d) Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pascabencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat.

Masing-masing indikator mempunyai indeks sesuai dengan kondisi daerah. Indeks indikator ini akan menentukan indeks prioritas dan selanjutnya dapat ditentukan tingkat ketahanan daerah. Tingkat ketahanan daerah 1 – 5 mempunyai arti masing-masing level sebagai berikut:

- **Level 5** Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.
- **Level 4** Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.
- **Level 3** Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
- **Level 2** Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.
- **Level 1** Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.

b. Komponen Kesiapsiagaan Daerah

Secara umum tujuan pengkajian komponen kesiapsiagaan daerah merupakan kunci penilaian tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana. Tujuan khusus pengkajian komponen kesiapsiagaan daerah adalah sebagai salah satu komponen yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, menurunkan kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu, sebagai acuan bagi masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana.

Kajian kesiapsiagaan dilaksanakan berdasarkan lima parameter yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang Penanggulangan Bencana (PB) merupakan pemahaman tentang bencana alam, pemahaman tentang kerentanan lingkungan, dan pemahaman tentang kerentanan bangunan fisik dan fasilitas-fasilitas penting untuk keadaan darurat bencana.
- 2) Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana (KKB), pengelola bencana, rencana aksi untuk tanggap darurat, pendidikan, panduan-panduan yang relevan, serta peraturan-peraturan yang relevan, seperti peraturan desa dan surat keputusan.
- 3) Rencana Tanggap Darurat (RTD), organisasi pengelola, rencana evakuasi, rencana pertolongan korban, rencana kebutuhan dasar, latihan/simulasi.
- 4) Peringatan Dini Bencana (PDB), sistem peringatan dini yang ada, tanda peringatan alam, tanda peringatan bencana berbasis teknologi.
- 5) Mobilisasi Sumberdaya (MS), sumberdaya manusia, pendanaan dan logistik, jaringan sosial, peralatan dan perlengkapan.

Parameter kesiapsiagaan ini akan menentukan indeks prioritas dan selanjutnya dapat ditentukan tingkat kesiapsiagaan masyarakat. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dikelompokkan menjadi tiga tingkat indikator. Tingkat indikator kesiapsiagaan masyarakat daerah dikatakan TINGGI apabila memiliki nilai indeks antara 80 – 100, SEDANG apabila memiliki nilai indeks antara 60 – 79, dan RENDAH apabila memiliki nilai indeks kecil dari 60 dalam pencapaian upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

3.4.2 Hasil Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah

Indeks kapasitas daerah merupakan perangkat pengkajian yang digunakan untuk membandingkan tingkat kapasitas yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Untuk mengetahui hasil perhitungan indeks tingkat kapasitas daerah akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Komponen Ketahanan Daerah

Dari hasil pemetaan komponen ketahanan daerah melalui analisa kesepakatan bersama yang dilakukan saat dilaksanakannya *Focal Group Discussion* (FGD) dari perwakilan instansi terkait di Kota Samarinda. Hasil analisa komponen ketahanan daerah terlihat bahwa level ketahanan Kota Samarinda dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi adalah pada **Level 2**.

Hasil kajian komponen ketahanan daerah untuk Kota Samarinda seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Hasil Kajian Komponen Ketahanan Daerah Kota Samarinda Berdasarkan HFA

NO	PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	46,25	2
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	37,5	2
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan disemua tingkat	45	2
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	43,75	2
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	25	1
TOTAL NILAI PRIORITAS		39,5	
INDEKS KETAHANAN DAERAH			2

Secara umum, dari nilai indeks ketahanan daerah pada **Tabel 5** diatas dapat diartikan bahwa daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana. Dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan yang sistematis.

b. Komponen Kesiapsiagaan Daerah

Berdasarkan hasil pemetaan kajian komponen kesiapsiagaan, terlihat bahwa level kesiapsiagaan di Kota Samarinda dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi berada pada level **RENDAH**, seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Hasil Kajian Kesiapsiagaan Kota Samarinda

KESIAPSIAGAAN	Indeks PB	Indeks KKB	Indeks RTD	Indeks PDB	Indeks MS	Total Index	LEVEL
RUMAH TANGGA	17,88	3,59	5,22	6,43	6,31	39,43	RENDAH
KOMUNITAS SEKOLAH	13,67	3,93	2,87	1,08	0,62	22,16	RENDAH
KOTA SAMARINDA	16,19	3,73	4,28	4,29	4,03	32,52	RENDAH

Secara umum **Tabel 6** menjelaskan bahwa rata-rata indeks kesiapsiagaan Kota Samarinda adalah **RENDAH** karena nilai indeks dari kesiapsiagaan yang dimiliki

masyarakat dalam pencapaian upaya pengurangan risiko bencana memiliki skala kecil dari 60.

Berdasarkan pengkajian komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan, maka didapatkan indeks kapasitas Kota Samarinda yang dapat dilihat pada **Gambar 13**.

INDEKS KAPASITAS		KOMPONEN KETAHANAN		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
KOMPONEN KESIAPSIAGAAN	TINGGI			
	SEDANG			
	RENDAH			INDEKS KAPASITAS
		INDEKS KAPASITAS BENCANA TINGGI		
		INDEKS KAPASITAS BENCANA SEDANG		
		INDEKS KAPASITAS BENCANA RENDAH		

Gambar 13. Matriks Penentuan Indeks Kapasitas Daerah di Kota Samarinda

Berdasarkan gambar matriks indeks kapasitas diatas disimpulkan bahwa indeks kapasitas Kota Samarinda adalah **RENDAH**. Kesimpulan ini didapatkan dari penggabungan kajian komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan daerah.

3.4.3 Analisa Indeks Kapasitas Kota Samarinda

Analisa indeks kapasitas daerah Kota Samarinda dalam mengurangi risiko bencana dapat diklasifikasikan berdasarkan kebijakan prioritas HFA dan analisa kebijakan kesiapsiagaan. Berikut dijelaskan lebih lanjut tentang analisa indeks kapasitas daerah berdasarkan dua kajian komponen tersebut:

a. Analisa Berdasarkan Komponen Ketahanan Daerah

- 1) Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya.

Perubahan paradigma internasional dan nasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ke arah yang lebih terfokus pada fase sebelum terjadi bencana. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan upaya-upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana meskipun belum secara menyeluruh.

Praktek-praktek pengurangan risiko bencana telah mulai dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat sehingga komitmen dan kemandirian masyarakat perlahan mulai terbentuk. Komitmen dan kemandirian ini perlu dijaga, diperkuat, dijamin dan diatur melalui sebuah aturan daerah khususnya tentang pembagian mekanisme, peran dan tanggung jawab.

Peran komunitas terhadap pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan berkelanjutan telah dilakukan melalui diskusi-diskusi formal maupun informal antar pelaku penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Proses diskusi yang telah berjalan ini perlu ditindaklanjuti menjadi sebuah forum resmi yang diakui oleh pemerintah. Forum ini bisa menjadi mitra kerja strategis pemerintah dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Forum ini diharapkan dapat mempercepat upaya-upaya pengurangan risiko bencana secara menyeluruh di Kota Samarinda.

2) Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.

Pelaksanaan kajian risiko bencana membutuhkan data yang akurat. Pemerintah Kota Samarinda perlu membangun sistem yang kuat untuk mengarsipkan dan menyebarkan data-data kebencanaan terkait proses analisa risiko. Proses pengarsipan dan penyediaan data-data kebencanaan telah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui jajaran institusinya. Namun hal ini masih perlu diperkuat dengan membangun sebuah sistem informasi, diseminasi dan publikasi kebencanaan sehingga memungkinkan untuk diakses oleh komunitas di dalam daerah maupun komunitas di luar daerah. Sistem informasi kebencanaan yang dibangun ini sebaiknya juga terintegrasi dan tersinkronisasi dengan sistem informasi kebencanaan yang ada di tingkat provinsi maupun nasional.

Disamping itu untuk daerah-daerah yang berada di wilayah batas administrasi perlu pendekatan dan penanganan dengan strategi yang berbeda. Pembangunan kesepahaman yang baik dengan daerah tetangga perlu dilakukan agar bisa ditetapkan strategi bersama terhadap penyelenggaraan

penanggulangan bencana di daerah tapal batas. Proses pembangunan kesepahaman bisa dilakukan dengan melaksanakan kajian risiko bencana bersama dengan memperhitungkan aspek risiko lintas batas. Hasil kajian risiko bencana ini bisa dimanfaatkan bersama-sama untuk melahirkan sebuah *grand design* penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas batas.

3) Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat

Pembangunan kapasitas dan budaya aman di suatu daerah amat bergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penyajian data terapan yang aplikatif melalui sebuah sistem informasi yang efektif sehingga selalu dapat diakses oleh masyarakat penting untuk dilakukan.

Pembangunan budaya aman bencana bisa dilakukan melalui intervensi terhadap dunia riset dan pendidikan. Pelaksanaan riset-riset kebencanaan secara terencana dan terpadu akan memberikan alternatif-alternatif metode aplikatif dalam pengurangan risiko bencana. Pemerintah Kota Samarinda memfokuskan pelaksanaan riset kebencanaan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan biaya pemulihan setelah terjadi bencana. Metode pengurangan biaya pemulihan dilakukan berdasarkan riset-riset yang dilaksanakan oleh para ahli dan akademisi. Riset tersebut ditujukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal komunitas ahli dan akademisi semata, namun harus mampu diterapkan hingga tingkat rumah tangga.

4) Mengurangi faktor-faktor risiko dasar.

Sektor ekonomi dan produksi merupakan salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Namun sebelum mampu untuk memberikan kontribusi, sektor ini harus mampu terlebih dahulu mengembangkan budaya aman di lingkungan kerjanya. Arah kebijakan sektor produksi dan ekonomi untuk turut serta dalam pengurangan risiko bencana biasanya terbatas pada saat tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana perlu dirubah ke arah pembangunan budaya aman di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini harus mendorong kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap sektor ekonomi dan produksi sehingga masyarakat bisa memulihkan perekonomiannya secara mandiri dan bertahap pada saat setelah terjadi bencana.

Proses pemulihan setelah bencana juga harus mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan ke arah yang lebih baik. Oleh karena proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus memperhitungkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana. Hal ini dapat dimulai melalui penerapan mekanisme partisipatif yang mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam pembangunan pemulihan pasca bencana.

5) Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.

Upaya-upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana daerah perlu difokuskan kepada penyusunan rencana kontinjensi untuk seluruh bencana dengan tingkat risiko tinggi. Rencana kontinjensi yang tersusun harus tersinkronisasi dengan prosedur-prosedur penanggulangan bencana yang berlaku di Kota Samarinda. Selanjutnya rencana kontinjensi perlu diuji coba dan dievaluasi secara teratur melalui pelaksanaan latihan-latihan kesiapsiagaan dan simulasi-simulasi penanggulangan bencana di tingkat insititusi pemerintah dan masyarakat.

Proses evaluasi juga perlu dilakukan terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana yang telah berjalan. Mekanisme evaluasi perlu ditetapkan untuk menjamin tingkat ketepatan dalam mengidentifikasi temuan dan pembelajaran selama pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana. Hasil evaluasi ini akan menjadi salah satu bahan acuan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi-operasi tanggap darurat bencana selanjutnya di Kota Samarinda.

b. Analisa Berdasarkan Komponen Kesiapsiagaan Daerah.

1) Pengetahuan Bencana

Berdasarkan hasil pengkajian komponen kesiapsiagaan daerah, terlihat bahwa pengetahuan terhadap bencana komunitas masyarakat dan komunitas sekolah masih rendah. Dari hasil perhitungan indeks terlihat komunitas sekolah memiliki nilai indeks pengetahuan bencana sebesar 13,67. Nilai ini lebih rendah dari komunitas masyarakat dengan nilai indeks 17,88. Untuk analisa di tingkat pemerintah Kota Samarinda memiliki nilai indeks pengetahuan sebesar 16,19 dalam artian masih rendah.

Dari hasil penilaian tersebut maka perlu meningkatkan pengetahuan seluruh lapisan masyarakat dan komunitas sekolah terhadap bencana yang berpotensi terjadi di Kota Samarinda. Peningkatan pengetahuan ini dapat dilaksanakan melalui penyebaran informasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat.

Selain itu dapat juga dilakukan melalui media masa maupun papan-papan pengumuman yang ada di Kota Samarinda. Untuk komunitas sekolah dapat melakukan integrasi pengetahuan kebencanaan kepada mata pelajaran yang relevan.

2) Kebijakan Kesiapsiagaan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai indeks 3,59 untuk komunitas masyarakat dan 3,93 untuk komunitas sekolah dalam artian masih rendah. Hal ini dikarenakan belum adanya rencana-rencana kesiapsiagaan yang disusun secara partisipatif baik oleh komunitas masyarakat maupun komunitas sekolah. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat dan sekolah dalam menyusun rencana aksi kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana secara partisipatif. Upaya ini secara tidak langsung dapat menunjang upaya pengurangan risiko bencana terutama berkaitan dengan kebijakan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda.

3) Rencana Tanggap Darurat

Terkait dengan rencana tanggap darurat di Kota Samarinda perlu ditingkatkan dengan menggalang partisipasi komunitas masyarakat dan komunitas sekolah dalam upaya penanganan darurat bencana. Hal ini berdasarkan pengkajian untuk nilai indeks rencana tanggap darurat baik komunitas masyarakat (5,22) dan komunitas sekolah (2,87) masih rendah.

Berbagai upaya dapat dilakukan pemerintah seperti membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan memberikan pelatihan terkait upaya penanganan darurat bencana. Upaya ini dapat berjalan baik dengan adanya peran aktif masyarakat yang dapat diberdayakan untuk efektifitas upaya penanganan darurat bencana. Selain itu, pemerintah perlu mendorong masyarakat dalam menyusun rencana evakuasi dan rencana pemenuhan kebutuhan dasar secara partisipatif.

4) Peringatan Dini Bencana

Berdasarkan hasil pengkajian komponen kesiapsiagaan, terlihat bahwa indeks peringatan dini di komunitas masyarakat dan komunitas sekolah masih rendah. Dalam artian belum memiliki dan mengetahui secara menyeluruh tentang sistem peringatan dini bencana, baik secara kearifan lokal maupun secara modern. Maka pemerintah perlu mensosialisasikan sistem peringatan dini yang ada, baik yang akan dikembangkan maupun kearifan lokal yang telah ada di

Kota Samarinda. Selain itu, pemerintah perlu mendorong masyarakat dalam menyusun sistem peringatan dini bencana sesuai dengan kearifan lokal yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui tanda-tanda terjadinya bencana.

5) Mobilisasi Sumberdaya

Berdasarkan pengkajian terkait nilai indeks untuk mobilisasi sumberdaya masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda perlu meningkatkan mobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana karena berada pada level rendah. Berbagai upaya dapat dilakukan dalam mendorong kemampuan masyarakat dan sekolah dalam memobilisasi sumberdaya. Namun pemerintah perlu mengalokasikan anggaran maupun peralatan dan perlengkapan untuk penanganan darurat bencana. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk memobilisasi seluruh masyarakat yang berada pada kawasan terancam pada saat terjadi bencana.

3.4.3 Kebijakan Prioritas Penanggulangan Bencana

Kebijakan prioritas penanggulangan bencana Kota Samarinda berdasarkan kajian kapasitas seperti yang telah diuraikan untuk 5 prioritas HFA, maka diperoleh kebijakan prioritas penanggulangan bencana Kota Samarinda sebagai berikut:

- a. Menjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumberdaya pada tingkat lokal.
- b. Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana.
- c. Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama.
- d. Memperkuat dokumen kajian risiko daerah, mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko.
- e. Menyediakan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst).
- f. Menerapkan metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisa manfaat-biaya (*cost benefit analysis*) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset.
- g. Mewujudkan rencana dan kebijakan bidang ekonomi dan produksi untuk mengurangi kerentanan perekonomian masyarakat.

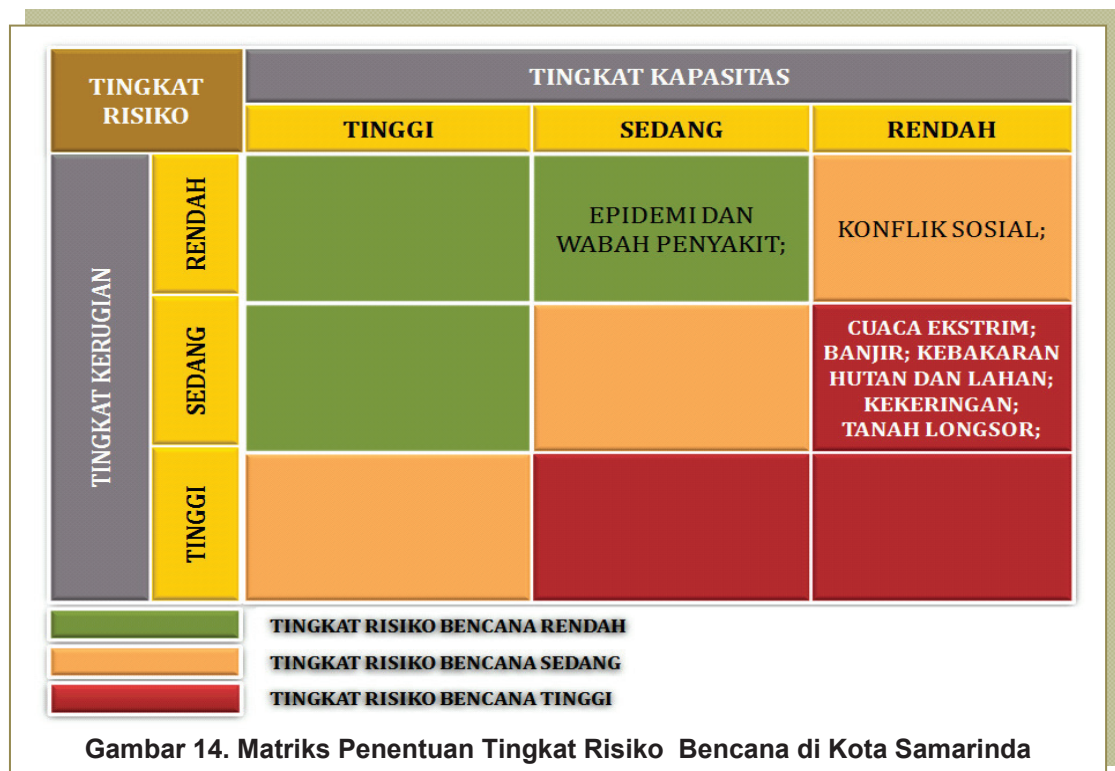
- h. Mengintegrasikan langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan kedalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana.
- i. Menyediakan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap penukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat.
- j. Menyusun rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana.

3.5 TINGKAT RISIKO BENCANA

Tingkat risiko bencana kota samarinda didapat dari hasil penggabungan tingkat ancaman, tingkat kerugian serta tingkat kapasitas untuk setiap jenis bencana di Kota Samarinda. kesimpulan tingkat risiko bencana di Kota Samarinda seperti yang terlihat pada **Tabel 7** sedangkan penentuan tingkat risiko dapat dilihat pada **gambar 14**

Tabel 7. Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda

NO	NAMA BENCANA	TINGKAT RISIKO
1	BANJIR	TINGGI
2	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI
3	KEKERINGAN	TINGGI
4	KONFLIK SOSIAL	SEDANG
5	CUACA EKSTRIM	TINGGI
6	TANAH LONGSOR	TINGGI
7	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	RENDAH



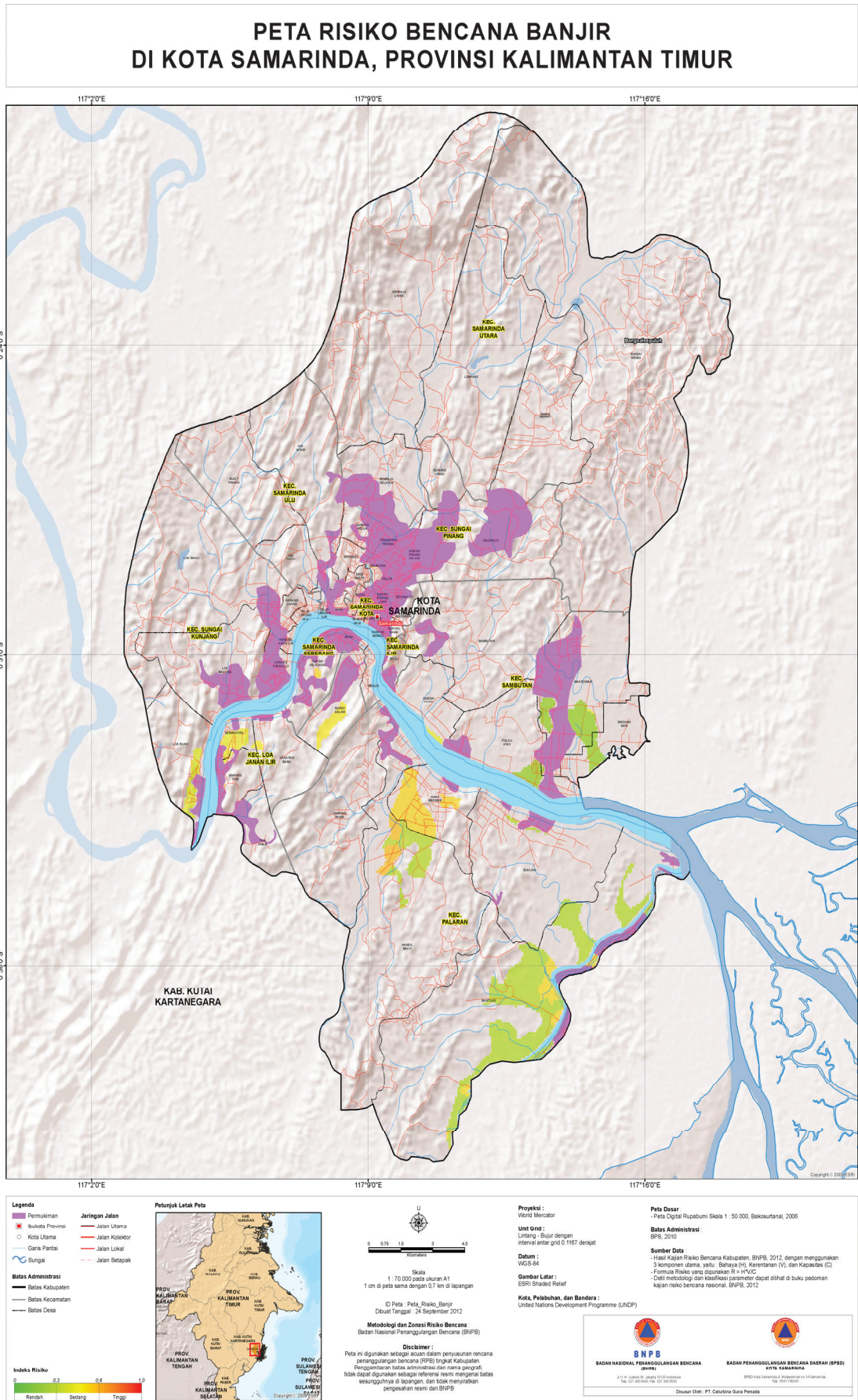
Berdasarkan **Tabel 7** dan **Gambar 14** di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko **TINGGI** di Kota Samarinda berpotensi terjadi adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor, sedangkan untuk bencana konflik sosial memiliki tingkat risiko **SEDANG** serta epidemi dan wabah penyakit memiliki tingkat risiko **RENDAH**.

3.5.1 Peta Risiko Bencana

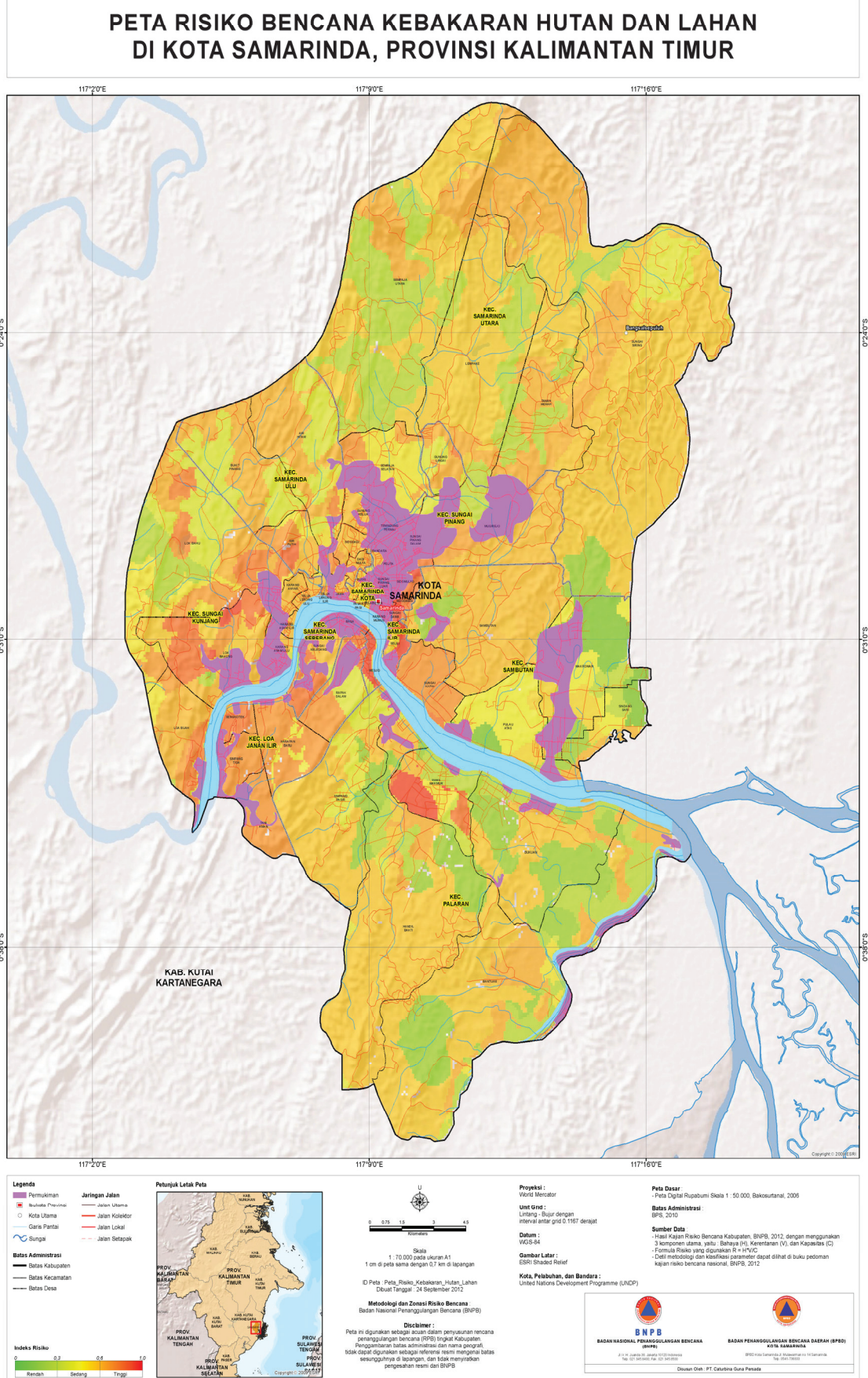
Peta risiko bencana disusun untuk tiap-tiap bencana yang mengancam suatu daerah. Penyusunan peta ini dengan melakukan *overlay* peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Peta risiko telah dipersiapkan berdasarkan *grid* indeks atas peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Adapun peta risiko bencana yang ada di Kota Samarinda pada **Gambar 15** sampai **Gambar 21**.

3.5.2 Peta Risiko Multi Bahaya

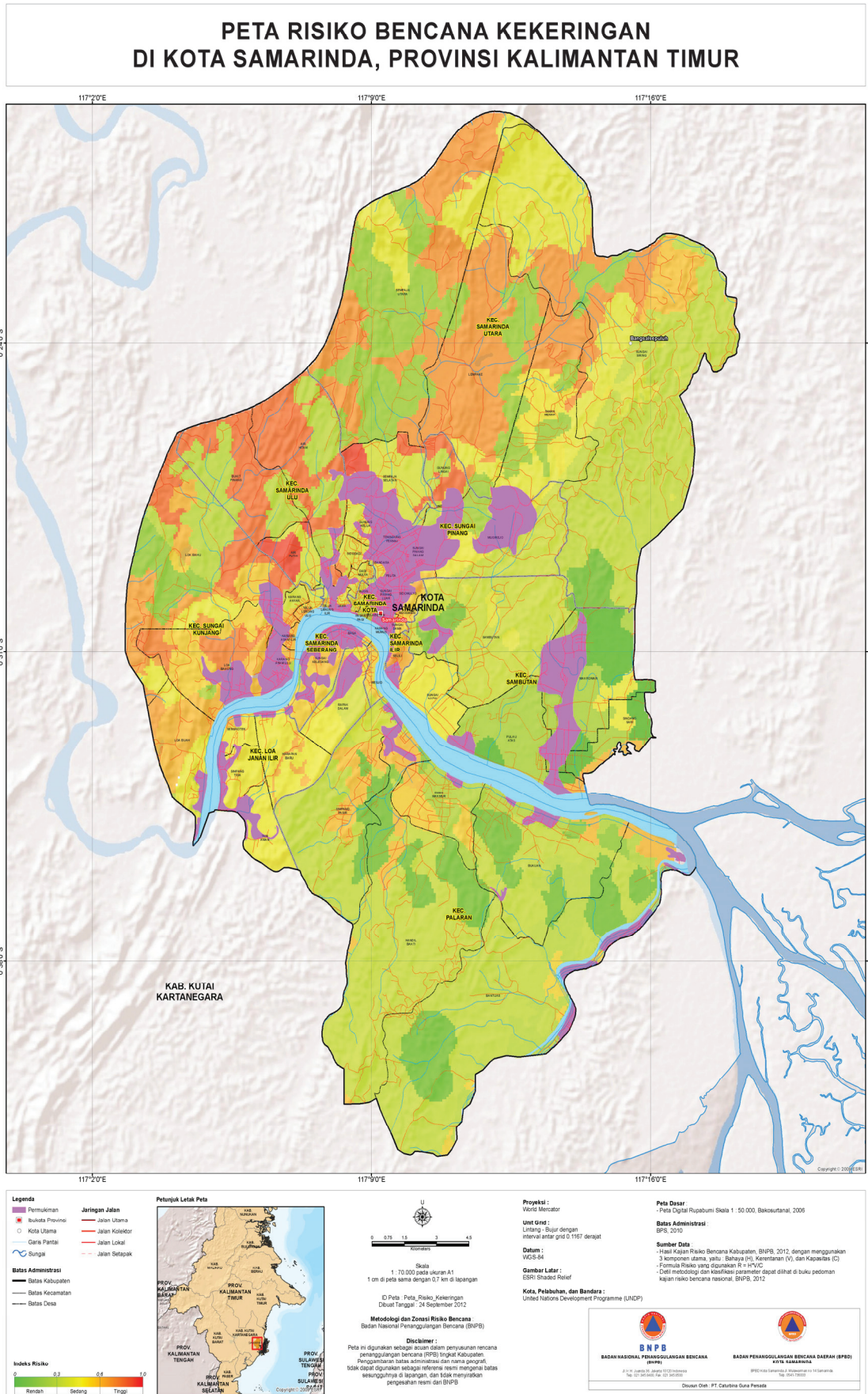
Peta risiko multi bahaya dihasilkan berdasarkan penjumlahan dari indeks-indeks risiko masing-masing ancaman berdasarkan faktor-faktor pembobotan dari masing-masing ancaman. Gambaran tentang peta risiko multi bahaya di Kota Samarinda dapat dilihat pada **Gambar 22**.



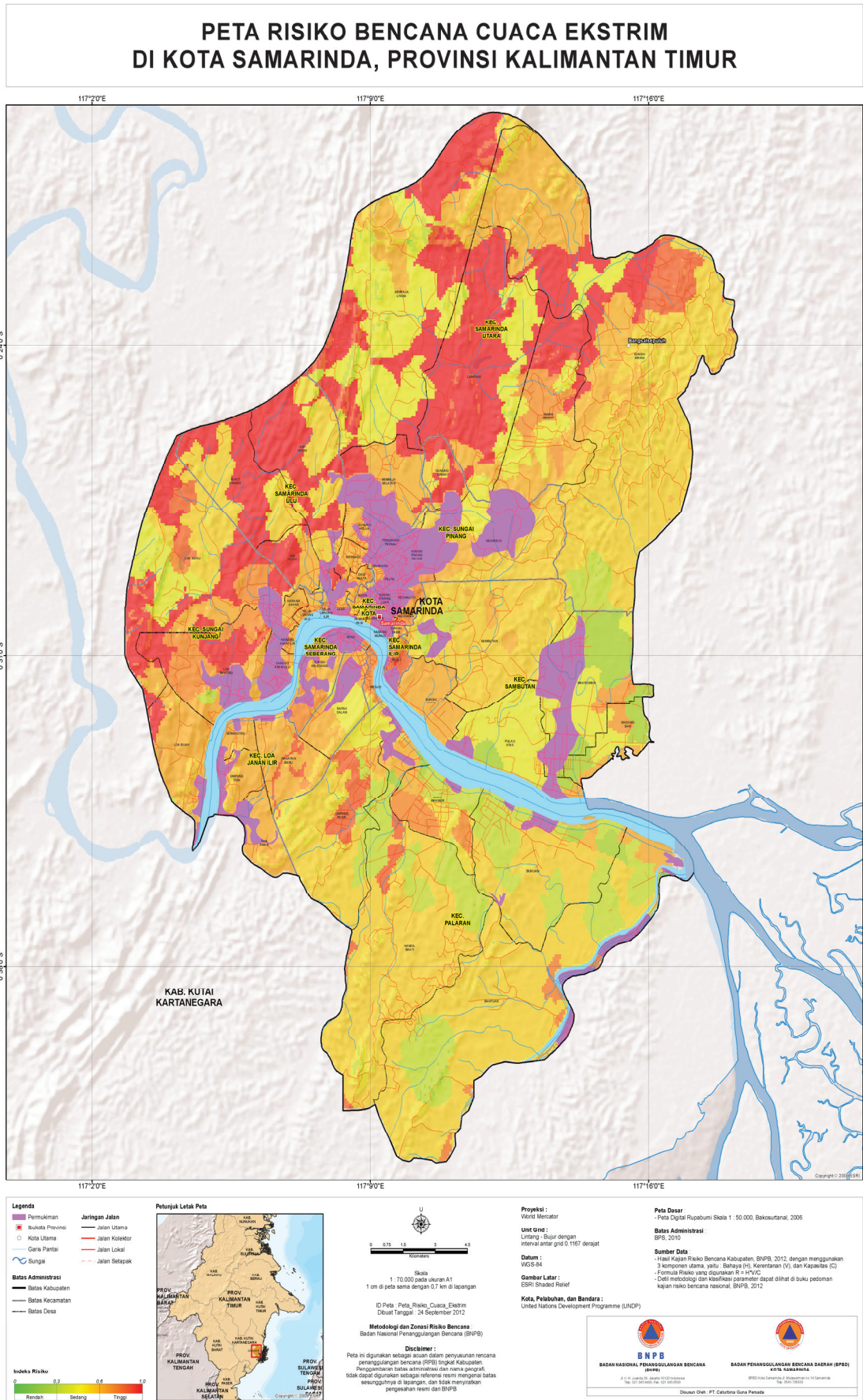
Gambar 15. Peta Risiko Banjir Kota Samarinda



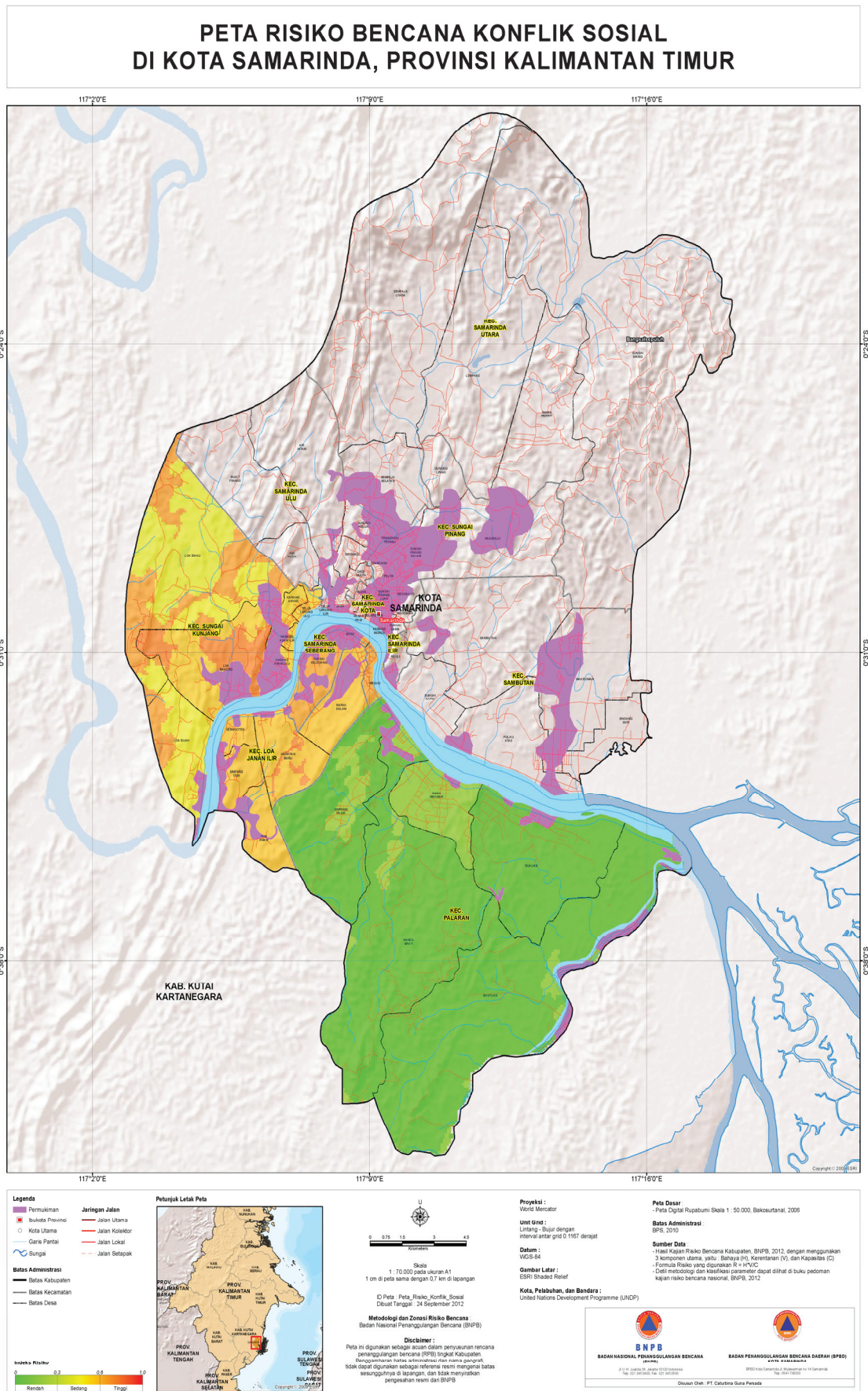
Gambar 16. Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Samarinda



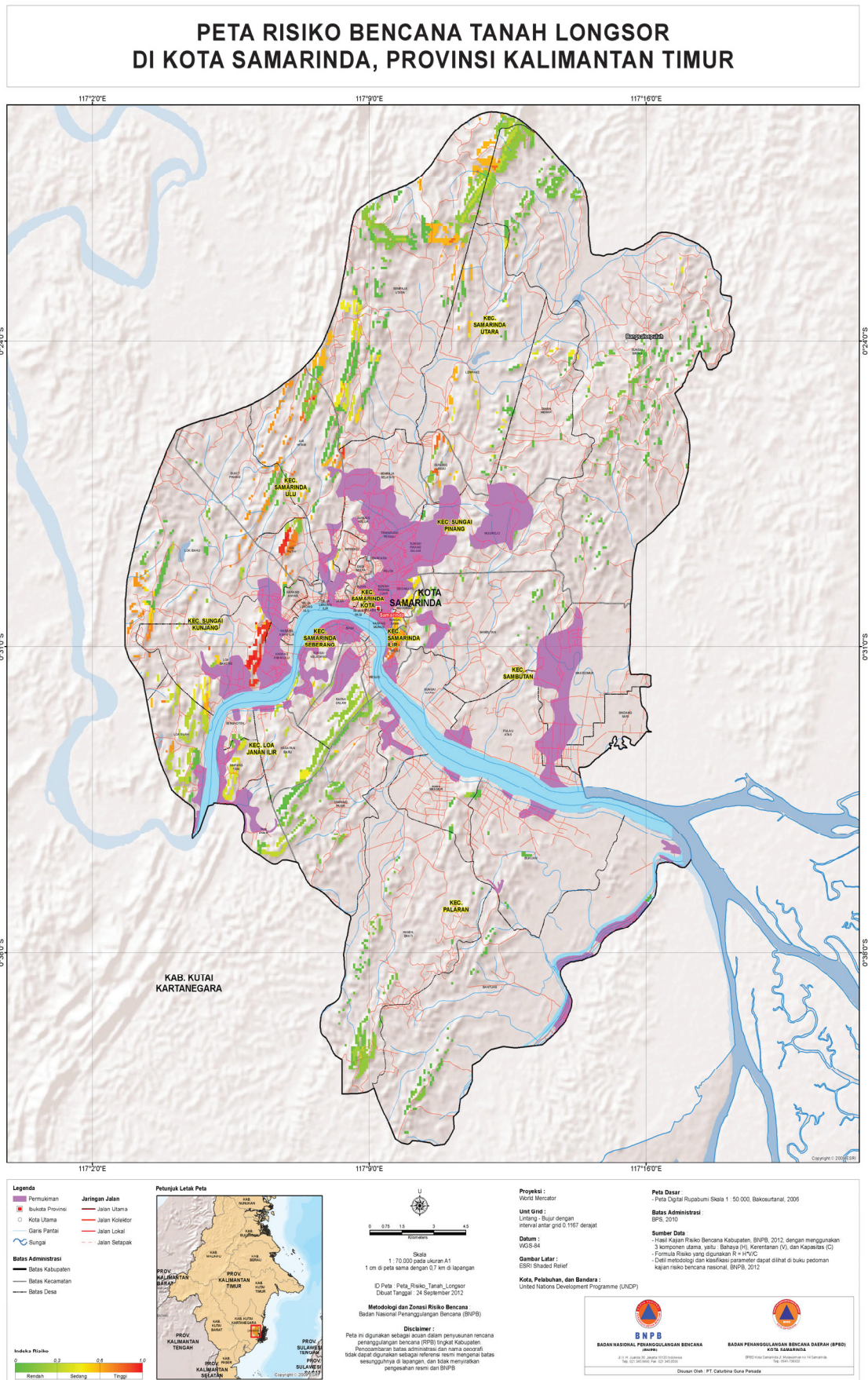
Gambar 17. Peta Risiko Kekeringan Kota Samarinda



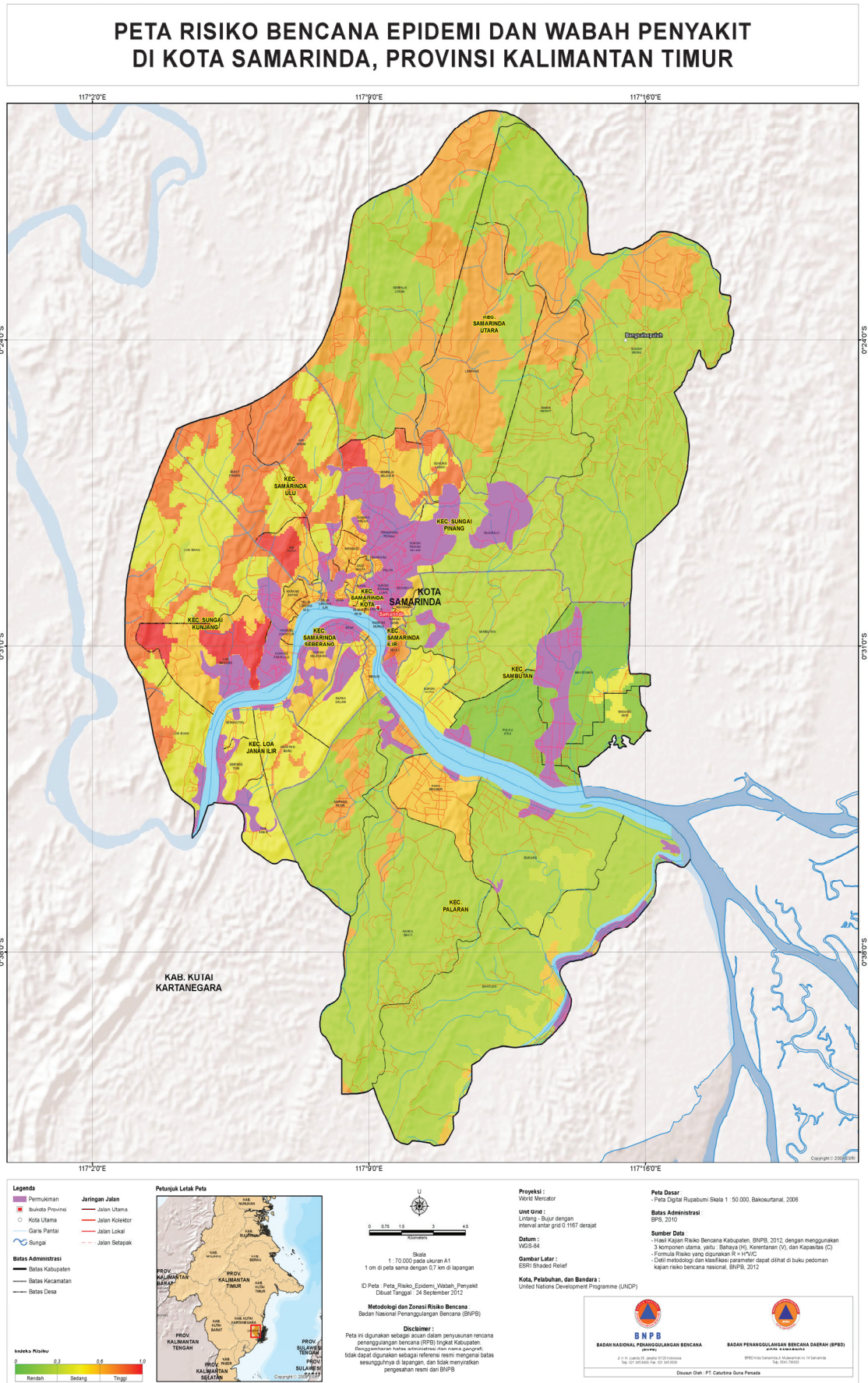
Gambar 18. Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kota Samarinda



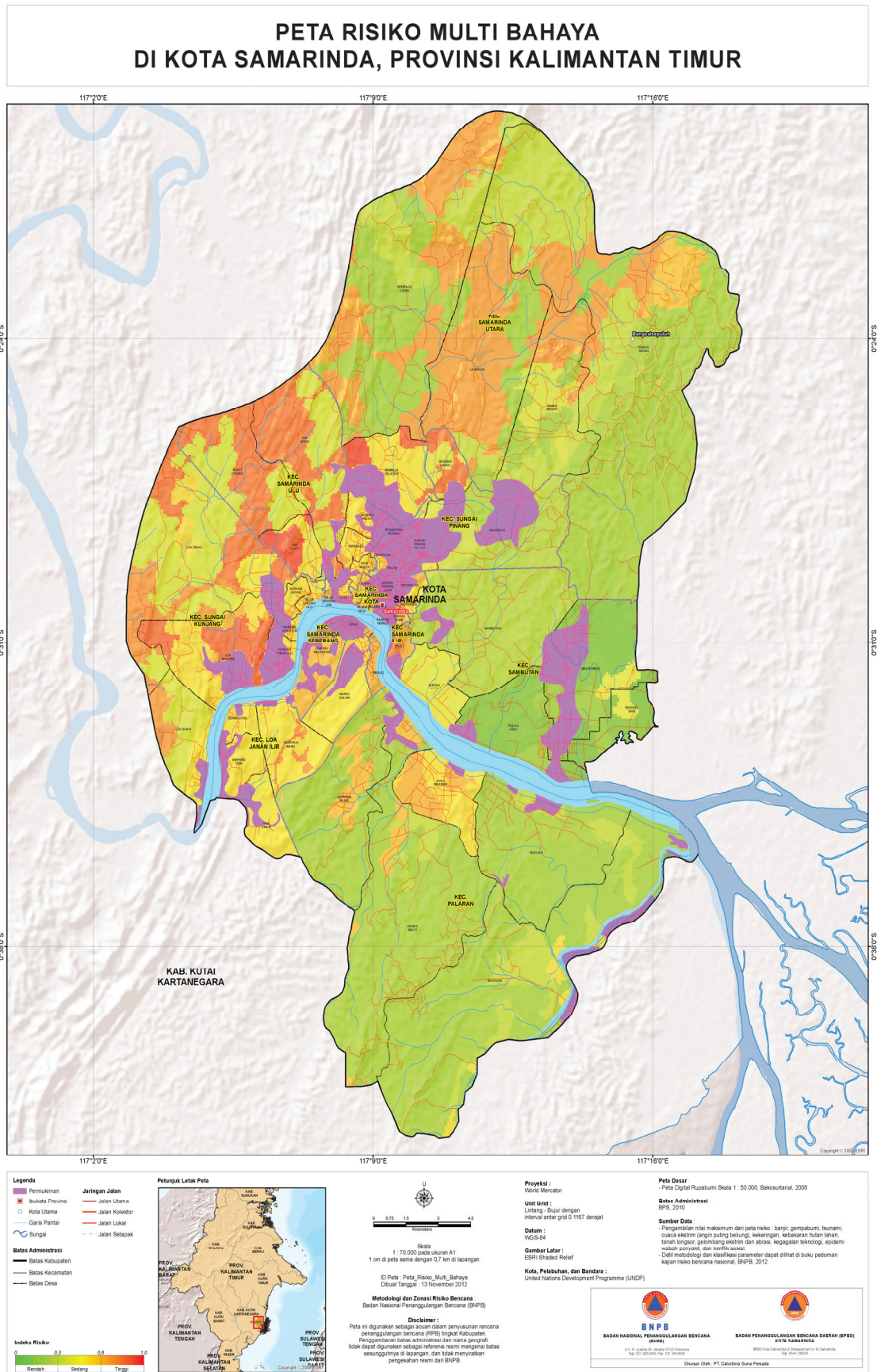
Gambar 19. Peta Risiko Konflik Sosial Kota Samarinda



Gambar 20. Peta Risiko Tanah Longsor Kota Samarinda



Gambar 21. Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit Kota Samarinda



Gambar 22. Peta Risiko Multi Bahaya Kota Samarinda

3.5 BENCANA PRIORITAS

Bencana prioritas Kota Samarinda diperlukan untuk mendapatkan prioritas utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk itu, diperlukan perangkat yang sedapat mungkin mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus-lokus yang dipilih berdasarkan standar objektif.

Oleh karena itu, perangkat tersebut disusun berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisa kecenderungan kejadian bencana di Kota Samarinda yang didapatkan pada bab sebelumnya. Bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi di Kota Samarinda dapat dilihat pada hasil analisa kecenderungan dan tingkat risiko bencana pada **Gambar 23**.

BENCANA PRIORITAS		TINGKAT RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS KECENDERUNGAN	MENURUN			
	TETAP	EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT;	KONFLIK SOSIAL;	CUACA EKSTRIM; KEKERINGAN; TANAH LONGSOR;
	MENINGKAT			BANJIR; KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN;
		BENCANA NONPRIORITAS BENCANA PRIORITAS		

Gambar 23. Matriks Penentuan Bencana Prioritas di Kota Samarinda

Berdasarkan **Gambar 23**, dapat disimpulkan bahwa jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Samarinda yakni banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, kekeringan dan tanah longsor merupakan **PRIORITAS** dalam penanggulangan bencana. Sedangkan bencana konflik sosial serta epidemi dan wabah penyakit tergolong kepada **NON PRIORITAS**. Dari hasil diskusi publik dari bencana prioritas hasil pengkajian akan lebih difokuskan kepada bencana banjir dan kebakaran yang sering terjadi di Kota Samarinda.

Bab 4

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kompleksnya permasalahan yang berada pada kawasan bencana di Kota Samarinda, maka diperlukan implementasi kebijakan pembangunan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Kota Samarinda yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Cepat dan Tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi dan Keterpaduan
4. Berdaya Guna dan Berhasil Guna
5. Transparansi dan Akuntabilitas
6. Kemitraan
7. Pemberdayaan
8. Non-Diskriminatif
9. Non-Proletisi

4.1 VISI DAN MISI

Visi penanggulangan bencana di Kota Samarinda adalah:

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG MEMILIKI
KETAHANAN TERHADAP BENCANA ”**

Misi penanggulangan Kota Samarinda adalah:

1. Menentukan kebijakan daerah dan membangun komitmen bersama dalam penanggulangan bencana di Kota Samarinda;
2. Melakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien serta penanggulangan bencana multi ancaman secara tuntas dan menyeluruh;
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana yang berpotensi di Kota Samarinda;
4. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penanggulangan bencana di Kota Samarinda.

4.2 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kebijakan penanggulangan bencana Kota Samarinda disusun atas dasar regulasi dan kelembagaan untuk setiap fase bencana. Fase bencana ini terdiri dari fase pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pengambilan kebijakan dalam setiap fase bencana tersebut maka perlu dilandasi dengan regulasi yang mengatur dan kelembagaan yang berwenang.

4.2.1 Regulasi

Regulasi terkait penanggulangan bencana di Kota Samarinda adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- h. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- i. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014;
- j. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
- k. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- l. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

4.2.2 Kelembagaan

Kelembagaan penanggulangan bencana Kota Samarinda ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. Kelembagaan yang terbentuk di Kota Samarinda ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BPBD Kota Samarinda berperan sebagai penunjang tugas Walikota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan ini mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. BPBD Kota Samarinda melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD tidak bekerja sendiri melainkan juga bekerja sama dengan TNI/POLRI serta institusi pemerintah dan non pemerintah lain dalam lingkup Kota Samarinda. Hal ini tentu dapat membantu dalam mewujudkan visi dan misi penanggulangan bencana di Kota Samarinda.

4.3 STRATEGI DAN SASARAN

Keterbatasan dana dan keterbatasan sumberdaya menyebabkan pemerintah Kota Samarinda perlu menerapkan strategi khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Strategi ini akan diterapkan dalam pembuatan dokumen rencana penanggulangan bencana daerah.

Fungsi yang melekat pada pemerintah Kota Samarinda perlu dicermati sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana. Peran teknis pemerintah Kota Samarinda terkait semua aset yang berada di daerah tersebut. Peran teknis lain yang mungkin disinkronisasikan oleh Kota Samarinda dengan Provinsi Kalimantan Timur adalah pada masa darurat bencana.

Secara umum terdapat 6 (enam) strategi penanggulangan bencana yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Strategi generik,

Berlaku untuk seluruh bencana. Strategi ini terdiri dari:

- a. Penguatan Regulasi dan Kapasitas Kelembagaan
- b. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu
- c. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
- d. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

2. Strategi untuk tiap bencana

Strategi ini terdiri dari :

- a. Perlindungan Masyarakat dari Bencana
- b. Penanganan Bencana

Strategi penanganan bencana menggunakan anggaran khusus yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tanggap darurat dan pemulihan bencana. Lima strategi lainnya mengikuti mekanisme penganggaran tahunan daerah.

Setiap strategi penanggulangan bencana diuraikan menjadi fokus sasaran untuk mewujudkan visi dan misi penanggulangan bencana Kota Samarinda.

4.3.1 Penguatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan

Penguatan aturan dan kapasitas kelembagaan merupakan strategi yang memiliki sasaran memperkuat aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dengan kapasitas yang memadai pada sistem desentralisasi kewenangan dan kemitraan dan ditunjang dengan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.

Hal ini dapat diwujudkan dengan penyusunan kerangka peraturan daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini dapat diturunkan dengan melakukan revisi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. Dengan adanya peraturan tentang peran dan keterlibatan lembaga usaha dan lembaga internasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Untuk pencapaian sasaran tersebut maka difokuskan kepada:

a. Memperkuat aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda masih membutuhkan aturan pendukung untuk memperkuat peraturan yang telah ada saat ini. Berbagai perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan penyesuaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011-2015 tentang Penanggulangan Bencana yang telah ada. Selain itu, dibutuhkan aturan tambahan yang khusus mengatur pengalokasian anggaran untuk operasi tanggap darurat bencana yang berskala kabupaten/kota seperti mekanisme pengawasan.

Namun mekanisme pengawasan perlu segera diatur dan diterapkan di Kota Samarinda. Dengan cara menyusun mekanisme pemulihan pasca bencana partisipatif dengan keterlibatan para pemangku kebijakan. Upaya lain adalah melakukan kegiatan membangun mekanisme keterlibatan multi pihak dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana dan mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini bertujuan memastikan aturan daerah tentang mekanisme keterlibatan multi pihak dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana, berkurangnya risiko bencana

turunan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan adanya dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang selaras dengan rencana penanggulangan bencana.

b. Membangun kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

Kapasitas kelembagaan perlu ditingkatkan agar upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan optimal. Kota Samarinda perlu memfokuskan pembangunan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan operasi-operasi penanganan darurat bencana, baik dalam hal kelengkapan mekanisme maupun kualitas sumberdaya manusia yang tersedia.

Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi penanganan darurat bencana sekaligus melakukan sinkronisasi dengan rencana kontinjensi maupun prosedur-prosedur yang berlaku di setiap institusi terkait penanggulangan bencana. Evaluasi dilakukan dengan memperhitungkan hasil-hasil pembelajaran dari pelaksanaan operasi-operasi penanganan darurat bencana sebelumnya.

Pada sisi kualitas sumberdaya manusia, Kota Samarinda perlu melakukan pembinaan sistematis dan terencana terhadap pelaku-pelaku teknis operasi penanganan darurat bencana di lapangan. Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan secara periodik perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh institusi terkait penanggulangan bencana di Kota Samarinda.

Selain itu dari segi sumberdaya peralatan dan perlengkapan untuk kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana perlu juga mendapat perhatian. Hal ini perlu dipenuhi untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. Sehingga dengan adanya kelengkapan peralatan dan personil yang terlatih diharapkan dapat memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah.

4.3.2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Perencanaan penanggulangan bencana terpadu merupakan strategi penanggulangan bencana dalam mewujudkan kebijakan untuk mengoptimalkan perencanaan dalam setiap fase penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana daerah. Optimalisasi tersebut dapat diwujudkan dengan pembangunan sistem data dan informasi bencana daerah.

Kota Samarinda perlu membangun sistem data dan informasi yang mudah diakses oleh publik. Salah satunya dalam bentuk website yang terhubung dengan sistem

informasi bencana di tingkat provinsi dan nasional. Sistem informasi ini dikembangkan dari sistem peringatan dini yang memadukan teknologi dan kearifan lokal daerah.

Disamping itu untuk mendorong optimalisasi operasi dan mobilisasi sumberdaya pada saat terjadi bencana perlu disusun sebuah rencana kontinjensi untuk bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan Kota Samarinda. Rencana Kontinjensi ini harus disusun dan disepakati bersama-sama antar aktor dan insititusi terkait penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menggalang kerjasama dengan daerah tetangga dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan bencana pada masa sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana.

4.3.3 Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Penelitian, pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Riset-riset kebencanaan yang dilakukan di suatu daerah akan sangat berguna untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang ramah bencana.

Untuk mencapai kualitas hasil riset-riset terkait pengurangan risiko bencana dalam meningkatkan rasio biaya investasi pra bencana dan biaya pemulihan perlu dibangun kerjasama dengan mekanisme yang jelas dan efektif antara pemerintah, akademisi dan masyarakat. Pelibatan peran seluruh sektor terkait penanggulangan bencana menjadikan produktivitas riset dapat berdaya guna dan tepat guna bagi upaya meredam jatuhnya korban jiwa dan harta benda.

Hasil-hasil riset pengurangan risiko bencana perlu dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan secara berkelanjutan perlu untuk mendorong pendayagunaan hasil riset kebencanaan secara terarah, tersistematis dan terencana.

4.3.4 Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Optimalisasi kemitraan dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan terutama dalam meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, program-program perkuatan forum PRB Kota Samarinda untuk meningkatkan sinergi dan mempercepat kemajuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan perkuatan kemitraan pemerintah dan sektor usaha dalam PRB untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu cara yang tepat.

Forum PRB Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana daerah sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mengurangi kerentanan daerah secara tepat dan efisien.

Sedangkan kemitraan pemerintah dan dunia usaha lebih diarahkan kepada peningkatan perekonomian masyarakat di zona-zona dengan risiko bencana tinggi. Hal ini diharapkan akan mengurangi kerentanan ekonomi yang ada di tingkat masyarakat sehingga masyarakat dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana.

4.3.5 Perlindungan Masyarakat dari Bencana

Upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di daerah bencana yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah melalui pencegahan dan mitigasi bencana memiliki sasaran. Selain itu juga untuk penerapan upaya-upaya khusus untuk bencana yang telah dianalisa demi pengurangan dampak bencana secara terstruktur, terukur dan menyeluruh dalam kewenangan daerah. Pencapaian sasaran tersebut difokuskan kepada:

a. Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pencegahan dilakukan dengan mencegah ancaman bencana agar tidak memberikan dampak terlalu besar kepada masyarakat atau hasil pembangunan lainnya. Pencegahan bencana dilaksanakan dengan memberikan perlakuan di sumber bencana sehingga menghilangkan ancaman sehingga kejadian bencana dapat dihilangkan. Pencegahan dilakukan pada masa sebelum terjadinya bencana sehingga bencana bisa dihindari.

Sedangkan mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Mitigasi dapat berupa struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa. Selain itu ada mitigasi nonstruktural dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menjaga kepekaan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bencana terjadi.

b. Kesiapsiagaan Bencana

Untuk mewujudkan sistem kesiapsiagaan yang efektif diperlukan kolaborasi antara kultur dan teknologi (struktur). Hal ini dikarenakan kesiapsiagaan merupakan kebijakan yang perlu diambil bila upaya pencegahan dan mitigasi belum dirasa optimal. Kunci keberhasilan kesiapsiagaan adalah keberhasilan proses evakuasi masyarakat yang didukung oleh sistem pendeteksian ancaman dan sistem peringatan dini.

4.5.6 Penanganan Bencana

Penanganan bencana merupakan kebijakan yang perlu diambil saat masa krisis, masa darurat dan masa pemulihan. Penanganan bencana dilaksanakan untuk menyelamatkan korban bencana sekaligus melakukan normalisasi secepatnya kehidupan dan perikehidupan korban bencana. Untuk menjamin capaian dari kebijakan ini, maka program difokuskan kepada tanggap darurat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.4 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah ini menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Kaidah pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Samarinda dibatasi pada keterlibatan pelaku daerah dan advokasi.

4.4.1 Keterlibatan

Bentuk komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana. Hal ini sekaligus wujud dan peran serta Kota Samarinda dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional. Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPB merupakan salah satu masukan penting bagi instansi di lingkungan Kota Samarinda dalam membuat ataupun melakukan revisi terhadap rencana strategis di Instansi Pemerintah Kota Samarinda.

Pelaksanaan rencana penanggulangan bencana Kota Samarinda merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama. Secara garis besar, peran dan fungsi SKPD dan Lembaga Pemerintah di Kota Samarinda serta instansi vertikal yang ada di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Peran Instansi Pemerintah dan Lembaga Daerah Kota Samarinda

No.	Instansi	Peranan
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	mengkoordinasikan, melaksanakan sekaligus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana Kota Samarinda
2.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	berperan memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana.
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda	mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan kebencanaan bersama dengan dinas-dinas terkait.
4.	Badan Lingkungan Hidup daerah Kota samarinda	melakukan pengawasan dan pengendalian serta penataan hukum lingkungan dalam pencegahan bencana terkait konservasi alam dan lingkungan hidup.

No.	Instansi	Peranan
5.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Daerah Kota Samarinda.	merencanakan, mendukung dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana serta mengidentifikasi kebutuhan dan melindungi kelompok rentan.
6.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda	merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan banjir. merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi bencana kebakaran lahan dan konflik sosial.
7.	Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda	merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik (pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya) untuk korban bencana
8.	Dinas Kesehatan Daerah Kota Samarinda	merencanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat-obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis/paramedis.
9.	Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Daerah Kota Samarinda	merencanakan, mengendalikan dan menyiapkan lokasi dan jalur evakuasi, kebutuhan pemulihan sarana/prasarana publik, dan pengadaan fasilitas darurat serta mengoordinasikan pengadaan perumahan untuk warga yang menjadi korban bencana serta melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana.
10.	Dinas Perhubungan Daerah Kota Samarinda	merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi, komunikasi dan informasi.
11.	Dinas Pendidikan Daerah Kota Samarinda	merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengoordinasikan pendidikan sadar bencana.
12.	Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda	merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dibidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi dan kegagalan teknologi.
13.	Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kota Samarinda	memberikan penyuluhan dan pemetaan serta penanggulangan penyakit hewan dan ternak.
14.	Dinas Bina Marga Dan Pengairan Daerah Kota Samarinda	merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan, banjir dan bencana lain terkait bidang pengairan daerah
15.	Dinas Pemuda Dan Olahraga Daerah Kota Samarinda	menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan organisasi dan aktivitas kepemudaan terkait penguatan masyarakat.
16.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Daerah Kota Samarinda	menyelenggarakan program-program kegiatan ekonomi di daerah-daerah pascabencana untuk mempercepat pemulihan.
17.	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	merencanakan penggerakan dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana.
18.	Inspektorat Kota Samarinda	mengawasi akuntabilitas pelaksanaan pembangunan fasilitas penanggulangan bencana.
19.	Satpol PP Kota Samarinda	Menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

No.	Instansi	Peranan
		perlindungan masyarakat.
20.	Rumah Sakit Umum Daerah I A. Moeis Kota Samarinda	membantu pelayanan kesiapsiagaan, mitigasi dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan.

4.4.2 Advokasi

Advokasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan sebagai aksi-aksi sosial, politik, dan kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai strategi termasuk lobby, kampanye, bangun koalisi, tekanan aksi massa serta penelitian yang ditujukan untuk mengubah kebijakan dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan menghindari bencana alam dan buatan manusia.

Dari pengertian di atas dalam mengambil kebijakan menghindari bencana alam dan non-alam, maka diperlukan tiga fase pendekatan dalam penanggulangan bencana. Intervensi terhadap kebijakan penanggulangan bencana untuk dimasukkan ke dalam penyusunan RPJMD dapat dilakukan pada masa sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana.

Fase sebelum penyusunan RPJMD upaya advokasi difokuskan untuk melakukan advokasi kepada calon kepala daerah. Advokasi diarahkan kepada mengintegrasikan program-program penanggulangan bencana dalam visi dan misi calon kepala daerah. Upaya tersebut merupakan langkah awal dalam memasukkan identifikasi kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana nantinya di Kota Samarinda.

Pada saat penyusunan RPJMD, upaya advokasi difokuskan kepada Bappeda Kota Samarinda untuk menjaga program-program Penanggulangan Bencana dapat menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD. Dengan disuarakannya kembali RPB Kota Samarinda yang telah disusun, maka diharapkan beberapa program dapat dilaksanakan segera.

Setelah penyusunan RPJMD, advokasi lebih difokuskan kepada upaya mengatasi benturan kepentingan di Kota Samarinda, serta melakukan monitoring intensif terhadap pelaksanaan RPB oleh institusi terkait penanggulangan bencana di Kota Samarinda, maka melalui rencana advokasi ini diharapkan mampu menjamin terselenggaranya kebijakan penanggulangan bencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi penanggulangan bencana Kota Samarinda.

Bab 5

KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN FOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA

Dasar bagi kebijakan dan fokus prioritas penanggulangan bencana Kota Samarinda adalah kajian risiko bencana, tingkat ketahanan daerah (berdasarkan indikator Kerangka Aksi Hyogo), pembelajaran dari daerah lain, dan masukan dari pemangku kepentingan. Kebijakan ini dijadikan sebagai landasan pengambilan tindakan dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana Kota Samarinda untuk mengurangi risiko bencana.

Agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan di tingkat provinsi dengan kebijakan yang ada, perlu dilakukan sinkronisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Sinkronisasi ini dapat diawali dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda yang disesuaikan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Timur. Penyesuaian perencanaan pusat dan provinsi dalam penanggulangan bencana Kota Samarinda diperoleh melalui 6 (enam) strategi utama penanggulangan bencana, yaitu:

1. Strategi Generik
 - a. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan.
 - b. Perencanaan penanggulangan bencana terpadu.
 - c. Penelitian, pendidikan dan pelatihan.
 - d. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat.
2. Strategi Perbencana
 - a. Perlindungan masyarakat dari bencana.
 - b. Penanganan bencana.

Kerangka dasar dalam penyusunan program penanggulangan bencana yang akan diterjemahkan sebagai kebijakan penanggulangan bencana di Kota Samarinda adalah 6 (enam) strategi utama di atas.

5.1 KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN FOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA

5.1.1 Penguatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan

Berdasarkan kebijakan penanggulangan bencana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan program dan fokus prioritas dalam strategi penguatan aturan dan kapasitas kelembagaan seperti yang terlihat pada **Tabel 9**.

Tabel 9. Kebijakan, Program, dan Fokus Prioritas Penguatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
1. Memperkuat aturan dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	1. Penyusunan kerangka peraturan daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	1. Revisi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana
	2. Penyusunan mekanisme pemulihan pasca bencana partisipatif dengan keterlibatan para pemangku kebijakan	2. Membangun mekanisme keterlibatan multi pihak dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana 3. Mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
2. Membangun kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana	3. Penerapan mekanisme evaluasi prosedur operasi darurat bencana untuk efektifitas pelaksanaan operasi	4. Sinkronisasi prosedur operasi standar penanganan darurat bencana dengan rencana kontinjensi daerah
		5. Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan secara periodik
		6. Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana daerah

5.1.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Berdasarkan kebijakan penanggulangan bencana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan program dan fokus prioritas dalam strategi perencanaan penanggulangan bencana terpadu seperti yang terlihat pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Kebijakan, Program, dan Fokus Prioritas Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
Mengoptimalkan perencanaan dalam setiap fase penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana daerah	1. Pembangunan sistem informasi bencana daerah untuk membangun perencanaan yang kuat pada setiap fase penanggulangan bencana	1. Membangun sistem data dan informasi kebencanaan daerah yang dapat diakses oleh publik
		2. Membangun sistem peringatan dini dengan memadukan teknologi dan kearifan lokal daerah

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
		3. Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
		4. Menyusun rencana kontinjensi bencana-bencana prioritas kota
	2. Optimalisasi kerjasama lintas batas dalam perencanaan pengurangan risiko bencana	5. Menyusun kajian risiko bencana lintas batas dengan daerah tetangga yang melingkupi setiap bencana utama di daerah
		6. Menyusun rencana induk mitigasi bencana daerah
		7. Menggalang kerjasama dengan daerah tetangga dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan bencana pada masa sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana

5.1.3 Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan kebijakan penanggulangan bencana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan program dan fokus prioritas dalam strategi penelitian, pendidikan dan pelatihan seperti yang terlihat pada **Tabel 11**.

Tabel 11. Kebijakan, Program, dan Fokus Prioritas Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
Memperkuat kapasitas daerah melalui penerapan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana	Pendayagunaan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana secara terstruktur	1. Memberdayakan perguruan tinggi, peneliti internal dan pegawai pemerintah untuk penyelenggaraan riset kebencanaan
		2. Mengintegrasikan hasil riset kedalam kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana untuk meningkatkan efektifitas dan optimalitas penanggulangan bencana masa sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana

5.1.4 Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan kebijakan penanggulangan bencana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan program dan fokus prioritas dalam strategi peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat seperti yang terlihat pada **Tabel 12**.

Tabel 12. Kebijakan, Program, dan Fokus Prioritas Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
Mengoptimalkan kemitraan dalam	1. Perkuatan forum PRB kota untuk meningkatkan	1. Membangun eksistensi forum PRB kota

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
penanggulangan bencana	sinergi dan mempercepat kemajuan penyelenggaraan PB di daerah	2. Peningkatan kapasitas anggota forum PRB kota
	2. Perkuatan kemitraan pemerintah dan sektor usaha dalam PRB untuk menunjang penyelenggaraan PB	3. Membangun dukungan partisipasi sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
		4. Membentuk desa tangguh di wilayah berisiko tinggi bencana

5.1.5 Perlindungan Masyarakat dari Bencana dan Penanganan Bencana

Kebijakan, program, dan fokus prioritas strategi perlindungan masyarakat dari bencana dan penanganan bencana digabung menjadi satu bagian. Hal ini disebabkan karena pada kedua strategi ini khusus membahas kebijakan, program dan fokus prioritas berdasarkan potensi bencana-bencana yang ada di Kota Samarinda.

Tabel 13. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Banjir

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana		
1. Pencegahan dan mitigasi bencana banjir	1. Pembangunan infrastruktur penghalang bencana	1. Menyediakan dukungan, melaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi dan bendungan
		2. Mengembangkan inovasi pintu air dengan teknologi sederhana dan tepat guna
		3. Pengamanan dan pelestarian sumberdaya air melalui reklamasi sungai di daerah rawan bencana banjir
	2. Penegakan peraturan pengurangan risiko bencana	4. Menetapkan standar pengelolaan sumberdaya air dan daerah aliran sungai
		5. Penerapan dan pengawasan implementasi standar pengelolaan sumberdaya air dan daerah aliran sungai
2. Kesiapsiagaan bencana banjir	3. Pembangunan budaya siaga bencana dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi risiko bencana banjir	6. Melakukan pembersihan daerah aliran sungai secara berkala dan partisipatif
		7. Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan banjir
		8. Melakukan latihan berkala kesiapsiagaan bencana banjir
	4. Pembangunan kapasitas teknis aparat pemerintah dalam penanggulangan bencana	9. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir (contoh: perahu karet, pelampung, dll)
		10. Pembangunan sistem peringatan dini banjir
		11. Penyusunan dan penetapan

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
		rencana evakuasi di zona prioritas penanggulangan bencana banjir
B. Penanganan Darurat Bencana		
1. Tanggap darurat bencana	1. Penyelenggaraan operasi darurat bencana	1. Kaji cepat bencana
		2. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
		4. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
2. Pemulihan bencana	2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi	5. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		6. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
		7. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
		8. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Tabel 14. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana		
1. Pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan	1. Pengurangan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan melalui mitigasi struktural dan non struktural	1. Membangun zonasi tanggul pengaman (<i>buffer</i>) antara kawasan hutan dan kawasan pemukiman
		2. Menerapkan aturan kriteria dan standar pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan
		3. Pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan izin pemanfaatan hasil hutan produksi dan pariwisata alam
2. Kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan	2. Pembangunan budaya siaga bencana masyarakat dan aparat pemerintah	4. Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan
		5. Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan kepada sektor swasta pengguna hutan dan pemilik HPH
		6. Melakukan simulasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan
		7. Pengadaan sarana dan

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
		prasarana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (contoh: mobil pemadam kebakaran, dll)
B. Penanganan Darurat Bencana		
1. Tanggap darurat bencana	1. Penyelenggaraan operasi darurat bencana	1. Kaji cepat bencana
		2. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
		4. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
2. Pemulihan bencana	2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi	5. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		6. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
		7. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
		8. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Tabel 15. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Kekeringan

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana		
1. Pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan	1. Pengurangan risiko bencana kekeringan melalui mitigasi struktural dan non struktural	1. Menyediakan dukungan, melaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi, waduk dan bendungan
		2. Menetapkan kawasan hutan-hutan lindung dan hutan-hutan konservasi di wilayah berisiko kekeringan
		3. Menerapkan peraturan tentang pengamanan dan pelestarian sumberdaya air
2. Kesiapsiagaan bencana kekeringan	2. Pembangunan budaya siaga bencana masyarakat dan aparat pemerintah	4. Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan kekeringan
		5. Latihan berkala penanggulangan bencana kekeringan dengan melibatkan seluruh unsur terkait penanggulangan bencana
B. Penanganan Darurat Bencana		
1. Tanggap darurat bencana	1. Penyelenggaraan operasi darurat bencana	1. Kaji cepat bencana
		2. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
		pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
		4. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
2. Pemulihan bencana	2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi	5. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		6. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
		7. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
		8. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Tabel 16. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Cuaca Ekstrem

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana		
1. pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana cuaca ekstrem	1. pencegahan dan mitigasi non struktural	1. pengembangan kebijakan inovasi teknologi untuk deteksi dini potensi bencana cuaca ekstrem
	2. pencegahan dan mitigasi struktural	2. pelaksanaan pembangunan dan perawatan shelter perlindungan dan pengungsian bencana cuaca ekstrem
	3. pembangunan sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrem pada kawasan rawan	3. pembangunan sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrem
B. Penanganan Darurat Bencana		
1. Tanggap darurat bencana	1. Penyelenggaraan operasi darurat bencana	1. Kajian cepat bencana cuaca ekstrem
		2. Pencarian, penyelamatan & evakuasi
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
		4. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
2. Pemulihan bencana	2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi	5. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		6. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi
		7. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
		8. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Tabel 17. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Tanah Longsor

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana		
1. Pencegahan dan mitigasi bencana tanah longsor	1. Penegakan aturan terkait pengurangan risiko bencana	1. Penegakan peraturan lingkungan hidup terkait tata guna lahan
		2. Alokasi dan pemindahan masyarakat yang berada di daerah rawan tanah longsor dengan tingkat risiko tinggi
	2. Pembangunan daerah penyangga dan peredam dampak bencana tanah longsor	3. Peningkatan daerah resapan air di rawan bencana longsor
		4. Pembangunan infrastruktur pengaman lereng di daerah rawan bencana tanah longsor
	3. Pengembangan teknologi pendeteksi dan pencegah bencana longsor	5. Pengembangan inovasi teknologi untuk pencegahan bencana longsor berdasarkan kajian risiko bencana
2. Kesiapsiagaan bencana tanah longsor	4. Pembangunan sistem peringatan dini bencana tanah longsor di daerah rawan	6. Membangun sistem peringatan dini bencana tanah longsor hingga tingkat desa
	5. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kesiapsiagaan bencana tanah longsor	7. Membangun sarana dan prasarana evakuasi masyarakat pada daerah rawan bencana tanah longsor
	6. Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat pada daerah rawan bencana tanah longsor	8. Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan di kawasan rawan bencana tanah longsor
B. Penanganan darurat bencana		
1. Tanggap darurat bencana	1. Penyelenggaraan operasi darurat bencana	1. Kajian cepat bencana tanah longsor
		2. Pencarian, penyelamatan & evakuasi
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
		4. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
2. Pemulihan bencana	5. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi	6. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		7. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
		8. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
		9. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Tabel 18. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Konflik Sosial

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana		
1. Pencegahan dan mitigasi bencana konflik sosial	1. Pencegahan timbulnya bencana konflik sosial di daerah	1. Penyelesaian perselisihan dalam kota
		2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
B. Penanganan Darurat Bencana		
1. Tanggap darurat bencana	1. Penyelenggaraan operasi darurat bencana	1. Kajian cepat bencana konflik sosial
		2. Pencarian, penyelamatan & evakuasi
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
		4. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
2. Pemulihan bencana	2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi	5. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		6. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi
		7. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
		8. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Tabel 19. Kebijakan, Program dan Fokus Prioritas Penanggulangan Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana		
1. Pencegahan dan mitigasi bencana epidemik dan wabah penyakit	1. Pencegahan terjadinya bencana epidemik dan wabah penyakit	1. Sosialisasi tentang pencegahan bencana epidemik dan wabah penyakit
		2. Survey berkala serta pengaturan pemberantasan penanggulangan epidemik dan wabah penyakit

KEBIJAKAN	PROGRAM	FOKUS PRIORITAS
		3. Vaksinasi kepada penduduk rentan di daerah berisiko bencana epidemi dan wabah penyakit
B. Penanganan Darurat Bencana		
1. Tanggap darurat bencana	1. Penyelenggaraan operasi tanggap darurat bencana	1. Kaji cepat bencana
		2. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi
		3. Pengisolasian korban bencana
		4. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
2. Pemulihan bencana	2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi	5. Pengkajian dampak bencana
		6. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban

5.2 PAGU INDIKATIF FOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA

Pagu indikatif merupakan pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja. Secara umum setiap penyusunan kegiatan dan program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana juga memperhatikan pagu indikatif. Spesifik pekerjaan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab SKPD terkait di Kota Samarinda dan dimasukkan ke dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Fokus prioritas memiliki indikator pencapaian yang harus dicapai oleh instansi terlibat dalam 5 tahun masa perencanaan ini.

Indikator fokus prioritas tersebut menjadi dasar pencapaian tugas bagi setiap instansi yang terlibat secara langsung dengan tujuan supaya penanggulangan bencana Kota Samarinda berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Indikator pencapaian (**Lihat pada Lampiran 2**) dapat dilihat fokus prioritas yang menjadi strategi dalam penanggulangan bencana di Kota Samarinda.

5.3 ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penghitungan anggaran pada pagu indikatif kegiatan penanggulangan bencana mengikuti sebuah strategi penganggaran yang membagi anggaran penanggulangan

bencana menjadi dua bagian. Anggaran pertama merupakan anggaran periodik yang merupakan pembebanan tahunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, sedangkan anggaran kedua adalah anggaran khusus untuk penanganan darurat dan pemulihan bencana.

Anggaran pertama dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa sebelum bencana terjadi. Anggaran ini mengikuti asumsi bahwa anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana kira-kira 1% dari total keseluruhan anggaran belanja daerah. Pada Tahun 2012, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda kira-kira sebesar **2,678 triliun rupiah**. Dengan asumsi kenaikan inflasi sebesar 10% pertahun, maka perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda pada tahun anggaran 2013 adalah sebesar **2,946 triliun rupiah** dan anggaran penanggulangan bencana pada tahun anggaran tersebut adalah sebesar **29,46 miliar rupiah**. Dengan demikian total anggaran penanggulangan bencana Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2013 - 2017 adalah sebesar **179,826 miliar rupiah**.

Hasil rasionalisasi dan rekapitulasi anggaran tersebut dapat dilihat pada **Tabel 20**.

Tabel 20. Rekapitulasi Anggaran Penanggulangan Bencana Tahun 2013 - 2017

NO	STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA	ANGGARAN (MILIAR RUPIAH)
1	Perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan	4,20
2	Perencanaan penanggulangan bencana terpadu	9,00
3	Penelitian, pendidikan, dan pelatihan	3,50
4	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat	10,00
5	Perlindungan masyarakat dari bencana	152,90
TOTAL		179,60

Anggaran kedua dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan pemulihan bencana. Anggaran ini disesuaikan dengan anggaran *on call* (siap pakai) Kota Samarinda. Bila dari hasil kajian cepat bencana diperoleh bahwa anggaran penanganan dan pemulihan bencana melebihi kemampuan anggaran siap pakai daerah. Kondisi ini juga berlaku bila akumulasi biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam satu tahun telah melebihi jumlah anggaran siap pakai, maka untuk kejadian bencana selanjutnya akan diberikan rekomendasi status darurat bencana oleh Walikota Samarinda kepada Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Bab 6

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pelaporan dan monitoring pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Pelaporan lebih kepada pendokumentasian semua laporan tentang penanggulangan bencana dengan baik, sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan program agar sesuai dengan rencana yang telah disusun.

6.1 PELAPORAN

Laporan tersebut berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun waktu rencana penanggulangan bencana. Pelaporan dilakukan agar semua hasil mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD. Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu jika diperlukan.

6.2 MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengamati perkembangan kegiatan pelaksanaan RPB Kota Samarinda perlu dilakukan monitoring. Upaya ini dilakukan dengan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaian masalah tersebut. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi. Kegiatan monitoring juga untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPB Kota Samarinda serta mendorong transparansi dan

akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas: efisiensi, efektivitas dan kemanfaatan. Efisiensi terkait derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*). Efektivitas yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan. Selain itu asas kemanfaatan merupakan kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.

Selain itu pelaksanaan pemantauan juga menilai aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan suatu rencana program/kegiatan. Monitoring pelaksanaan RPB Kota Samarinda dilaksanakan oleh pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kegiatan monitoring juga dapat melibatkan masyarakat misalnya melalui forum daerah PRB, LSM dan kelompok profesional. Keterlibatan aktif unsur luar dapat diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah.

Monitoring dapat dilaksanakan antara lain melalui kunjungan kerja ke program-program dan kegiatan pengurangan risiko bencana, rapat kerja atau pertemuan dengan pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan kendala yang ditemui, dan pengecekan laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko yang dikaji berdasarkan rencana kerja yang tercantum dalam RPB Kota Samarinda.

Upaya ini didasarkan kepada Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengatakan bahwa "Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana". Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Selain dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensinya, kinerja program pengurangan risiko bencana yang tercantum dalam RPB Kota Samarinda diukur juga berdasarkan kemanfaatan serta keberlanjutannya.

Evaluasi pelaksanaan RPB Kota Samarinda dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (*outcome*) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan

(*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya. Untuk memudahkan pencatatan maka dapat digunakan format untuk monitoring dan evaluasi yang terlihat seperti pada **tabel 21**

Tabel 21. Format Monitoring dan Evaluasi

KEGIATAN	ALOKASI	SASARAN (TARGET)	PENCAPAIAN (REALISASI)	SUMBER PENDANAAN		Keterangan (tindak lanjut)
				APBD	Lain-lain	

Selain berguna untuk memperbaiki pengelolaan program di masa yang akan datang, evaluasi juga menjamin adanya tanggung-gugat (*akuntabilitas*) dan membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumberdaya dan anggaran. Di samping membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPB Kota Samarinda, evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengkaji dampak yang ditimbulkan melalui pelaksanaan RPB Kota Samarinda. Kedua cara ini dapat saling mendukung dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan RPB Kota Samarinda.

Sebagaimana halnya monitoring, evaluasi pelaksanaan RPB Kota Samarinda juga dilaksanakan oleh pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi dapat melibatkan pihak luar, tetapi tetap di bawah koordinasi instansi pemerintah terkait.



PENUTUP

Rencana penanggulangan bencana Kota Samarinda yang disusun untuk rentang waktu 2013–2017 merupakan sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh Kota Samarinda. Pelaksanaan rencana penanggulangan bencana membutuhkan komitmen yang kuat dari pihak terkait baik secara politis maupun teknis. Strategi advokasi yang tertera dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kota Samarinda, sehingga visi dan misi penanggulangan bencana Kota Samarinda dapat terwujud dan budaya aman terhadap bencana diimplementasikan oleh masyarakat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Samarinda, perubahan lingkungan dan kemajuan mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) untuk pengurangan risiko bencana di Kota Samarinda. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 *tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 *tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana*

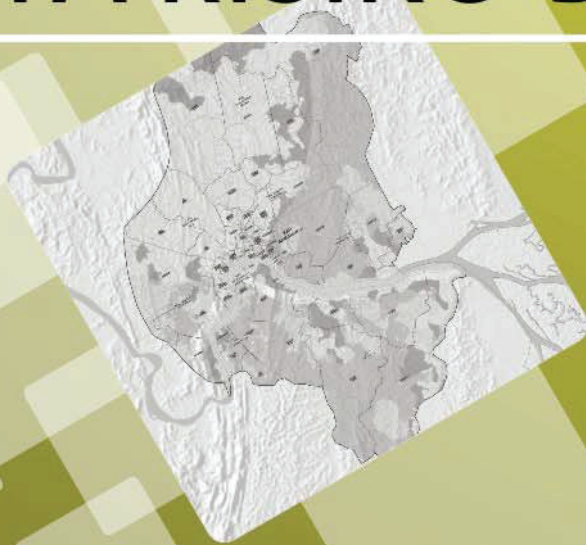
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 *tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana*

Website:

http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/simple_data.jsp

http://samarindakota.bps.go.id/ebook/2011_dda

PETA RISIKO BENCANA



KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ALBUM PETA KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Album 1: Risiko Bencana Banjir

- 1.a. Peta Bahaya Bencana Banjir
- 2.b. Peta Kerentanan Bencana Banjir
- 3.c. Peta Kapasitas Bencana Banjir
- 4.d. Peta Risiko Bencana Banjir

Album 2: Risiko Bencana Tanah Longsor

- 1.a. Peta Bahaya Bencana Tanah Longsor
- 2.b. Peta Kerentanan Bencana Tanah Longsor
- 3.c. Peta Kapasitas Bencana Tanah Longsor
- 4.d. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor

Album 3: Risiko Bencana Cuaca Ekstrim

- 1.a. Peta Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim
- 2.b. Peta Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrim
- 3.c. Peta Kapasitas Bencana Cuaca Ekstrim
- 4.d. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim

Album 4: Risiko Bencana Kekeringan

- 1.a. Peta Bahaya Bencana Kekeringan
- 2.b. Peta Kerentanan Bencana Kekeringan
- 3.c. Peta Kapasitas Bencana Kekeringan
- 4.d. Peta Risiko Bencana Kekeringan

Album 5: Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan

- 1.a. Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan
- 2.b. Peta Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan
- 3.c. Peta Kapasitas Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan
- 4.d. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan

Album 6: Risiko Bencana Pandemi Dan Wabah Penyakit

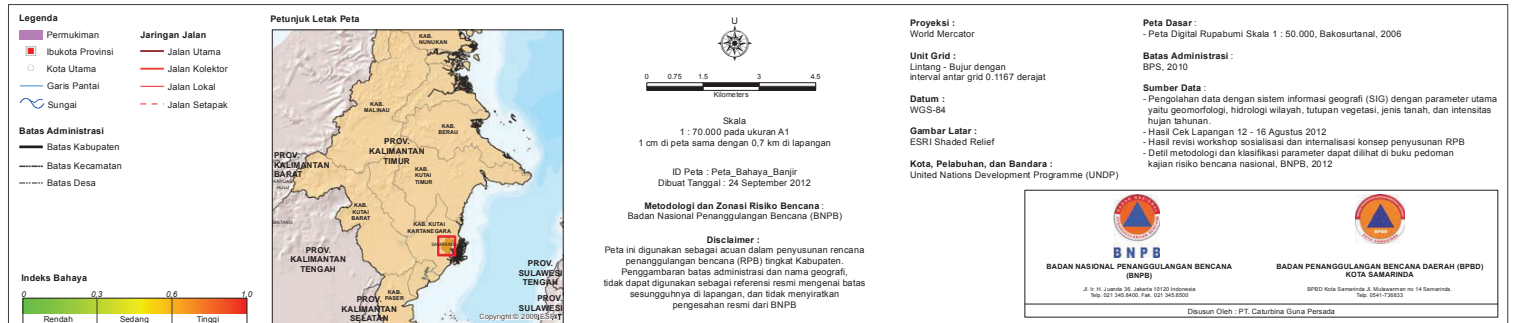
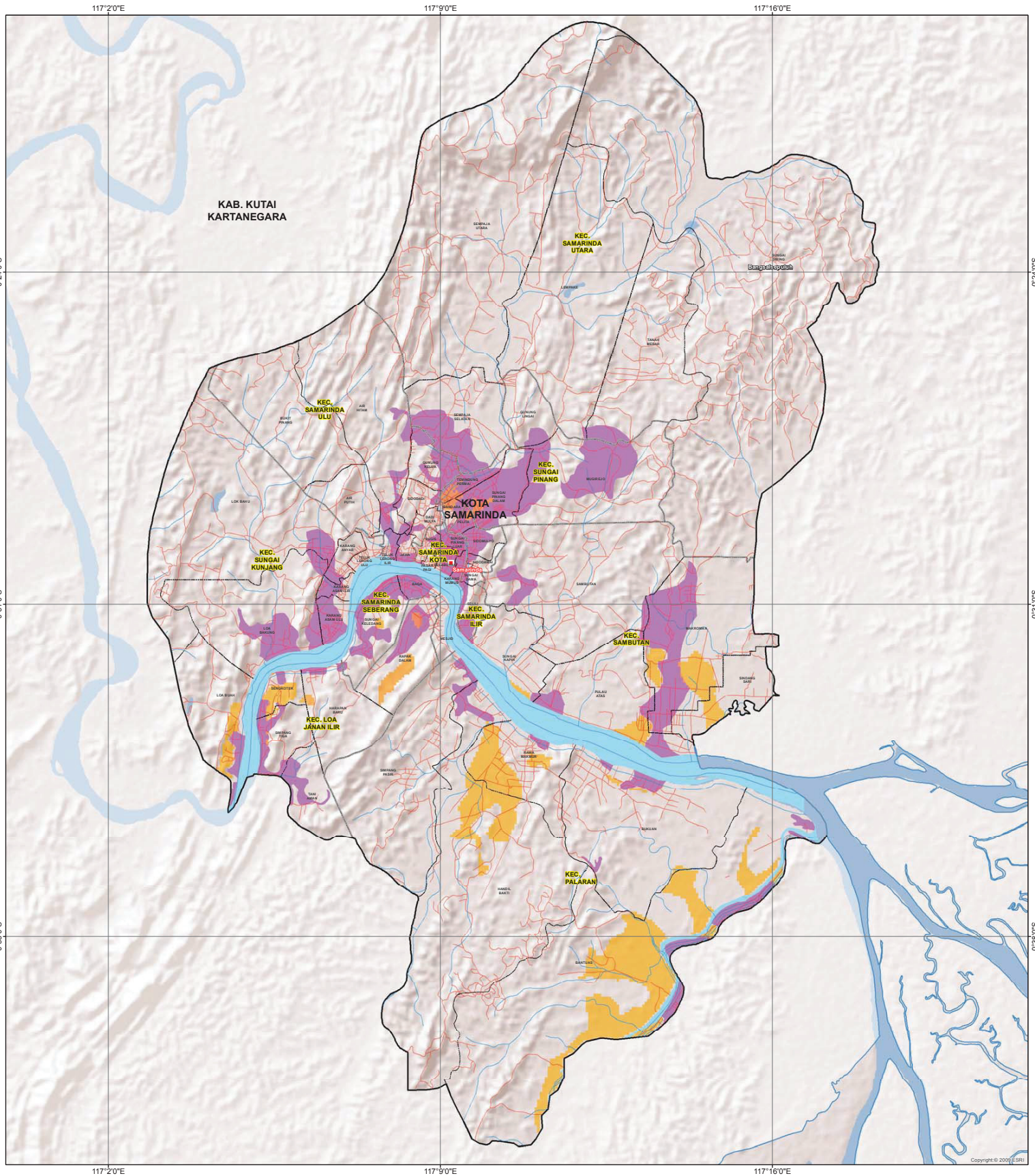
- 1.a. Peta Bahaya Bencana Pandemi Dan Wabah Penyakit
- 2.b. Peta Kerentanan Bencana Pandemi Dan Wabah Penyakit
- 3.c. Peta Kapasitas Bencana Pandemi Dan Wabah Penyakit
- 4.d. Peta Risiko Bencana Pandemi Dan Wabah Penyakit

Album 7: Risiko Bencana Konflik Sosial

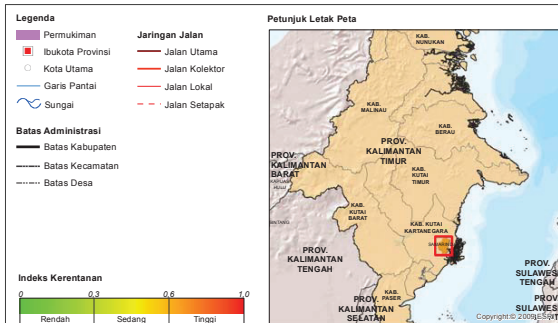
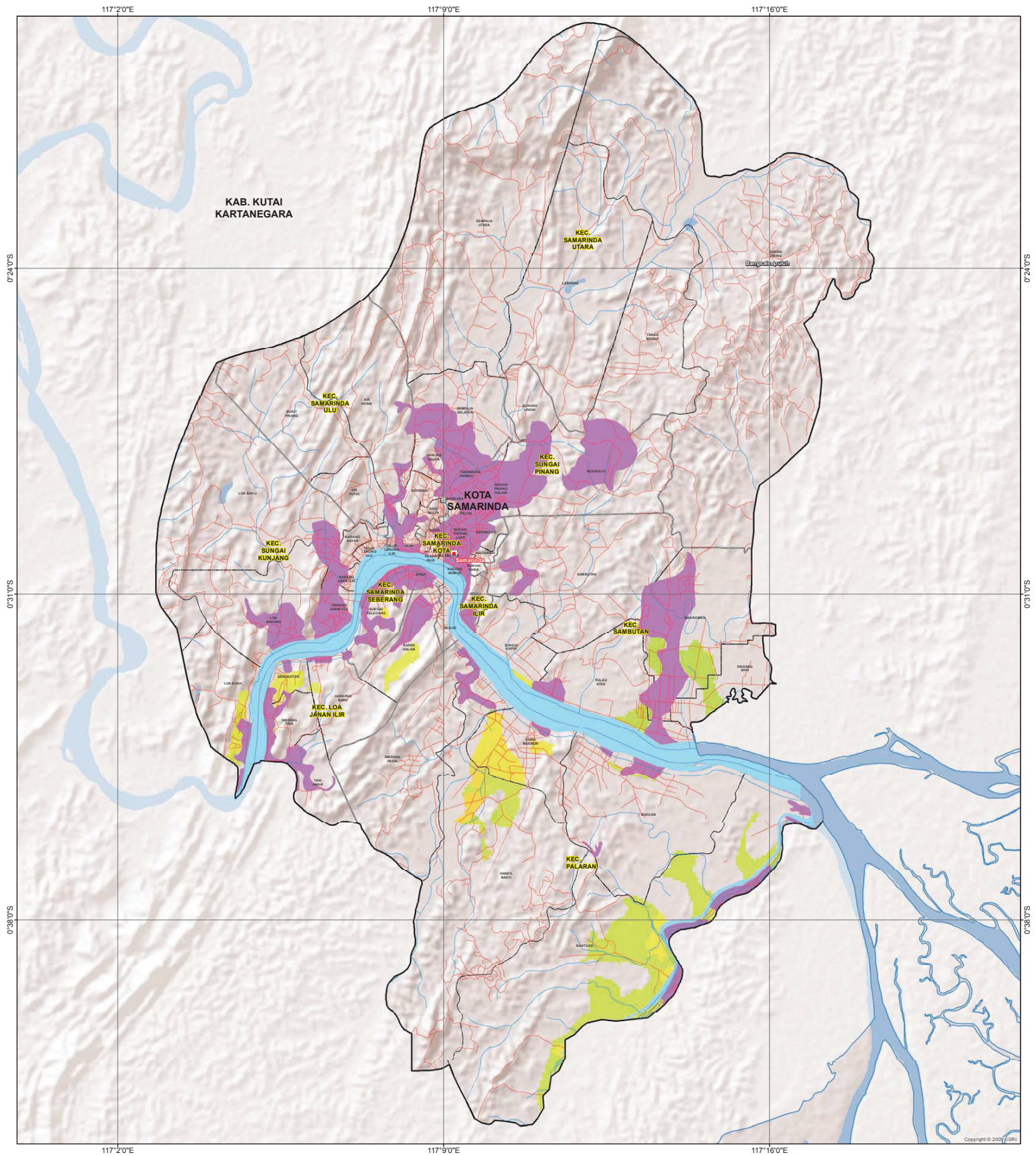
- 1.a. Peta Bahaya Bencana Konflik Sosial
- 2.b. Peta Kerentanan Bencana Konflik Sosial
- 3.c. Peta Kapasitas Bencana Konflik Sosial
- 4.d. Peta Risiko Bencana Konflik Sosial

Peta Risiko Multi Ancaman

PETA BAHAYA BANJIR DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PETA KERENTANAN BENCANA BANJIR DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan
interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara
United Nations Development Pro

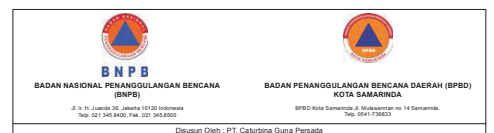
Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

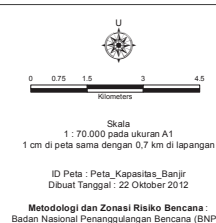
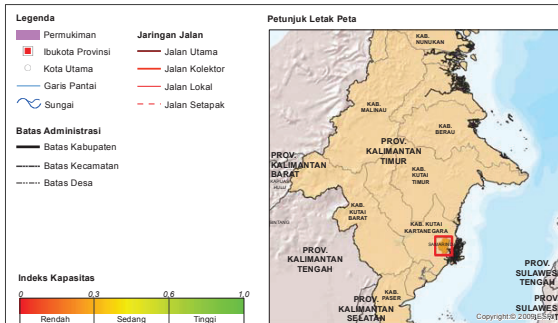
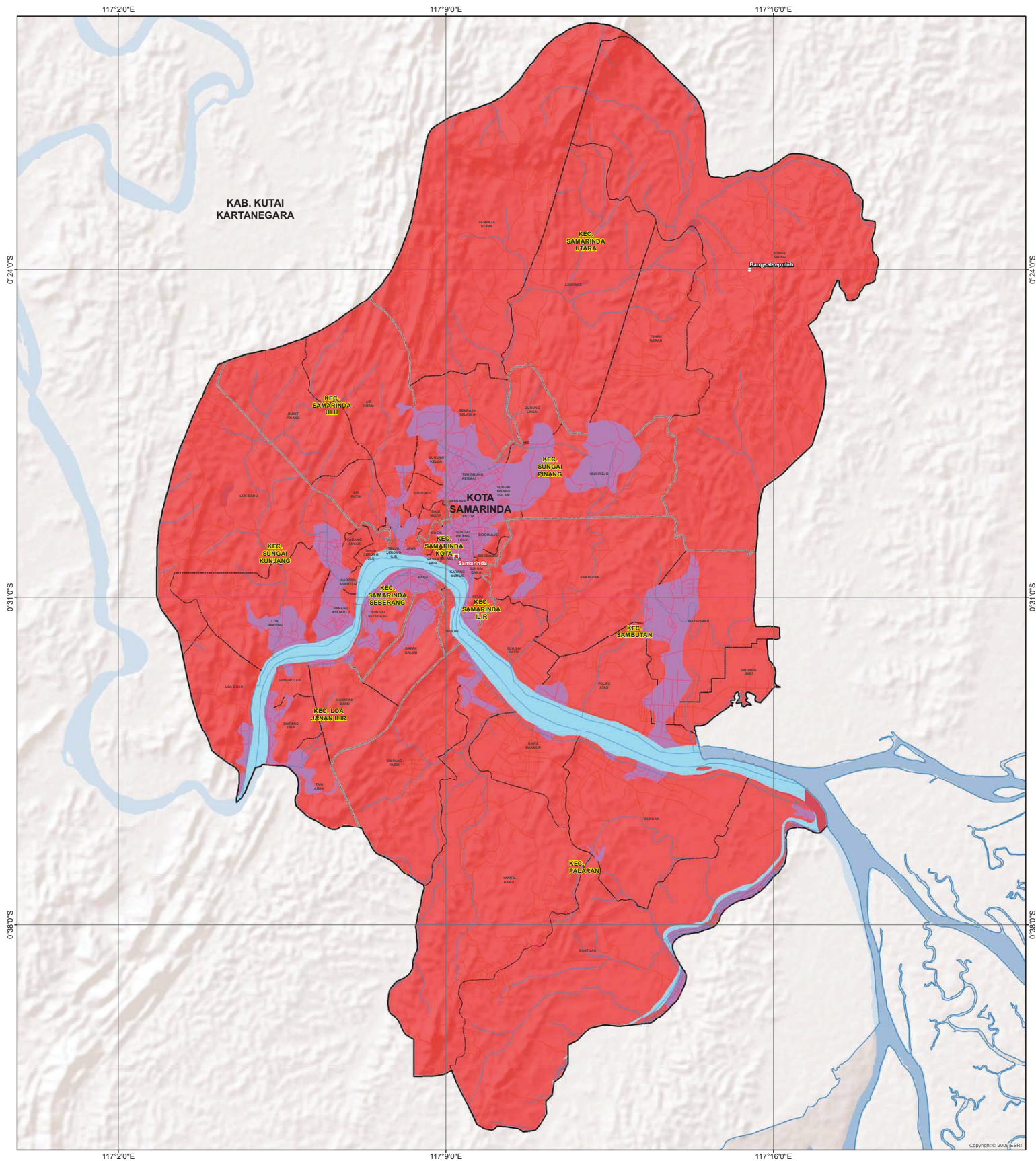
Sumber Data :
- Pengolahan data dengan sistem informasi geografi (SIG) dengan parameter utama yaitu

- a. Komponen Sosial (kepadatan penduduk, kelompok rentan)
- b. Komponen Ekonomi (PDRB, lahan produktif)
- c. Komponen Fisik (rumah, fasilitas umum)
- d. Komponen Lingkungan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, semak belukar, dan rawa)

- Data metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNBP, 2012



PETA KAPASITAS BENCANA BANJIR DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan
interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

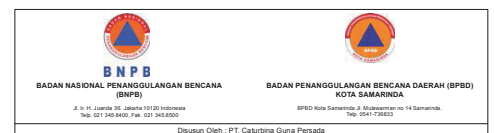
Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara
United Nations Development Pro

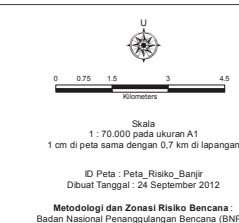
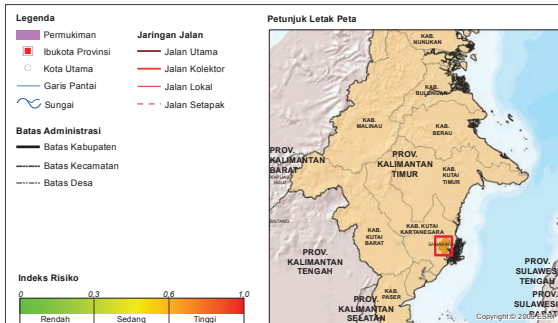
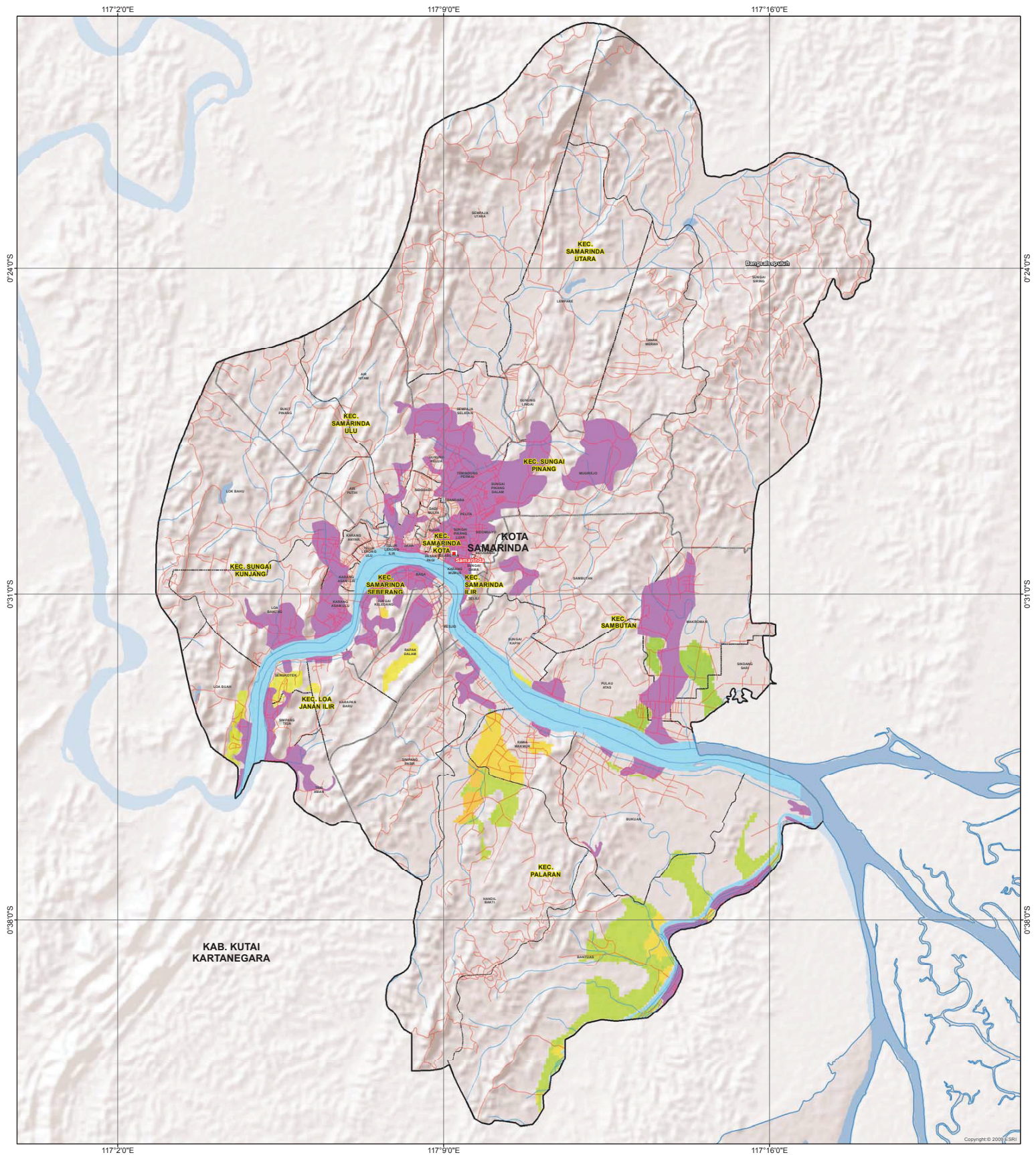
Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

Sumber Data :
- Pengolahan data dengan sistem informasi geografi (SIG) dengan parameter utama yaitu hyogo framework for actions (HFA) dan data kesiapsiagaan
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



PETA RISIKO BENCANA BANJIR DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan
interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

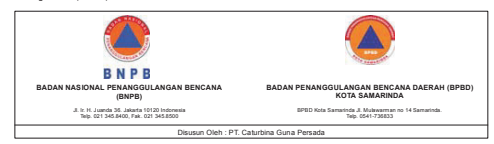
Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara
United Nations Development Pro

Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten, BNPB, 2012, dengan menggunakan 3 komponen utama, yaitu : Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan R = H*V
- Metodi metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



PETA BAHAYA TANAH LONGSOR DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

117°20'E

117°30'E

117°16'0"E

117°20'E

117°30'E

117°16'0"E

0°24'0"S

0°31'0"S

0°38'0"S

0°24'0"S

0°31'0"S

0°38'0"S

KAB. KUTAI
KARTANEGARA

KEC. SAMARINDA
UTARA

KEC. SAMARINDA
ULU

KEC. SUNGAI
PINANG

KOTA
SAMARINDA

KEC. SUNGAI
KUNJANG

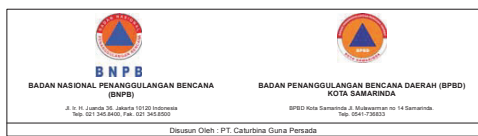
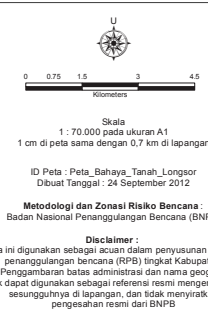
KEC. SAMARINDA
SEBERANG

KEC. SAMARINDA
ILIR

KEC. SAMBUTAN

KEC. LOA
JANAN ILIR

KEC. PALARAN



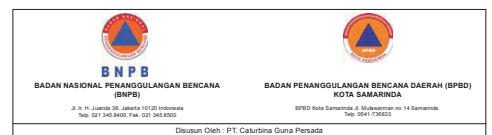
117°16'0"E



Peta Dasar :
 • Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
 BPS, 2010

Sumber Data :
 • Pengolahan data dengan sistem informasi geografi (SIG) dengan parameter:
 a. Data yaitu
 1. Komponen Sosial (kepadatan penduduk, kelompok rentan)
 2. Komponen Ekonomi (PDRB, lahan produktif)
 3. Komponen Fisik (rumah, fasilitas umum)
 4. Komponen Lingkungan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, semak belukar, dan rawa)
 • Detil metode dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman



PETA KAPASITAS BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

117°20'E

117°50'E

117°160'E

117°20'E

117°50'E

117°160'E

0°24'0"S

0°31'0"S

0°38'0"S

0°24'0"S

0°31'0"S

0°38'0"S

KAB. KUTAI
KARTANEGARA

KEC.
SAMARINDA
UTARA

KEC.
SAMARINDA
ULU

KEC.
SUNGAI
PINANG

KOTA
SAMARINDA

KEC.
SUNGAI
KUNJANG

KEC.
SAMARINDA
SEBERANG

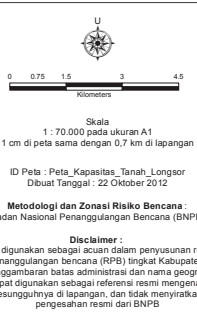
KEC.
SAMARINDA
KOTA

KEC.
SAMARINDA
ILIR

KEC.
SAMBUTAN

KEC.
LOA
JANAN ILIR

KEC.
PALARAN



Proyeksi :

World Mercator

Unit Grid :

Lintang - Bujur dengan interval antar grid 0,167 derajat

Datum :

WGS-84

Gambar Latar :

ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :

United Nations Development Programme (UNDP)

Peta Dasar :

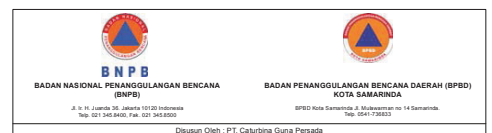
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :

BPS, 2010

Sumber Data :

- Pengolahan data dengan sistem informasi geografis (SIG) dengan parameter utama yaitu hyogo framework for actions (HFA) dan data kesiapsiagaan
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



PETA RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

117°20'E

117°30'E

117°16'0"E

0°24'0"S

0°24'0"S

0°31'0"S

0°31'0"S

0°38'0"S

0°38'0"S

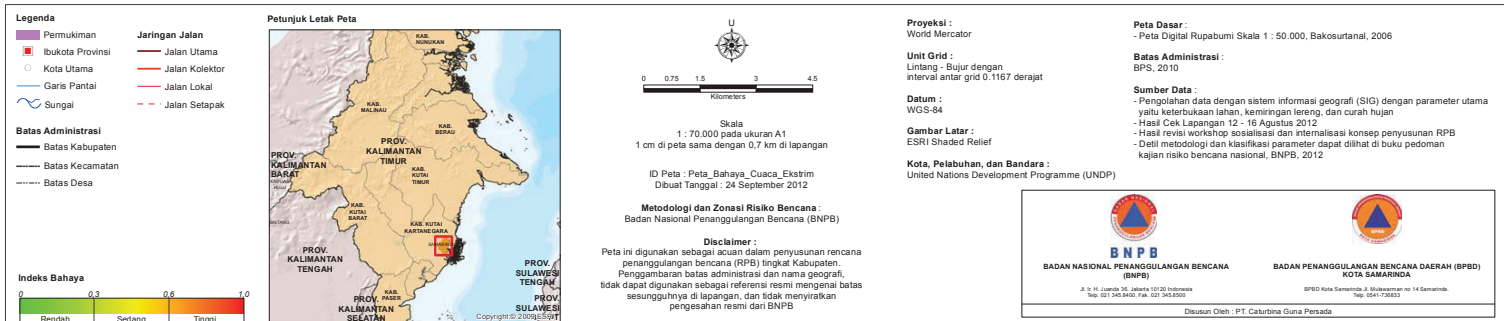
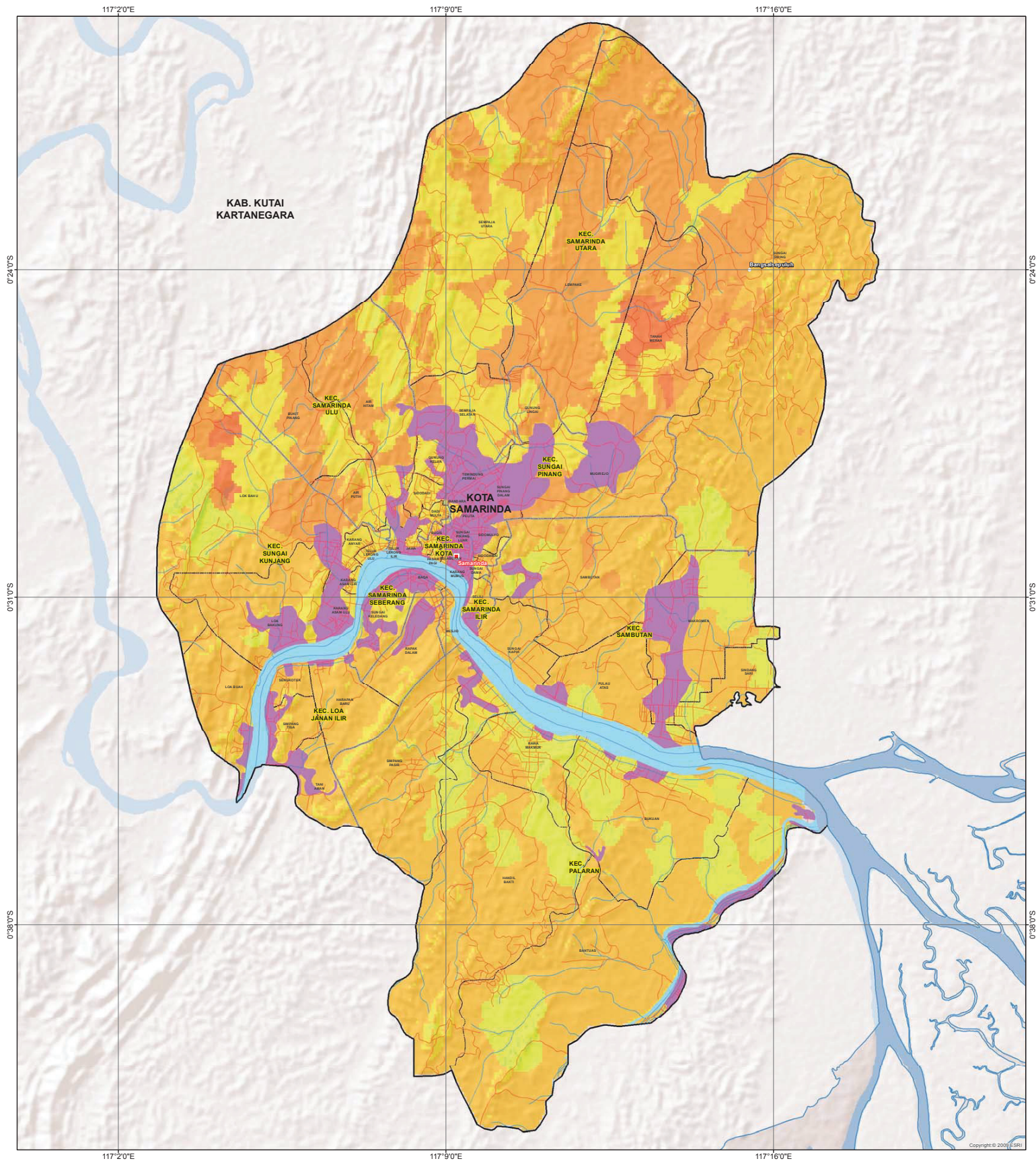
117°20'E

117°30'E

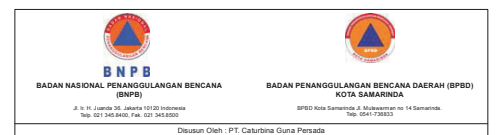
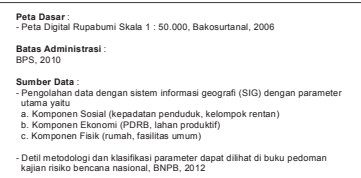
117°16'0"E



PETA BAHAYA CUACA EKSTRIM DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



117°16'0"E



PETA KAPASITAS BENCANA CUACA EKSTRIM DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

117°20'E

117°50'E

117°160'E

117°20'E

117°50'E

117°160'E

0°24'0"S

0°31'0"S

0°38'0"S

0°24'0"S

0°31'0"S

0°38'0"S

KAB. KUTAI
KARTANEGARA

KEC.
SAMARINDA
UTARA

KEC.
SAMARINDA
ULU

KEC.
SUNGAI
PINANG

KOTA
SAMARINDA

KEC.
SUNGAI
KUNJANG

KEC.
SAMARINDA
SEBERANG

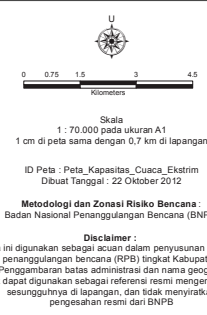
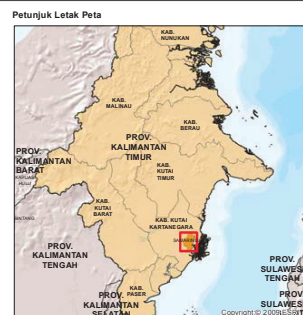
KEC.
SAMARINDA
KOTA

KEC.
SAMARINDA
ILIR

KEC.
LOA
JANAN ILIR

KEC.
SAMBUTAN

KEC.
PALARAN



Proyeksi :

World Mercator

Unit Grid :

Lintang - Bujur dengan interval antar grid 0,167 derajat

Datum :

WGS-84

Gambar Latar :

ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :

United Nations Development Programme (UNDP)

Peta Dasar :

- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :

BPS, 2010

Sumber Data :

- Pengolahan data dengan sistem informasi geografis (SIG) dengan parameter utama yaitu hyogo framework for actions (HFA) dan data kesiapsiagaan
- Detil metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012

BNPB
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)

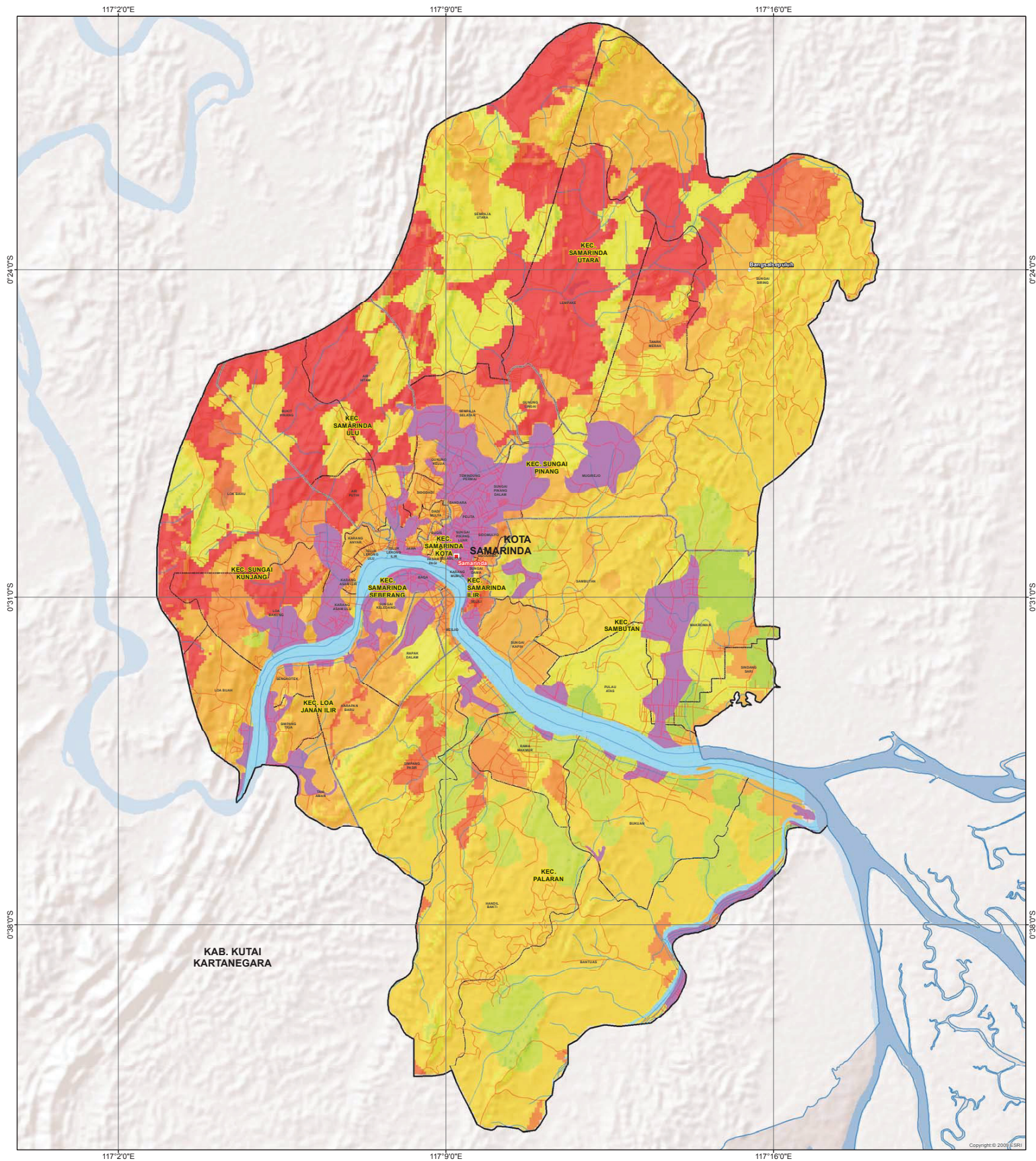
Jl. H. Juanda 58, Jakarta 10130 Indonesia
Telp. 021 145-6400 / Fax. 021 364-0200

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SAMARINDA**

BPBD Kota Samarinda, Jl. Sukaraman no 14 Samarinda
Telp. 0541 738023

Dissain Oleh : PT. Caturbita Guna Perdana

PETA RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan
interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

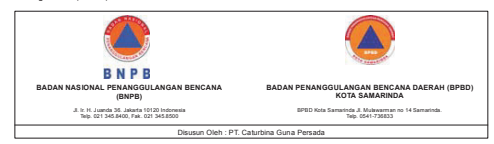
Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara
United Nations Development Pro

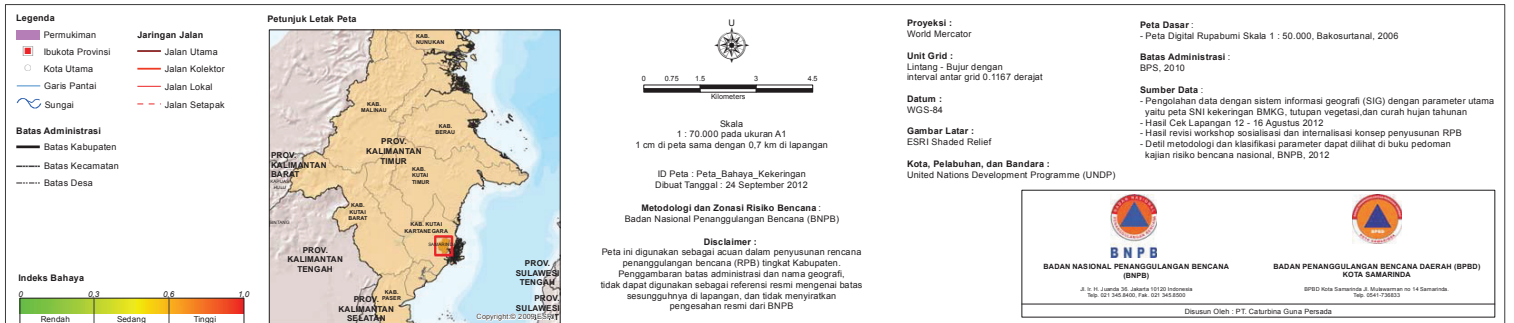
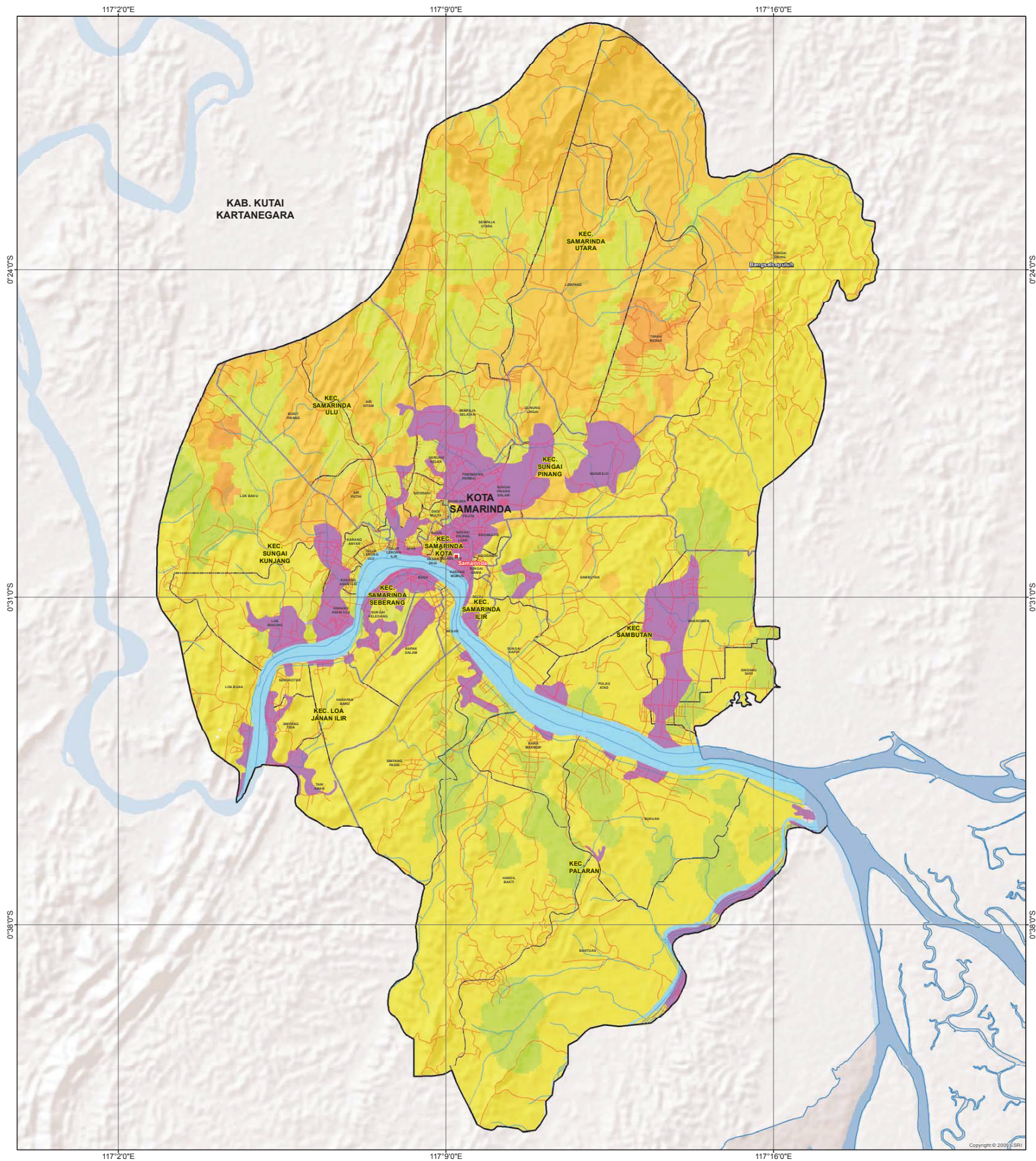
Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

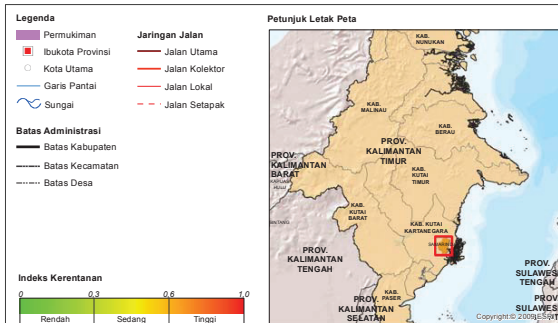
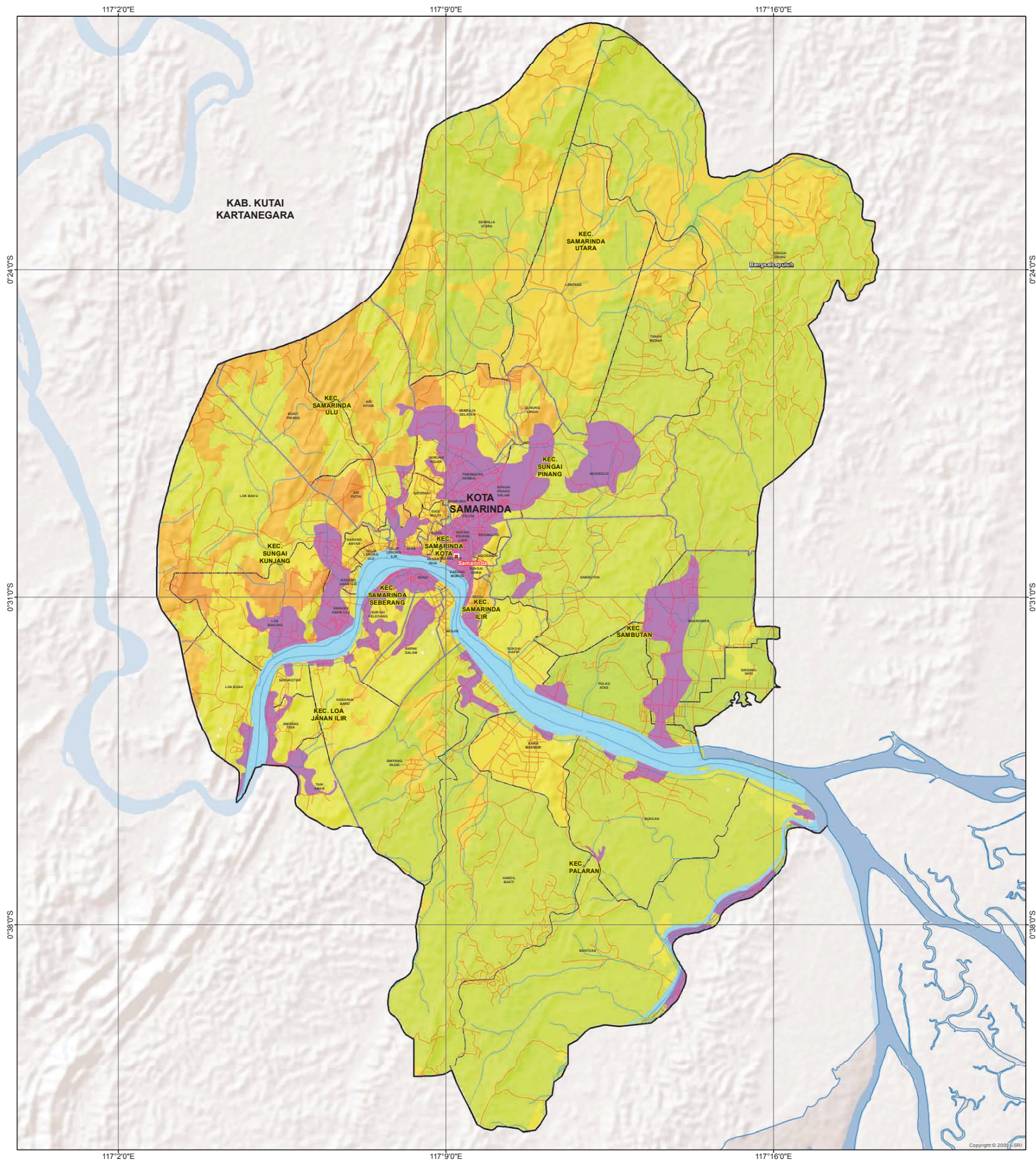
Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten, BNPB, 2012, dengan menggunakan 3 komponen utama, yaitu : Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detil metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman penilaian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



PETA BAHAYA KEKERINGAN DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PETA KERENTANAN BENCANA KEKERINGAN DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan
interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara
United Nations Development Pro

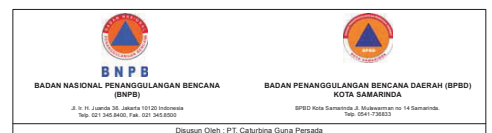
Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

Sumber Data :
- Pengolahan data dengan sistem informasi geografi (SIG) dengan parameter utama yaitu

- a. Komponen Sosial (kepadatan penduduk, kelompok rentan)
- b. Komponen Ekonomi (PDRB, lahan produktif)
- c. Komponen Fisik (rumah, fasilitas umum)
- d. Komponen Lingkungan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, semak belukar, dan rawa)

- Data metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNBP, 2012



PETA KAPASITAS BENCANA KEKERINGAN DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

117°20'E

117°50'E

117°160'E

117°20'E

117°50'E

117°160'E

0°24'0"S

0°31'0"S

0°38'0"S

0°24'0"S

0°31'0"S

0°38'0"S

KAB. KUTAI
KARTANEGARA

KEC.
SAMARINDA
UTARA

KEC.
SAMARINDA
ULU

KEC.
SUNGAI
PINANG

KOTA
SAMARINDA

KEC.
SUNGAI
KUNJANG

KEC.
SAMARINDA
SEBERANG

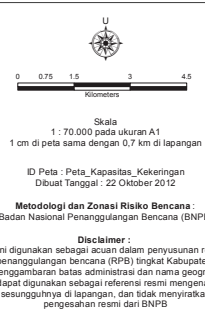
KEC.
SAMARINDA
KOTA

KEC.
SAMARINDA
ILIR

KEC.
LOA
JANAN ILIR

KEC.
SAMBUTAN

KEC.
PALARAN



Proyeksi :

World Mercator

Unit Grid :

Lintang - Bujur dengan interval antar grid 0,167 derajat

Datum :

WGS-84

Gambar Latar :

ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :

United Nations Development Programme (UNDP)

Peta Dasar :

- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :

BPS, 2010

Sumber Data :

- Pengolahan data dengan sistem informasi geografis (SIG) dengan parameter utama yaitu hyogo framework for actions (HFA) dan data kesiapsiagaan
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012

BNPB
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA SAMARINDA**

Jl. H. Juanda 55, Jakarta 10130 Indonesia
Telp. 021 145-6400 / Fax. 021 364-0200

08100 Kota Samarinda, Jl. Sukaraman no 14 Samarinda
Telp. 0541 738603

Dissun Oleh : PT. Caturbina Guna Perdana

PETA RISIKO BENCANA KEKERINGAN DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

117°20'E

117°30'E

117°16'0"E

117°20'E

117°30'E

117°16'0"E

0°24'0"S

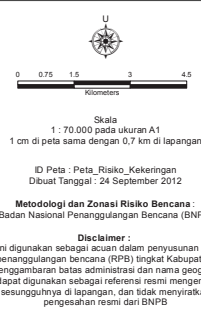
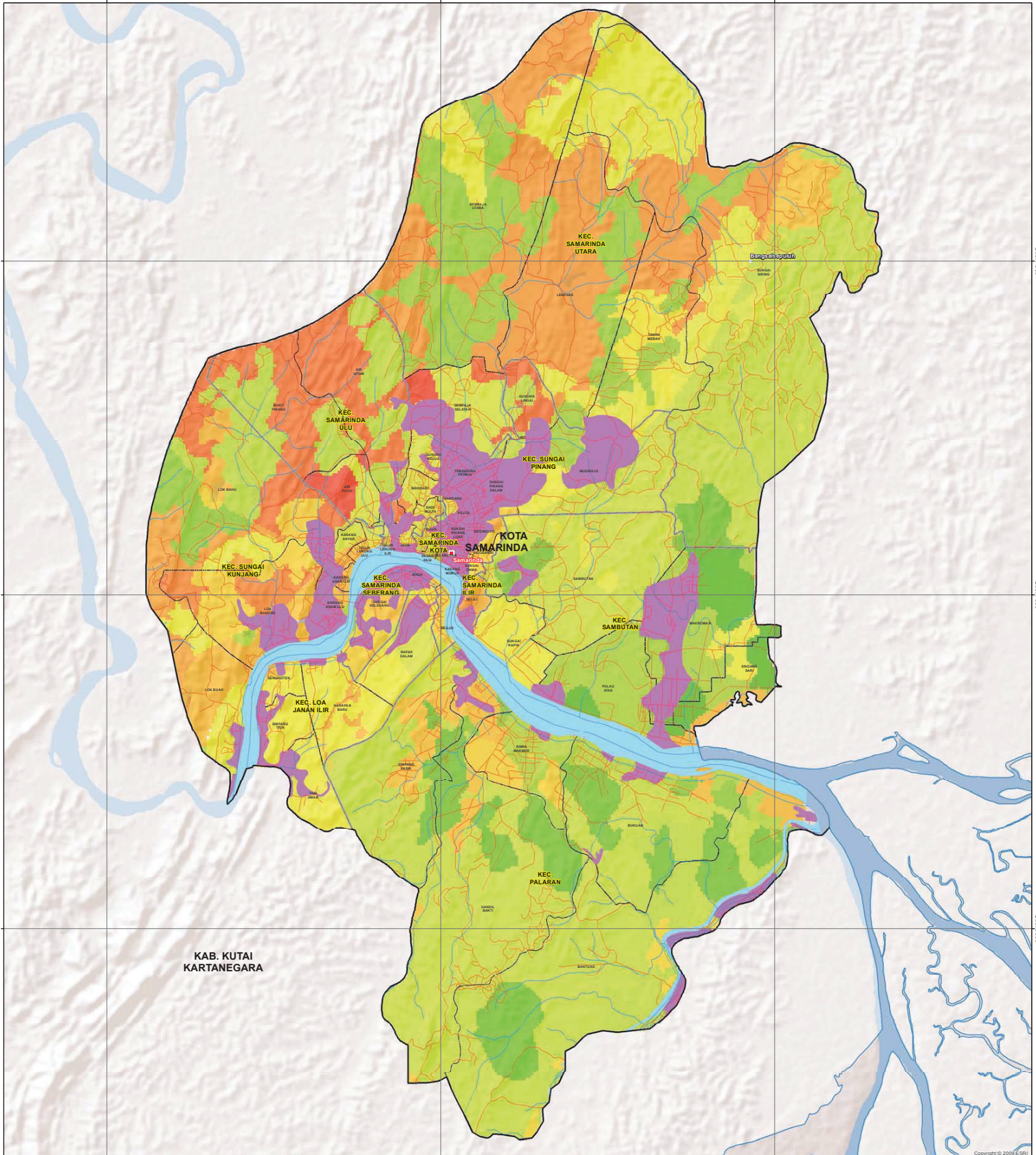
0°31'0"S

0°38'0"S

0°24'0"S

0°31'0"S

0°38'0"S



Proyeksi :

World Mercator

Unit Grid :

Lintang - Bujur dengan interval antar grid 0,167 derajat

Datum :

WGS-84

Gambar Latar :

ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :

United Nations Development Programme (UNDP)

Peta Dasar :

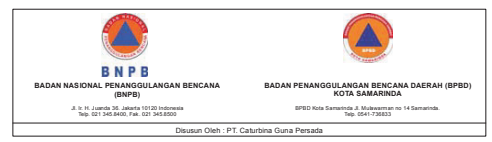
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :

BPS, 2010

Sumber Data :

- Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten, BNPB, 2012, dengan menggunakan 3 komponen utama, yaitu : Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



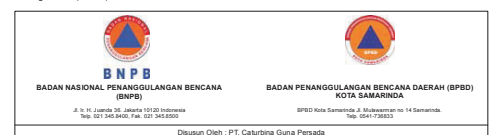
117°16'0"E



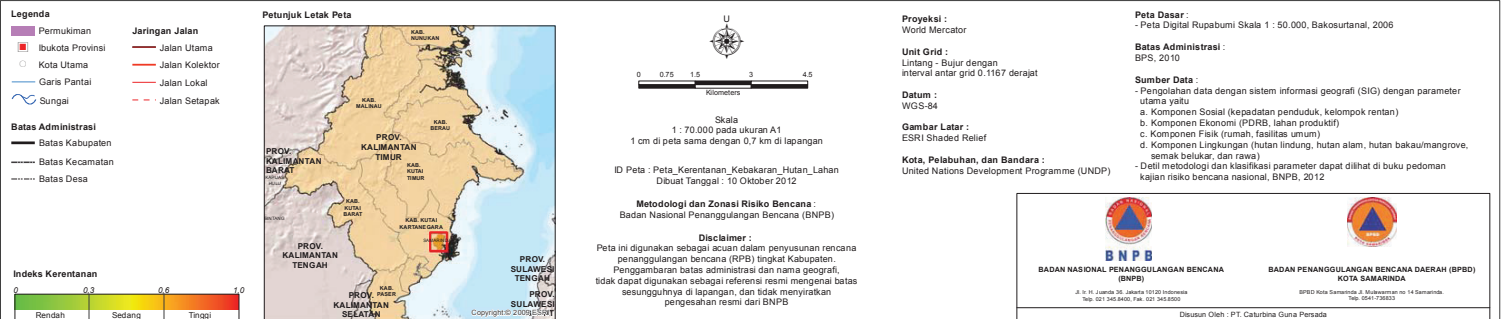
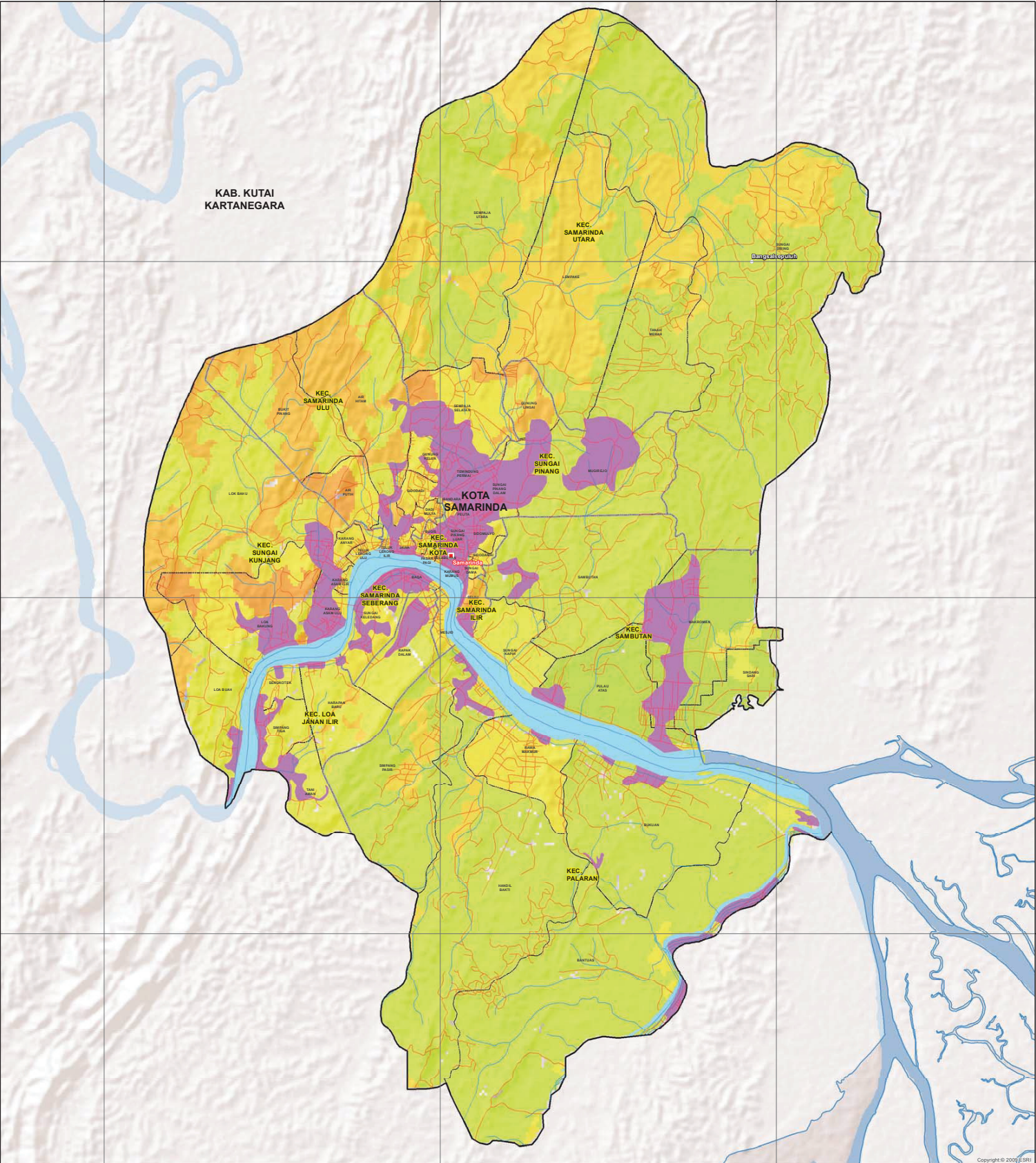
Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

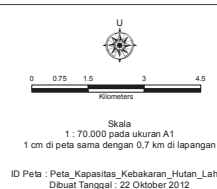
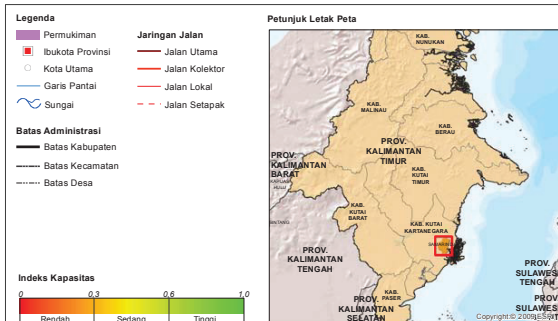
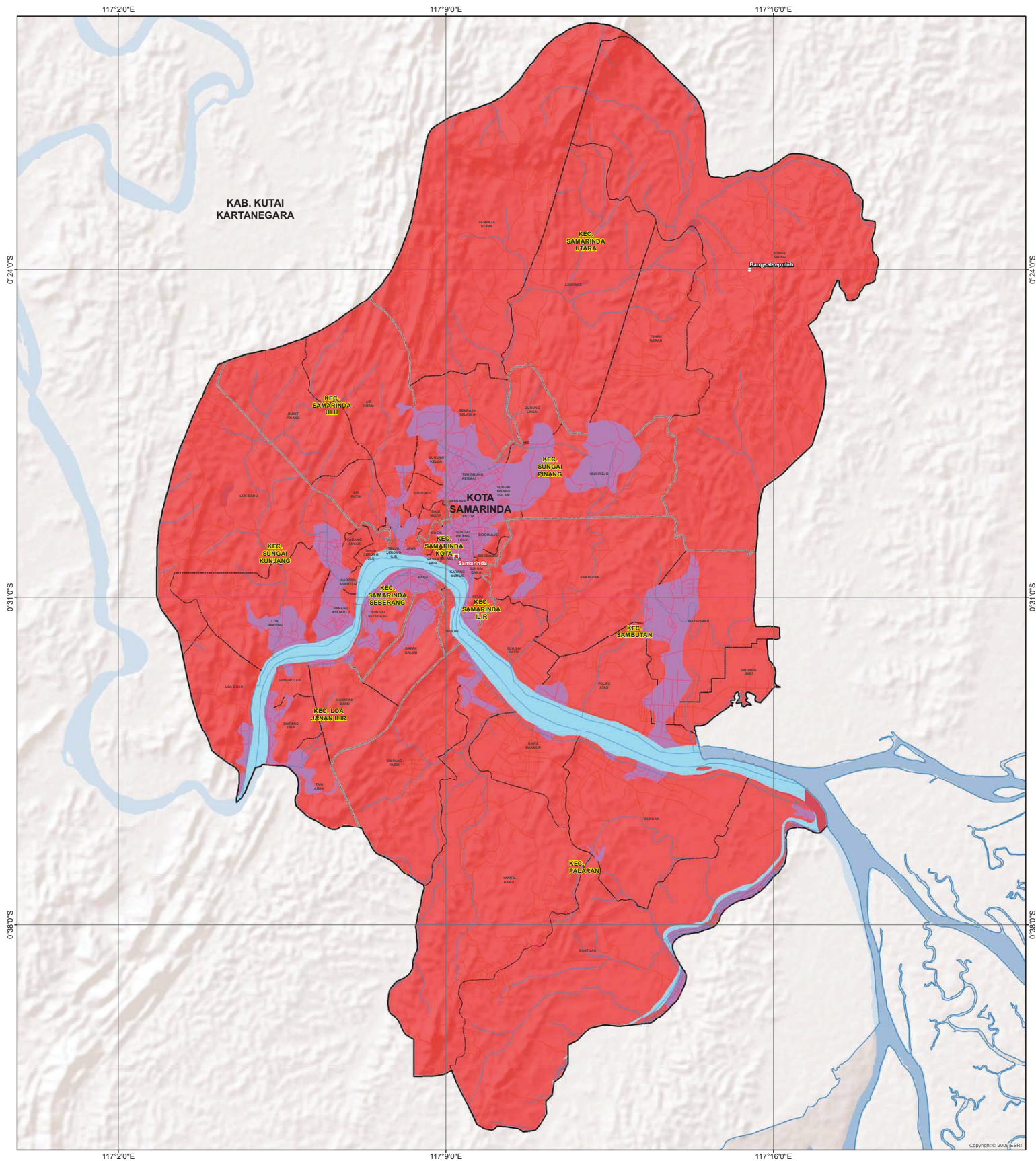
Sumber Data :
- Pengolahan data dengan sistem informasi geografi (SIG) dengan parameter utama yaitu jenis hutan, jenis tanah, dan curah hujan tahunan
- Hasil Kesi Lapangan 12 - 16 Agustus 2012
- Hasil resmi workshop skalalisasi dan internalisasi konsep penyusunan RPB
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



**PETA KERENTANAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



PETA KAPASITAS BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan
interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

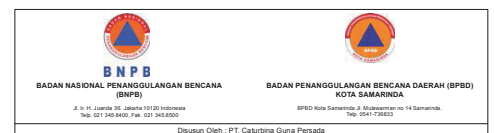
Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara
United Nations Development Pro

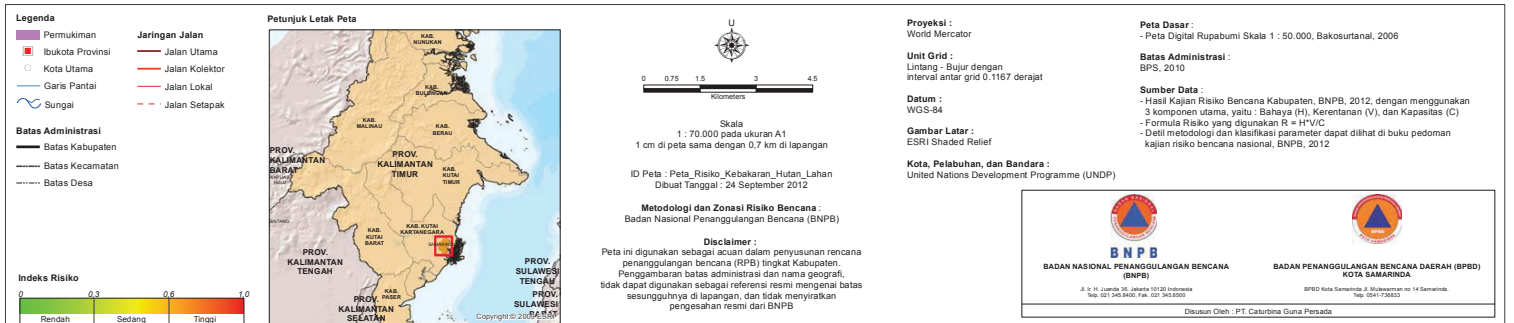
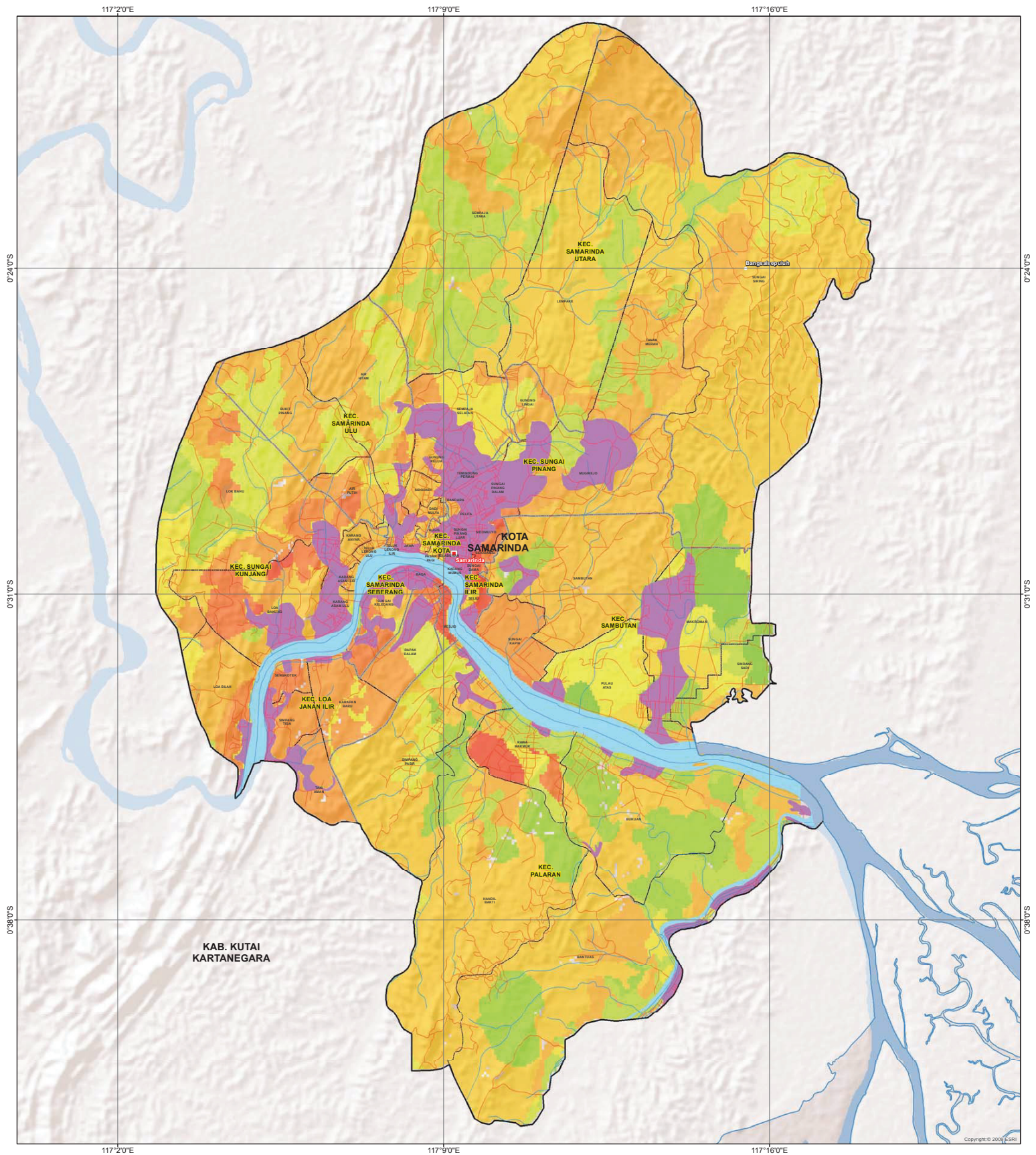
Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

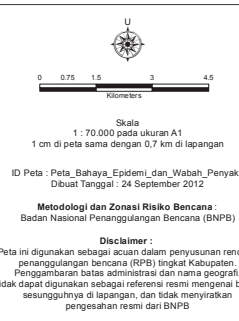
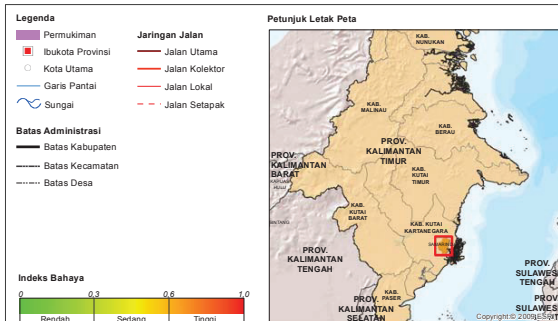
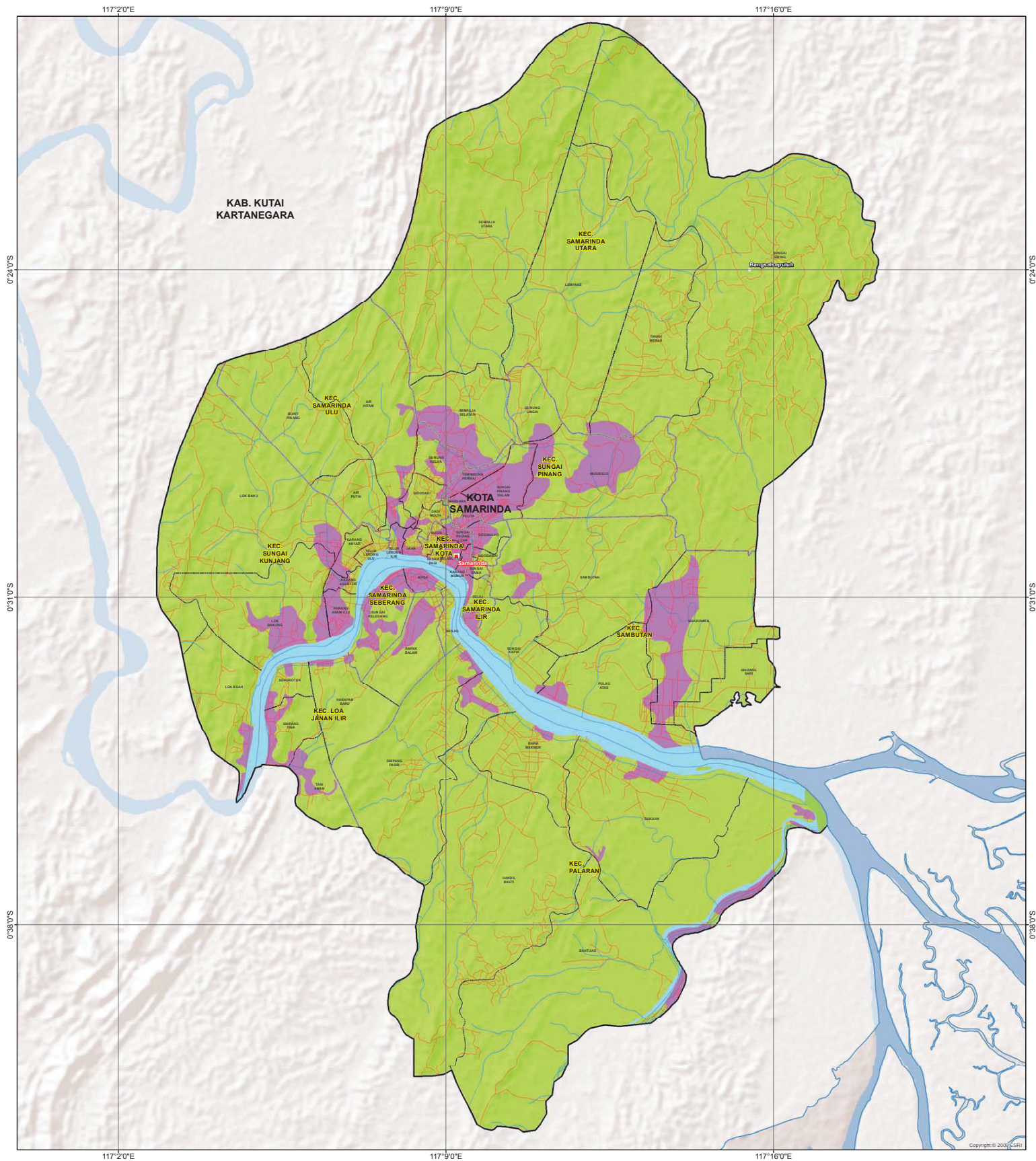
Sumber Data :
- Pengolahan data dengan sistem informasi geografi (SIG) dengan parameter utama yaitu hyogo framework for actions (HFA) dan data kesiapsiagaan
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



PETA RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PETA BAHAYA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Proyektil :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

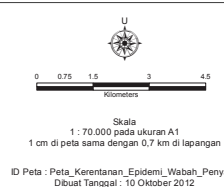
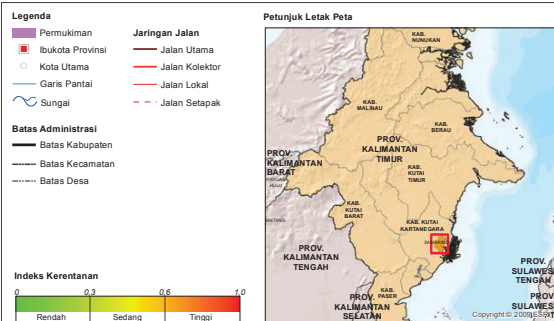
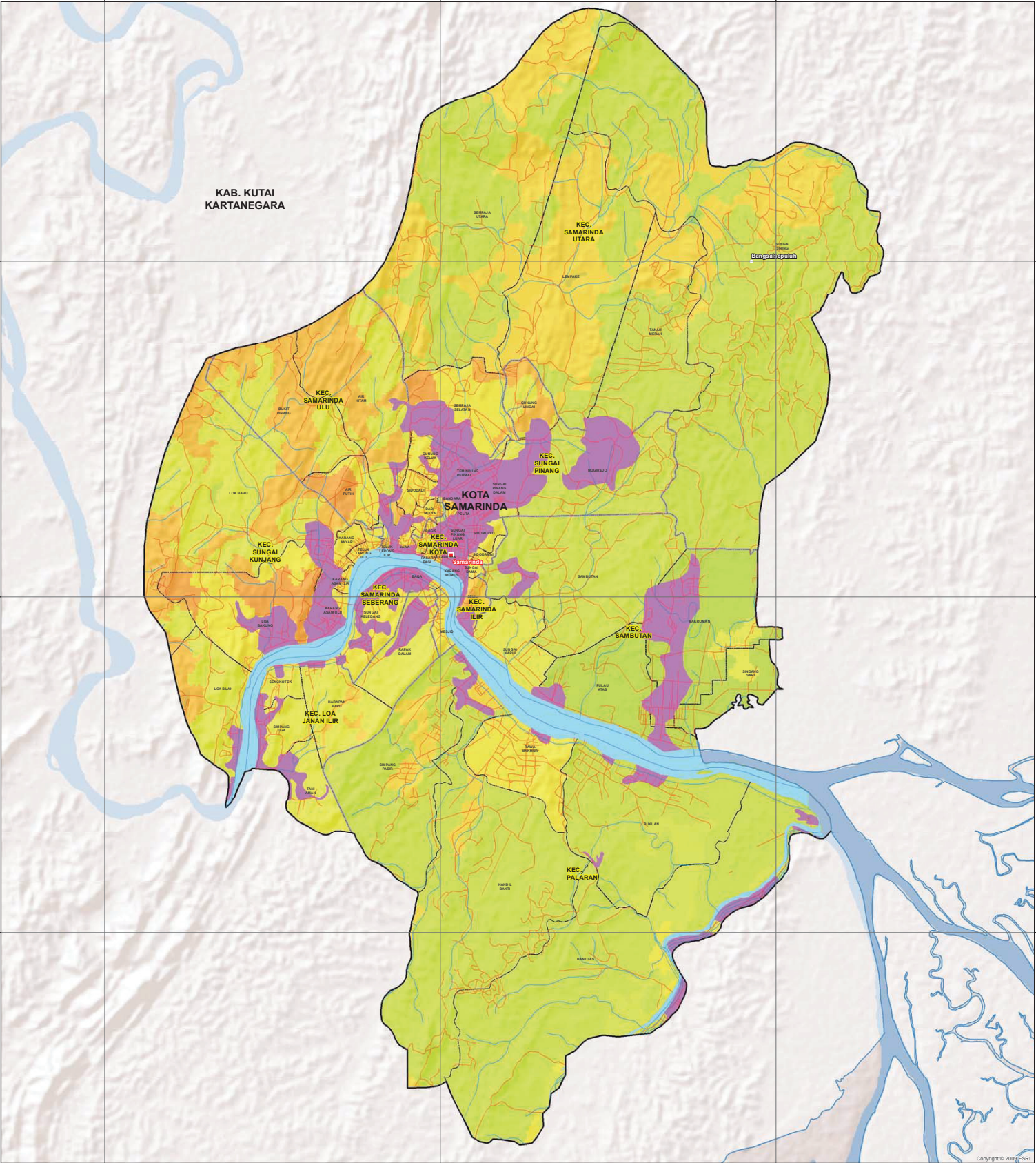
Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
United Nations Development Programme (UNDP)

Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

Sumber Data :
- Pengolahan data dengan sistem informasi geografik (SIG) dengan parameter utama yaitu kepadatan timbunya malaria, kepadatan timbunya demam berdarah, kepadatan timbunya HIV/AIDS, kepadatan timbunya campak, kepadatan penduduk
- Hasil Cek Lapangan 12 - 16 Agustus 2012
- Hasil revisi workshop sosialisasi dan internalisasi konsep penyusunan RPB
- Definisi metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012

**PETA KERENTANAN BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT
DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan
interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
United Nations Development Programme (UNDP)

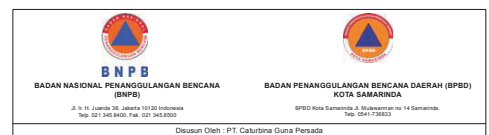
Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

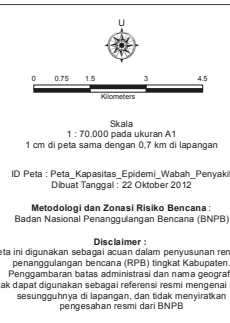
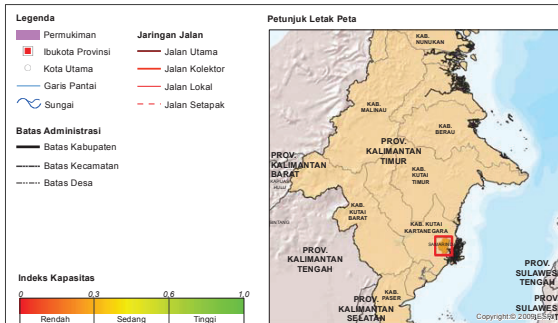
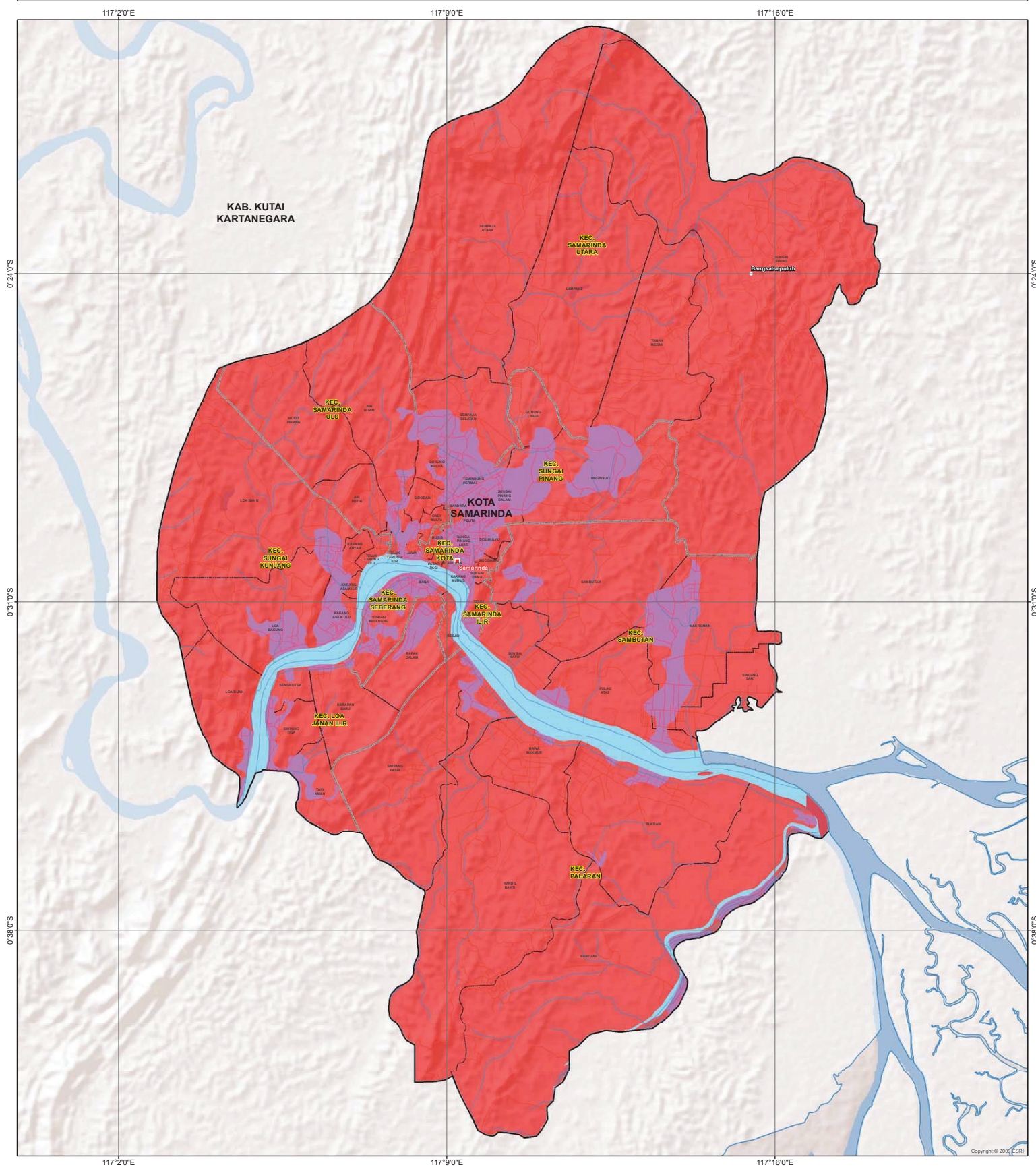
Sumber Data :
- Pengolahan data dengan sistem informasi geografi (SIG) dengan parameter utama sebagai berikut:

- a. Komponen Sosial (kepadatan penduduk, kelompok rentan)
- b. Komponen Ekonomi (PDRB, lahan produktif)
- c. Komponen Fisik (rumah, fasilitas umum)
- d. Komponen Lingkungan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, semak belukar, dan rawa)

- Data metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



PETA KAPASITAS BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan
interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

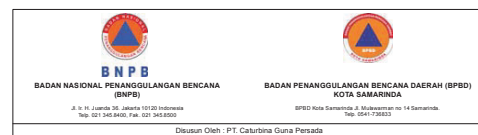
Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
United Nations Development Programme (UNDP)

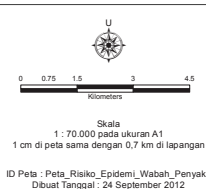
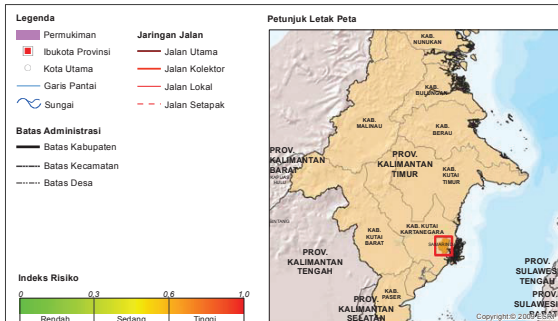
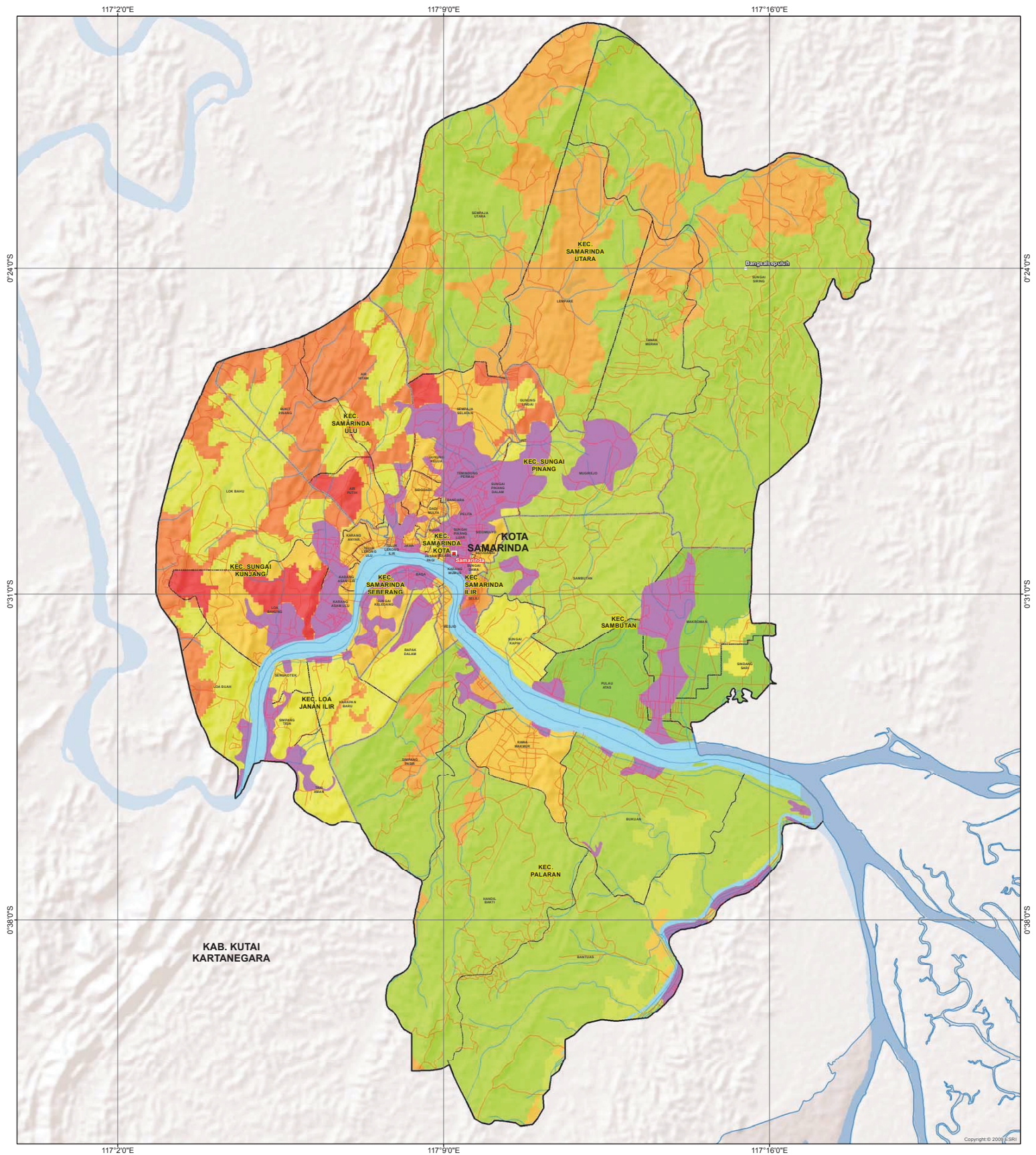
Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

Sumber Data :
- Pengolahan data dengan sistem informasi geografi (SIG) dengan parameter utama yang menggunakan framework for actions (HFA) dan data keesaiaaagan
- Detil metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



PETA RISIKO BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan
interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

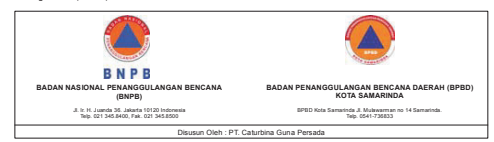
Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara
United Nations Development Pro

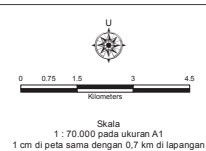
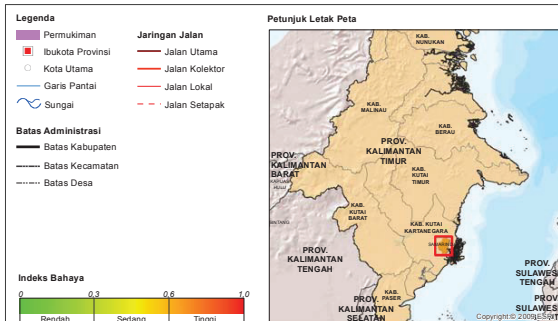
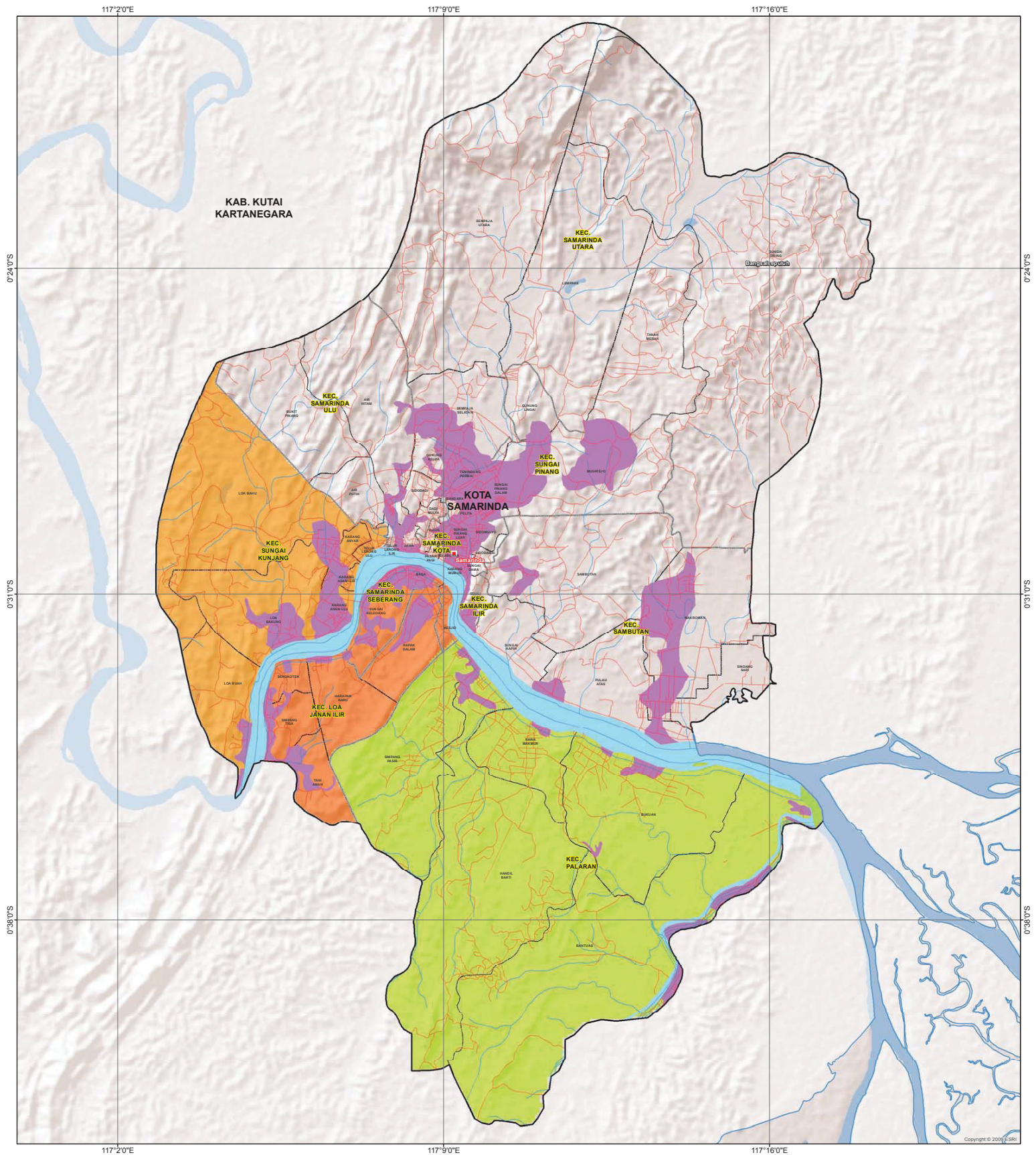
Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten, BNPB, 2012, dengan menggunakan 3 komponen utama, yaitu : Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan R = H*V
- Metodi metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



PETA BAHAYA KONFLIK SOSIAL DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan
interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
United Nations Development Programme (UNDP)

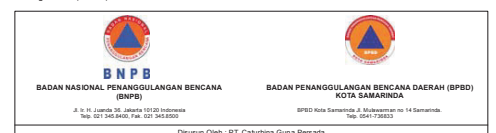
Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

Sumber Data :

- Pengolahan data dengan sistem informasi geografi (SIG) dengan parameter utama yaitu frekuensi kejadian, dampak kejadian bencana
- Hasil Keiv Lapangan 12 - 16 Agustus 2012
- Hasil revisi workshop sosialisasi dan internalisasi konsep penyusunan RPB
- Detil metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
United Nations Development Programme (UNDP)



117°16'0"E



PETA KAPASITAS BENCANA KONFLIK SOSIAL DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

117°20'E

117°50'E

117°16'0"E

117°20'E

117°50'E

117°16'0"E

0°24'0"S
0°31'0"S
0°38'0"S

0°24'0"S
0°31'0"S
0°38'0"S

KAB. KUTAI
KARTANEGARA

KEC.
SAMARINDA
UTARA

KEC.
SAMARINDA
ULU

KEC.
SUNGAI
PINANG

KEC.
SUNGAI
KUNJANG

KEC.
SAMARINDA
SEBERANG

KEC.
SAMARINDA
KOTA

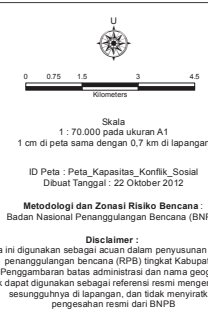
KEC.
SAMARINDA
ILIR

KEC.
LOA
JANAN ILIR

KEC.
SAMBUTAN

KEC.
PALARAN

KOTA
SAMARINDA



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan interval antar grid 0,167 derajat

Datum :
WGS-84

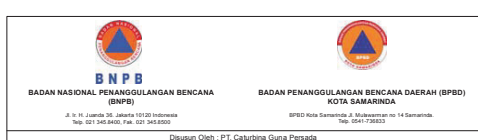
Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
United Nations Development Programme (UNDP)

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

Sumber Data :
- Pengolahan data dengan sistem informasi geografis (SIG) dengan parameter utama yaitu hyogo framework for actions (HFA) dan data kesiapsiagaan
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



PETA RISIKO BENCANA KONFLIK SOSIAL DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

117°20'E

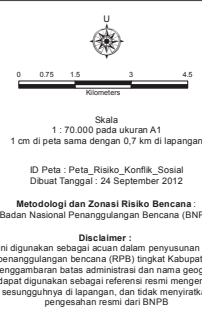
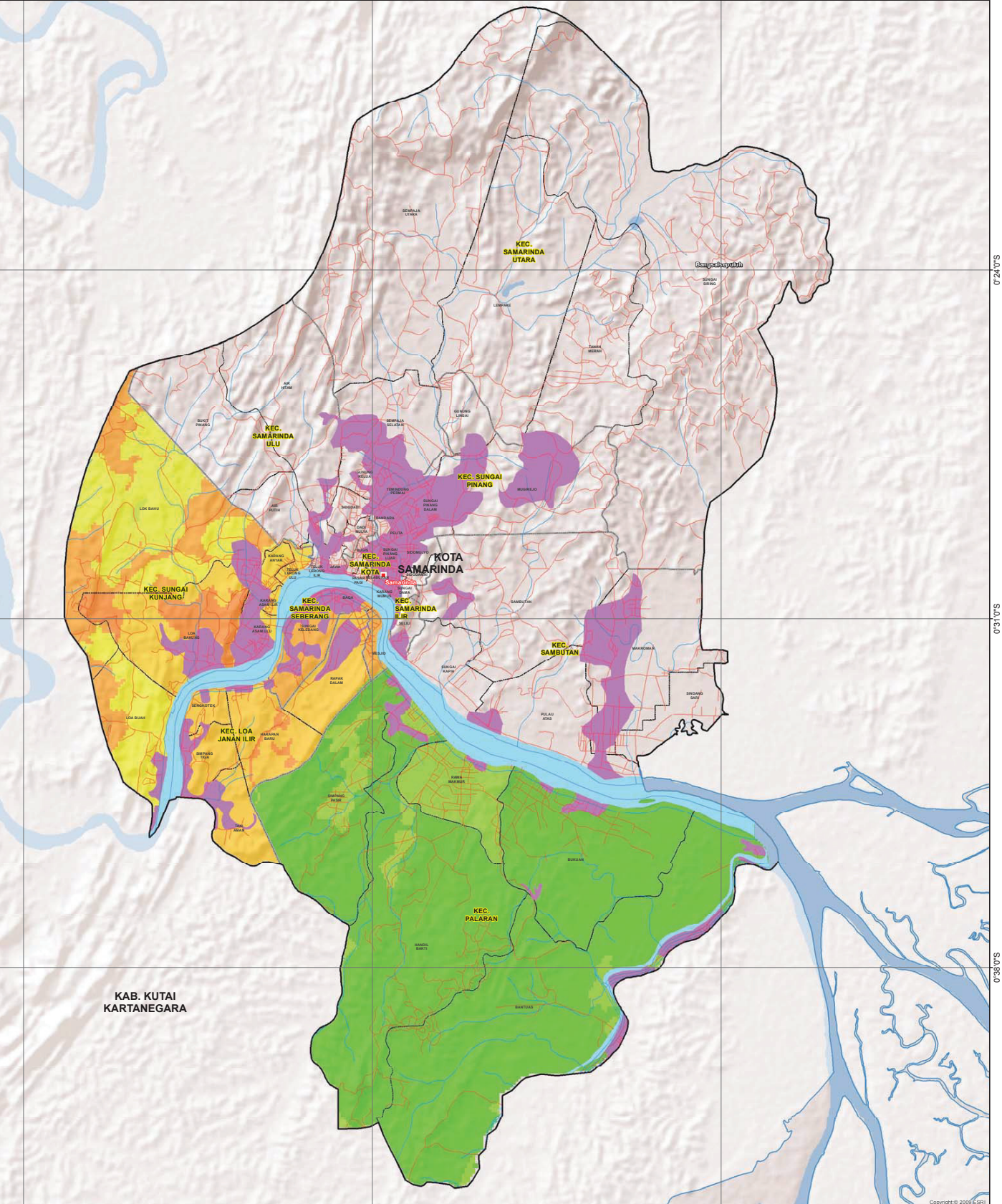
117°30'E

117°16'0"E

117°20'E

117°30'E

117°16'0"E



Proyeksi :

World Mercator

Unit Grid :

Lintang - Bujur dengan interval antar grid 0,167 derajat

Datum :

WGS-84

Gambar Latar :

ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :

United Nations Development Programme (UNDP)

Peta Dasar :

- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :

BPS, 2010

Sumber Data :

- Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten, BNPB, 2012, dengan menggunakan 3 komponen utama, yaitu : Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



BNPB
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Jl. D. N. Juanda No. 1, Jakarta 10120 Indonesia
Telp. 021 345.8400, Fax. 021 345.8000

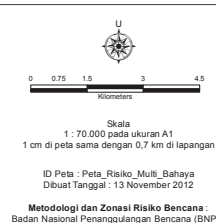
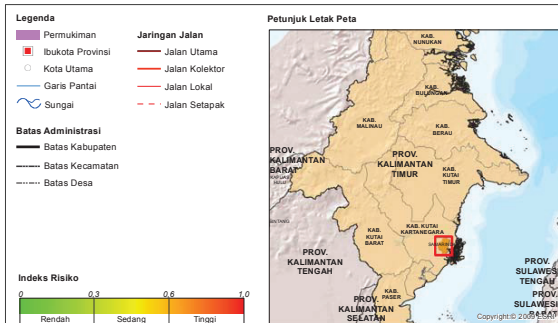
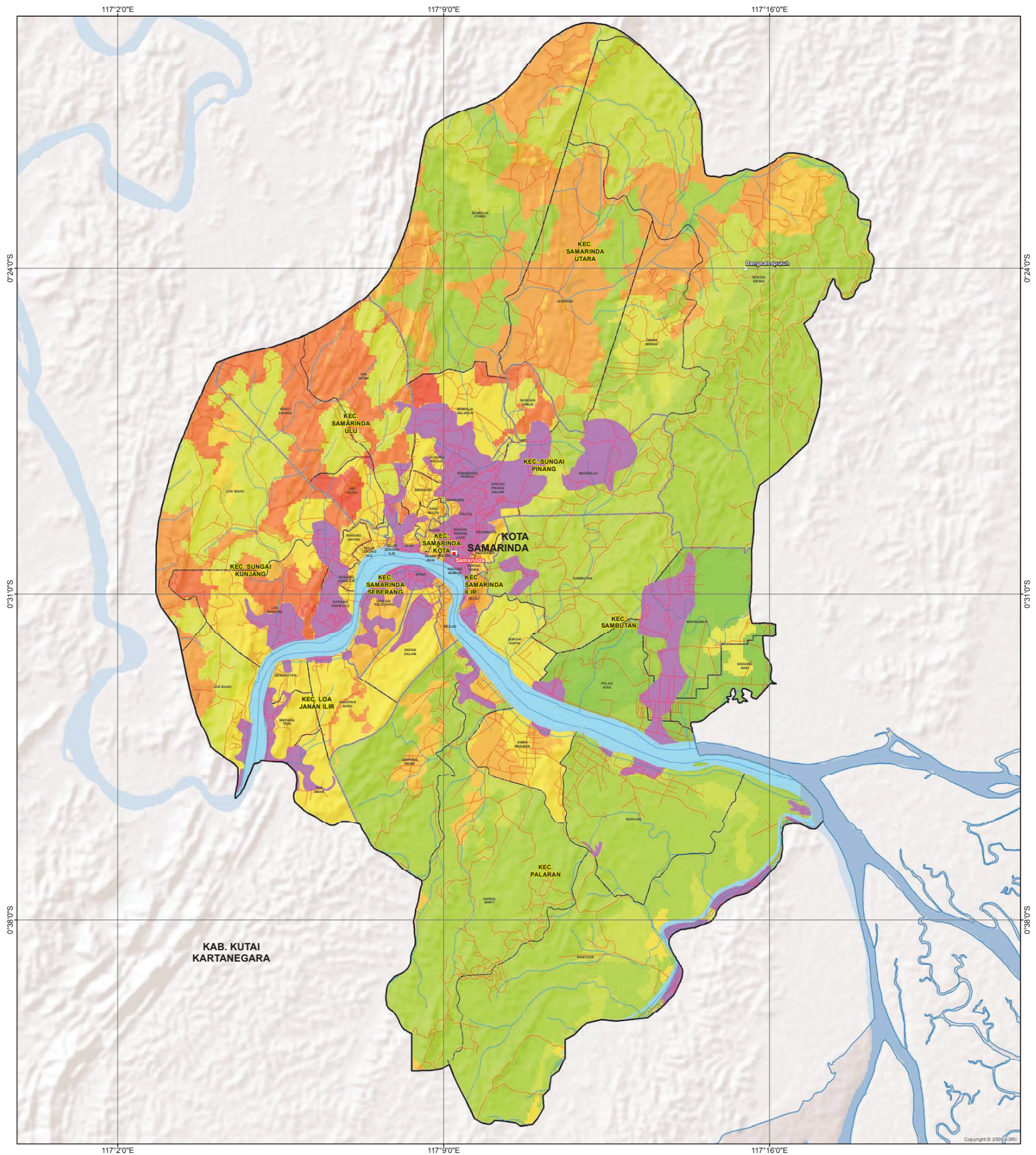


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SAMARINDA

BPBD Kota Samarinda, Jl. Sekeloa Utara No. 14 Samarinda
Telp. 0541-736033

Disusun Oleh : PT. Caturbina Guna Persada

PETA RISIKO MULTI BAHAYA DI KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Proyeksi :
World Mercator

Unit Grid :
Lintang - Bujur dengan
interval antar grid 0.1167 derajat

Datum :
WGS-84

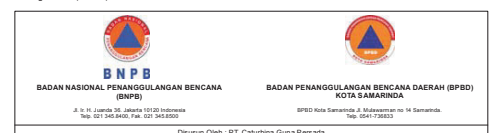
Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
United Nations Development Programme (UNDP)

Peta Dasar :
- Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2010

Sumber Data :
- Pengambilan nilai maksimum dari peta risiko : banjir, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim (angin puting belok), kekeringan, kebakaran hutan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kegagalan teknologi, epidemi wabah penyakit, dan konflik sosial.
- Dilei metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012



SANDINGAN PROGRAM DAN FOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA



KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAMPIRAN 2A. SANDINGAN FOKUS PRIORITAS, SASARAN, KETERLIBATAN INSTITUSI DAN
PAGU INDIKATIF
STRATEGI GENERIK PENANGGULANGAN BENCANA**

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
PERKUATAN ATURAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN							
Revisi Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	Adanya peraturan tentang pembagian peran, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan institusi non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penanggung jawab: Bagian Hukum, BPBD Pendukung: Bappeda, BLH	1				
	Adanya peraturan tentang peran dan keterlibatan lembaga usaha dan lembaga internasional dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						
Membangun mekanisme keterlibatan multi pihak dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana	Aturan daerah tentang mekanisme keterlibatan multi pihak dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana	Penanggung jawab: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perikanan dan Peternakan	1				
Mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Berkurangnya risiko bencana turunan dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana						
	Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selaras dengan Rencana Penanggulangan Bencana						
Sinkronisasi prosedur operasi standar penanganan darurat bencana dengan rencana kontinjensi daerah	Dokumen prosedur operasi standar yang telah direview sesuai dengan rencana kontinjensi	Penanggung jawab: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Sat Pol PP		0.5			

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan secara periodik	Terlaksananya satu paket penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan bencana untuk tujuh jenis latihan setiap dua tahun	Penanggung jawab: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Sat Pol PP	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana daerah	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah	Penanggung Jawab: BPBD, Bappeda Pendukung: BLH, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Perhubungan		0.2	0.2	0.3	
PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA TERPADU							
Membangun sistem data dan informasi kebencanaan daerah yang dapat diakses oleh publik	Adanya website resmi daerah tentang informasi kebencanaan bencana di daerah yang terhubung dengan sistem informasi bencana di tingkat provinsi dan nasional	Penanggung jawab: BPBD, Bappeda, Dinas Perhubungan Pendukung: Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Peternakan, RSUD	1	0.3	0.3	0.3	0.3
	Adanya mekanisme update secara berkelanjutan terhadap data base kebencanaan daerah						
Membangun sistem peringatan dini dengan memadukan teknologi dan kearifan lokal daerah	Adanya sistem peringatan dini untuk bencana-bencana prioritas penanganan kabupaten/kota	Penanggung jawab: BPBD, Bappeda Pendukung: Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Adanya keterpaparan informasi peringatan dini hingga tingkat rumah tangga						

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Adanya RPKB yang disepakati oleh seluruh aktor terkait penanggulangan bencana di daerah	Penanggung jawab: BPBD, Bappeda Pendukung: Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Perhubungan	0.5				
Menyusun rencana kontinjensi bencana-bencana prioritas Kabupaten/Kota	Adanya rencana kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas Kabupaten/Kota	Penanggung jawab: BPBD, Bappeda Pendukung: Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Perguruan Tinggi	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Adanya kesepakatan tertulis setiap institusi terkait penanggulangan bencana untuk pengalokasian sumber daya sesuai dengan rencana kontinjensi.						
	Tersedianya dana darurat bencana sesuai dengan kebutuhan rencana kontinjensi						
Menyusun Kajian Risiko Bencana lintas batas dengan daerah tetangga yang melingkupi setiap bencana utama di daerah	Adanya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang memperhitungkan risiko lintas batas wilayah administrasi	Penanggung jawab: BPBD, Bappeda Pendukung: Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi	0.3				
	Adanya Peta Risiko Bencana untuk setiap bencana-bencana utama di daerah						
	Adanya sistem pengumpulan data kajian risiko bencana daerah dengan validasi hingga tingkat pemerintahan terendah di daerah						

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Menyusun Rencana Induk Mitigasi bencana daerah	Adanya Rencana Induk Mitigasi bencana sebagai pendukung pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung jawab: BPBD, Bappeda Pendukung: Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Perhubungan		0.5			
Menggalang kerjasama dengan daerah tetangga dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan bencana pada masa sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana	Dokumen kesepakatan pelaksanaan penanggulangan di daerah perbatasan (pada masa sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana) Sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana dengan memperhitungkan risiko lintas batas	Penanggung jawab: BPBD, Bappeda Pendukung: Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi		0.2	0.3		
PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
Memberdayakan perguruan tinggi, peneliti internal dan pegawai pemerintah untuk penyelenggaraan riset kebencanaan	Adanya lembaga riset kebencanaan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana Adanya 10 % dari kuota PNS tiap kabupaten/kota yang memiliki fokus penelitian untuk penanggulangan bencana Adanya pustaka hasil riset kebencanaan daerah yang dapat diakses secara luas	Penanggung jawab: BPBD, Bappeda Pendukung: Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Perguruan Tinggi	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Mengintegrasikan hasil riset kedalam kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana untuk meningkatkan	Adanya arah kebijakan inovasi kebencanaan yang jelas Kebijakan penanggulangan bencana berbasis hasil riset khas daerah	Penanggung jawab: BPBD, Bappeda Pendukung: Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas		0.5	0.5		

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
efektifitas dan optimalitas penanggulangan becnana masa sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana	Adanya kajian rasio perbandingan investasi terhadap setiap fase penanggulangan bencana dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan penanggulangan bencana daerah	Kesejahteraan Sosial, Perguruan Tinggi					
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT							
Membangun Eksistensi Forum PRB Kabupaten/Kota	Adanya SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Forum PRB Kabupaten/Kota	Penanggung jawab: BPBD, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Pendukung: Bappeda, BLH,Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Badan Kesbangpol	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Adanya Rencana Strategis Forum PRB Kabupaten/Kota yang mendukung pencapaian Rencana Penanggulangan Bencana Daerah						
	Konsolidasi dan koordinasi berkala Forum PRB kabupaten/Kota dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana						
	Terbangunnya komunikasi dan memperpendek birokrasi antar penyelenggara penanggulangan bencana						
	Adanya riview berkala dari Forum PRB kepada pemerintah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana						
Peningkatan kapasitas anggota Forum PRB Kabupaten/Kota	Adanya kriteria minimum perwakilan lembaga/institusi yang menjadi anggota Forum PRB	Penanggung jawab: BPBD, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Pendukung: Bappeda, BLH,Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Badan Kesbangpol	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Adanya pelatihan pengetahuan kebencanaan berkala bagi anggota-anggota aktif Forum PRB kabupaten/Kota						

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Membangun dukungan partisipasi sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kontrak kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dalam penggunaan CSR untuk upaya pengurangan risiko bencana	Penanggung jawab: BPBD, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	0.5	0.5			
	Adanya Kontrak kerjasama yang mendukung persediaan kebutuhan-kebutuhan penanganan darurat dan pemulihan bencana	Pendukung: Bappeda, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi		1	1	1	1
Membentuk desa tangguh di wilayah berisiko tinggi bencana	Terbentuknya desa tangguh pada wilayah yang berisiko tinggi bencana						
TOTAL			7	6.4	5	4.3	4
			26.7				

**LAMPIRAN 2B. SANDINGAN FOKUS PRIORITAS, SASARAN, KETERLIBATAN INSTITUSI DAN
PAGU INDIKATIF
STRATEGI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI BENCANA DAN
PENANGANAN DARURAT BENCANA**

a) Banjir

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI BENCANA							
Menyediakan dukungan, melaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi dan bendungan	Dilakukannya pembangunan dan perbaikan pada 20% jaringan utama irigasi dan bendungan setiap 5 tahun	Penanggung Jawab: Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pendukung: BPBD, BLH, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kehutanan	2	2	2.5	3	3.5
Mengembangkan inovasi pintu air dengan teknologi sederhana dan tepat guna	Diterapkannya teknologi sederhana dan tepat guna pada 20% pintu air di daerah rawan bencana banjir	Penanggung Jawab: Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Perguruan Tinggi Pendukung: BPBD, BLH, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.	1	1	1	1	1
Pengamanan dan pelestarian sumber daya air melalui reklamasi sungai di daerah rawan Bencana Banjir	Dilakukannya reklamasi 20% sungai pada daerah rawan bencana banjir setiap 5 tahun	Penanggung Jawab: Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pendukung: BPBD, BLH, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.	1	1	1.5	1.5	2
Menetapkan standar pengelolaan sumber daya air dan Daerah Aliran Sungai	Adanya Peraturan Bupati tentang Standar pengelolaan sumber daya air dan Daerah Aliran Sungai di daerah rawan bencana Banjir	Penanggung Jawab: Bagian Hukum, BLH Pendukung: BPBD, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	0.5				

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Penerapan dan pengawasan implementasi Standar Pengelolaan sumber daya air dan Daerah Aliran Sungai	Adanya 5 orang pengawas penerapan standar pengelolaan air dan daerah aliran sungai	Penanggung Jawab: BKD, BLH Pendukung: BPBD, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Bagian Hukum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Adanya <i>reward and punishment</i> bagi aparat hingga seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung standar pengelolaan sumber daya air dan daerah aliran sungai						
Melakukan pembersihan Daerah Aliran Sungai secara berkala dan partisipatif	Berkurangnya sedimentasi di 20% daerah aliran sungai rawan bencana banjir	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: BLH, Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan KB	1	1	1.5	1.5	2
	Peran aktif 50% aparat desa dan kecamatan dalam pembersihan daerah aliran sungai						
Melakukan sosialisasi tentang Kesiapsiagaan Banjir	Tersusunnya rencana evakuasi partisipatif masyarakat di zona penanganan bencana banjir	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: BLH, Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan KB	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Melakukan latihan berkala kesiapsiagaan bencana banjir	Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat di kawasan rawan bencana banjir minimal satu kali setahun	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: BLH, Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan KB	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir (contoh: Perahu karet, pelampung, dll)	Terpenuhinya 75% kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir sesuai dengan rencana kontinjensi banjir	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: Bappeda, BLH, Perguruan Tinggi, DPKAD	1	1	1.5	1.5	2
Pembangunan Sistem Peringatan Dini Banjir	Keterpaparan informasi peringatan dini bencana banjir kepada masyarakat rentan satu jam sebelum terjadinya banjir	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: Bappeda, BLH, Perguruan Tinggi	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Penyusunan dan penetapan rencana evakuasi di zona prioritas penanggulangan bencana banjir	Tersusunnya rencana evakuasi bencana banjir tingkat kabupaten/kota	Penanggung Jawab: BPBD	0.5	0.5	0.8	0.8	1
	Tersosialisasinya rencana evakuasi bencana banjir bagi masyarakat di kawasan rawan bencana banjir	Pendukung: Bappeda, BLH, Perguruan Tinggi					
PENANGANAN DARURAT BENCANA							
Kaji Cepat Bencana	Dibentuknya gugus tugas kaji cepat yang beranggotakan pakar lokal terkait dan gabungan SKPD						
	Ditetapkannya status darurat bencana oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi gugus tugas kaji cepat sesuai dengan prosedur operasi standar daerah						
Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi	Dilaksanakannya evakuasi bagi masyarakat dan pencarian korban banjir						
	Tersedianya tempat pertolongan bagi korban banjir						
Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Tersedianya tempat pengungsian bagi masyarakat yang melakukan evakuasi						
	Tersedianya kebutuhan dasar pengungsi minimal sesuai dengan Perka BNPB No.7 tahun 2008 di tempat pengungsian						
Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	Teridentifikasi jenis dan jumlah fasilitas kritis yang terdampak banjir						
	Fasilitas kritis yang terdampak banjir berfungsinya kembali						
Pengkajian Kerusakan dan Kerugian	Hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (DALA) dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.						

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi disahkan dan dilaksanakan						
Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Sarana dan prasarana publik dan rumah warga yang rusak dapat dipulihkan						
Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	Normalisasi kehidupan masyarakat korban selamat						
TOTAL			9	8.5	10.8	11.3	13.5
			53.1				

b) Tanah Longsor

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI BENCANA							
Penegakan peraturan lingkungan hidup terkait tata guna lahan	Penindakan bagi aktifitas penebangan liar termasuk pembakaran hutan dan aktivitas pengrusakan lingkungan lainnya	Penanggung Jawab: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pendukung: Bapedalda, BPBD	1	0.5	0.5	0.5	0.5
Alokasi dan pemindahan masyarakat yang berada di daerah rawan longsor dengan tingkat risiko tinggi	Adanya pemukiman baru yang aman bencana	Penanggung Jawab: BPBD		2	2	2	2
	Adanya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat di pemukiman baru	Pendukung: Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan					
Peningkatan daerah resapan air di rawan bencana longsor	Ditanamnya 100.000 batang tanaman keras di daerah rawan bencana longsor	Penanggung Jawab: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Pendukung: BPBD, Bappeda, BLH	1	1	1.5	1.5	2
Pembangunan Infrastruktur pengaman lereng di daerah rawan bencana longsor	Adanya terasering dan talut pada seluruh kawasan rawan longsor selama 5 tahun	Penanggung Jawab: Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan, BPBD	1.5	1.5	2	2	2
	Pembuatan 4 km drainase di bawah tebing yang berpotensi longsor	Pendukung: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan					
Pengembangan inovasi teknologi untuk pencegahan bencana Longsor berdasarkan kajian risiko bencana	Adanya hasil penelitian/tahun tentang inovasi teknologi untuk pengurangan kerentanan pada kawasan berisiko longsor	Penanggung Jawab: BPBD, Perguruan Tinggi Pendukung: Bappeda, BLH, Dinas Pertambangan dan Energi	1	1	1	1	1
	Adanya penerapan hasil teknologi terhadap pencegahan longsor pada daerah rawan bencana longsor						

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Membangunan sistem peringatan dini bencana longsor hingga tingkat desa	Adanya prosedur operasi standar peringatan dini longsor dengan keterpaparan arahan hingga ke seluruh lapisan masyarakat	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: BLH, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	1	1	1	1	1
	Adanya minimal 1 alat peringatan dini bencana longsor di setiap desa yang rawan bencana longsor dalam 5 tahun						
Membangun sarana dan prasarana evakuasi masyarakat pada daerah rawan bencana longsor	Tersedianya minimal 1 tempat pengungsian sementara berjarak 1 km pada setiap desa rawan bencana longsor dalam 5 tahun	Penanggung Jawab: Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan, BPBD Pendukung: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	1	1	1	1	1
	Tersedianya rambu-rambu informasi daerah rawan longsor						
Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan di kawasan rawan bencana longsor	Adanya pedoman standar penyelamatan diri dan penanganan darurat bencana untuk masyarakat	Penanggung Jawab: BPBD, Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan KB Pendukung: BLH, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan bersama antara pemerintah, lembaga dan masyarakat di kawasan rawan bencana longsor minimal satu kali setahun						
PENANGANAN DARURAT BENCANA							
Kaji Cepat Bencana	Dibentuknya gugus tugas kaji cepat yang beranggotakan pakar lokal terkait dan gabungan SKPD						
	Ditetapkannya status darurat bencana oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi gugus tugas kaji cepat sesuai dengan prosedur operasi standar daerah						
Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi	Dilaksanakannya evakuasi bagi masyarakat dan pencarian korban bencana						
	Tersedianya tempat pertolongan bagi korban bencana						

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Tersedianya tempat pengungsian bagi masyarakat yang melakukan evakuasi						
	Tersedianya kebutuhan dasar pengungsi minimal sesuai dengan Perka BNPB No.7 tahun 2008 di tempat pengungsian						
Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	Teridentifikasi jenis dan jumlah fasilitas kritis yang terdampak bencana						
	Fasilitas kritis yang terdampak bencana berfungsinya kembali						
Pengkajian Kerusakan dan Kerugian	Hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (DALA) dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.						
Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi disahkan dan dilaksanakan						
Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Sarana dan prasarana publik dan rumah warga yang rusak dapat dipulihkan						
Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	Normalisasi kehidupan masyarakat korban selamat						
TOTAL			7	8.5	9.5	9.5	10
			44.5				

c) Cuaca Ekstrim

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI BENCANA							
Pengembangan kebijakan inovasi teknologi untuk deteksi dini potensi bencana cuaca ekstrim	Terpetakannya daerah potensi ancaman cuaca ekstrim paling lama 1x24 jam sebelum kejadian bencana	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: BLH, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	1	1	1	1	1
	Digunakannya jaringan informasi kebencanaan terpusat dalam penyebaran peringatan dini ancaman cuaca ekstrim						
	Masyarakat mampu mengetahui tanda-tanda alam sebagai peringatan lokal kejadian cuaca ekstrim berdasarkan kearifan lokal yang ada						
Pelaksanaan pembangunan dan perawatan shelter perlindungan dan pengungsian bencana cuaca ekstrim	Adanya tempat perlindungan dan pengungsian masyarakat dari ancaman cuaca ekstrim	Penanggung Jawab: BPBD, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pendukung: Bappeda, BLH, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan		1.5	2	2.5	3
Pembangunan sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrim	Adanya sistem deteksi dini terhadap ancaman cuaca ekstrim bagi masyarakat di kawasan rawan	Penanggung Jawab: BPBD, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pendukung: Bappeda, BLH, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	1	1	1	1	1
	Adanya sistem penyebaran informasi peringatan dini bagi masyarakat minimal 1 x 24 Jam sebelum kejadian bencana cuaca ekstrim						
PENANGANAN DARURAT BENCANA							
Kajian Cepat Bencana Cuaca Ekstrim	Dibentuknya gugus tugas kaji cepat yang beranggotakan pakar lokal terkait dan gabungan SKPD						
	Ditetapkannya status darurat bencana oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi gugus tugas kaji cepat sesuai dengan prosedur operasi standar daerah						

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Pencarian, penyelamatan & evakuasi	Dilaksanakannya evakuasi bagi masyarakat dan pencarian korban bencana						
	Tersedianya tempat pertolongan bagi korban bencana						
Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Tersedianya tempat pengungsian bagi masyarakat yang melakukan evakuasi						
	Tersedianya kebutuhan dasar pengungsi minimal sesuai dengan Perka BNPB No.7 tahun 2008 di tempat pengungsian						
Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	Teridentifikasi jenis dan jumlah fasilitas kritis yang terdampak banjir						
	Fasilitas kritis yang terdampak banjir berfungsinya kembali						
Pengkajian kerusakan dan kerugian	Hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (DALA) dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.						
Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi	Dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi disahkan dan dilaksanakan						
Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Sarana dan prasarana publik dan rumah warga yang rusak dapat dipulihkan						
Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	Normalisasi kehidupan masyarakat korban selamat						
TOTAL			2	3.5	4	4.5	5
			19				

d) Kebakaran Hutan dan Lahan

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI BENCANA							
Membangun zonasi tanggul pengaman (<i>buffer</i>) antara kawasan hutan dan kawasan pemukiman	Adanya zona pemisah antara kawasan hutan dengan kawasan pemukiman pada kawasan rawan bencana	Penanggung Jawab: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pendukung: BPBD, Bappeda, BLH	0.5	0.5			
Menerapkan aturan kriteria dan standar pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan	Aturan tentang standar pengamanan dan penanggulangan bencana kawasan hutan	Penanggung Jawab: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan		0.5	0.5	0.5	0.5
	Dilakukannya identifikasi potensi titik-titik api	Pendukung: BPBD, Bappeda, BLH					
	Adanya tangki-tangki cadangan air pada kawasan hutan di zona berisiko tinggi kebakaran						
Pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan izin pemanfaatan hasil hutan produksi dan pariwisata alam	Aturan tentang kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hutan	Penanggung Jawab: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Adanya evaluasi berkala terhadap izin pemanfaatan hasil hutan yang telah dan akan dikeluarkan	Pendukung: BPBD, Bappeda, BLH					
	Adanya perlindungan dan pengamanan kelembaban kawasan hutan terutama pada saat musim kemarau						
Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan	Tersusunnya rencana kesiapsiagaan partisipatif masyarakat di zona penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan	Penanggung Jawab: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pendukung: BPBD, Bappeda, BLH	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan kepada sektor swasta pengguna hutan dan pemilik HPH	Tersusunnya rencana kesiapsiagaan partisipatif sektor swasta di zona penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan	Penanggung Jawab: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pendukung: BPBD, Bappeda, BLH	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Melakukan simulasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan	Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan bersama di kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan minimal satu kali setahun	Penanggung Jawab: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pendukung: BPBD, Bappeda, BLH	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (contoh: mobil pemadam kebakaran, dll)	Terpenuhinya 75% kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir sesuai dengan rencana kontinjensi kebakaran hutan dan lahan	Penanggung Jawab: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pendukung: BPBD, Bappeda, BLH	1.5	1.5	1.5	2	2
PENANGANAN DARURAT BENCANA							
Kaji Cepat Bencana	Dibentuknya gugus tugas kaji cepat yang beranggotakan pakar lokal terkait dan gabungan SKPD						
	Ditetapkannya status darurat bencana oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi gugus tugas kaji cepat sesuai dengan prosedur operasi standar daerah						
Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi	Dilaksanakannya evakuasi bagi masyarakat dan pencarian korban bencana						
	Tersedianya tempat pertolongan bagi korban bencana						
Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Tersedianya tempat pengungsian bagi masyarakat yang melakukan evakuasi						
	Tersedianya kebutuhan dasar pengungsi minimal sesuai dengan Perka BNPB No.7 tahun 2008 di tempat pengungsian						
Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis	Teridentifikasi jenis dan jumlah fasilitas kritis yang terdampak bencana						
	Fasilitas kritis yang terdampak bencana berfungsinya kembali						
Pengkajian Kerusakan dan Kerugian	Hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (DALA) dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.						
Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi disahkan dan dilaksanakan						

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana	Sarana dan prasarana publik dan rumah warga yang rusak dapat dipulihkan						
Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	Normalisasi kehidupan masyarakat korban selamat						
TOTAL			4	4.5	4	4.5	4.5
			21.5				

e) Kekeringan

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI BENCANA							
Menyediakan dukungan, melaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi, waduk dan bendungan	Dilakukannya pembangunan dan perbaikan pada 20% jaringan utama irigasi, waduk dan bendungan setiap 5 tahun	Penanggung Jawab: Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Bina Marga dan Pengairan Pendukung: BPBD, BLH	1	1	1	1	1
Menetapkan kawasan hutan-hutan lindung dan hutan-hutan konservasi di wilayah berisiko kekeringan	Adanya kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di setiap kawasan rawan bencana kekeringan	Penanggung Jawab: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pendukung: BPBD, BLH	0.5	0.5			
Menerapkan peraturan tentang pengamanan dan pelestarian Sumber daya air	Berkurangnya pencemaran sumber daya air di kawasan rawan bencana kekeringan			0.5	0.5	0.5	0.5
Melakukan Sosialisasi tentang Kesiapsiagaan Kekeringan	Tersusunnya rencana kesiapsiagaanpartisipatif masyarakat di zona penanganan bencana kekeringan	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Perikanan dan Peternakan	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Latihan berkala penanggulangan bencana kekeringan dengan melibatkan seluruh unsur terkait penanggulangan bencana	Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan bersama di kawasan rawan bencana kekeringan minimal satu kali setahun	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Perikanan dan Peternakan	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
PENANGANAN DARURAT BENCANA							
Kaji Cepat Bencana	Dibentuknya gugus tugas kaji cepat yang beranggotakan pakar lokal terkait dan gabungan SKPD						
	Ditetapkannya status darurat bencana oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi gugus tugas kaji cepat sesuai dengan prosedur operasi standar daerah						
Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi	Dilaksanakannya evakuasi bagi masyarakat dan pencarian korban bencana						
	Tersedianya tempat pertolongan bagi korban bencana						

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
Pengkajian Kerusakan dan Kerugian	Hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (DALA) dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.						
Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	Normalisasi kehidupan masyarakat korban selamat						
TOTAL			2.1	2.6	2.1	2.1	2.1
			11				

f) Konflik Sosial

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI BENCANA							
Penyelesaian perselisihan antar kabupaten	Terbentuknya Forum Deteksi Dini Konflik Sosial di kabupaten rawan konflik	Penanggung Jawab: Badan Kesbangpol Linmas Pendukung: BPBD, Forum Deteksi Dini Konflik Sosial, POLRI, TNI	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	Adanya kasus sengketa yang diselesaikan melalui Forum Deteksi Dini Konflik Sosial						
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Adanya 3 orang kader Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di setiap kecamatan	Penanggung Jawab: Badan Kesbangpol Linmas Pendukung: TNI, POLRI, BPBD	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
PENANGANAN DARURAT BENCANA							
Kajian Cepat Bencana	Dibentuknya gugus tugas kaji cepat yang beranggotakan pakar lokal terkait dan gabungan SKPD						
	Ditetapkannya status darurat bencana oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi gugus tugas kaji cepat sesuai dengan prosedur operasi standar daerah						
Pencarian, penyelamatan & evakuasi	Tersedianya tempat pengungsian bagi masyarakat yang melakukan evakuasi						
	Dilaksanakannya evakuasi bagi masyarakat dan pencarian korban bencana						
	Tersedianya tempat pertolongan bagi korban bencana						
Pengkajian kerusakan dan kerugian	Hasil perhitungan kerusakan dan kerugian (DALA) dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.						
TOTAL			0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
			3.00				

g) Epidemi dan Wabah Penyakit

FOKUS PRIORITAS	SASARAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	Pagu Indikatif tahun ke (Miliar Rupiah)				
			1	2	3	4	5
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI BENCANA							
Sosialisasi tentang pencegahan bencana epidemi dan wabah penyakit	Tersusunnya rencana kesiapsiagaan partisipatif masyarakat di kawasan rawan bencana epidemi dan wabah penyakit	Penanggung Jawab: BPBD, Dinas Kesehatan Pendukung: Bappeda, BLH			0.05		0.05
Survey berkala serta pengaturan pemberantasan bencana epidemi dan wabah penyakit	Adanya data awal deteksi kejadian bencana epidemi dan wabah penyakit	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Bappeda, BLH	0.10		0.10		0.10
Vaksinasi kepada penduduk rentan di daerah berisiko bencana epidemi dan wabah penyakit	Divaksinasinya 90% penduduk dan 50% ternak yang berada di kawasan rawan bencana epidemi dan wabah penyakit	Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Bappeda, BLH.		0.20		0.20	
PENANGANAN DARURAT BENCANA							
Kaji Cepat Bencana	Dibentuknya gugus tugas kaji cepat yang beranggotakan pakar lokal terkait dan gabungan SKPD						
	Ditetapkannya status darurat bencana oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi gugus tugas kaji cepat sesuai dengan prosedur operasi standar daerah						
Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya tempat pengungsian bagi masyarakat						
	Tersedianya tempat pertolongan bagi korban bencana						
Pengisolasian korban bencana	Terisolasinya semua korban bencana						
Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	Tersedianya tempat pengungsian bagi masyarakat						
	Tersedianya kebutuhan dasar pengungsi minimal sesuai dengan Perka BNPB No.7 tahun 2008 di tempat pengungsian						
Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban	Normalisasi kehidupan masyarakat korban selamat						
TOTAL			0.10	0.20	0.15	0.20	0.15
			0.80				



BNPB

**KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**